

LAPORAN TAHUNAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2024 ini dapat berjalan lancar dan laporan tahunan dapat disusun tepat pada waktunya.

Laporan Tahunan 2024 ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan evaluasi kinerja dan penyusunan program kerja tahun yang akan datang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum / Para Ketua Tim Kerja / Kepala Wilayah Kerja yang telah bekerja keras dan selalu berkoordinasi dengan baik dengan seluruh stafnya.
2. Seluruh pelaksana program kegiatan yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme dalam melaksanakan setiap kegiatan.
3. Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, Pelabuhan, Bandara dan Wilayah Kerja dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

Dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, tentunya banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar laporan tahunan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Bandung, 30 April 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung,



dr. Sedy Dwisangka, M.Epid

NIP 196901042002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN LALU	1
1.1 HAMBATAN TAHUN LALU	1
1.2 KELEMBAGAAN	4
1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	4
1.2.2 SARANA DAN PRASARANA	8
1.2.3 DANA	10
BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN KERJA	15
2.1 DASAR HUKUM	15
2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	16
2.2.1 TUJUAN	16
2.2.2 SASARAN	17
2.2.3 INDIKATOR	18
BAB 3 STRATEGI PELAKSANAAN	26
3.1 STRATEGI PELAKSANAAN	26
3.2 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN	28
3.3 TEROBOSAN YANG DILAKUKAN	29
BAB 4 HASIL KERJA	35
4.1 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	35
4.2 PENCAPAIAN KINERJA	143
4.3 REALISASI ANGGARAN	144
4.4 UPAYA UNTUK MERAH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI	144
BAB 5 PENUTUP	145
5.1 KESIMPULAN	145
5.2 SARAN	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu.....	6
Tabel 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu.....	7
Tabel 3 Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan berdasarkan lokasi.....	8
Tabel 4 Jenis dan Jumlah Barang Bergerak Bandung Per 31 Desember 2024	9
Tabel 5 Jumlah dan Lokasi Barang Bergerak Di BKK Bandung	9
Tabel 6 Tabel 6 DIPA BKK Kelas I Bandung berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024	14
Tabel 7 Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	18
Tabel 8 Matriks RAK Tahun 2020 – 2024	19
Tabel 9 Pencapaian Kegiatan BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	35
Tabel 10 Pagu Anggaran BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	36
Tabel 11 Capaian Output BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	36
Tabel 12 Pencapaian Kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Pengelola Keuangan BKK Kelas I Bandung.....	10
Gambar 3.1 Sosialisasi penggunaan SSHP di Bandara Kertajati, september 2024.....	31
Gambar 3.2 Sosialisasi Penggunaan Aplikasi TANGKAP Wilker Patimban	33
Gambar 3.3 Materi Diseminasi Informasi Pada Kegiatan Pengawasan Penyakit	34
Gambar 4.2 Desk Anggaran Kegiatan Surveilans dan Penindakan Pelanggaran.....	41
Gambar 4.3 Anggaran perencanaan tahun 2025	41
Gambar 4.4 Dokumentasi di Asrama Haji Bekasi.....	42
Gambar 4.5 Koordinasi dalam Rangka Persiapan Operasional Debarkasi Haji	43
Gambar 4.6 Menghadiri Pertemuan dengan Instansi terkait (PPIH).....	44
Gambar 4.7 Kegiatan Diseminasi Kasus Leptospirosis di Wilker Palabuhan Ratu	44
Gambar 4.8 Dropped Obat dari Direktorat Kefarmasian dan Alkes ke Asrama Haji Bekasi.....	45
Gambar 4.9 Infografis Rekapitulasi Data Kekarantinaan Kesehatan	46
Gambar 4.10 Infografis Rekapitulasi Data Kekarantinaan Kesehatan	47
Gambar 4.11 Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Tahap Ketiga	48
Gambar 4.12 Pengendalian Risiko Lingkungan di Embarkasi Haji	49
Gambar 4.13 Surveilans Epidemiologi Status Kesehatan dan Validasi Status Vaksinasi	49
Gambar 4.14 Koordinasi dengan Dinkes Kab/Kota Pangan Jamaah Haji	50
Gambar 4.15 Jemaah Ny. M sedang diperiksa oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam.....	51
Gambar 4.16 Melakukan Pembagian Obat dan Perlengkapan Kesehatan Kepada Jamaah Haji	52
Gambar 4.17 pengawasan makanan minuman jemaah haji.....	53
Gambar 4.18 Kunjungan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota.....	54
Gambar 4.19 Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji	54
Gambar 4.20 Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Penyakit Potensial Wabah	55
Gambar 4.21 Penyuluhan Informasi Wolbachia di Lembaga Pendidikan	56
Gambar 4. 22 Sanitasi dan Pengendalian Vektor di Pesawat	57
Gambar 4.23 Evaluasi pelayanan Kesehatan pasca debarkasi dan evaluasi pelayanan kesehatan	58
Gambar 4.24 pelayanan Kesehatan di Bandara Kertajati.....	58
Gambar 4.25 Relokasi Barang pasca Debarkasi.....	59
Gambar 4.26 Surveilans Epidemiologi Pada Pelaku Perjalanan Internasional	59
Gambar 4.27 Evaluasi Pengawasan Pangan Pelaku Perjalanan Internasional	60
Gambar 4.28 Konsultasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan	61
Gambar 4.29 Evaluasi Pengendalian Risiko Lingkungan Pasca Debarkasi dan Pemeriksaan Leptospirosis	62
Gambar 4.30 Konsultasi implementasi teknologi Kesehatan.....	63

Gambar 4.31 Kegiatan Saka Bakti Husada Ditjen P2P	64
Gambar 4.32 Monitoring Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Saat Bencana/ Hari Besar Nasional/ Hari Raya Nasional.....	65
Gambar 4.33 Pelayanan Kesehatan klinik, skrining penyakit menular dan penjamah makanan di pintu masuk negara	66
Gambar 4.34 Kegiatan IKL Tahap I di Asrama Haji Indramayu, 4 – 5 Desember 2023	67
Gambar 4.35 Uji Petik Keamanan Pangan.....	68
Gambar 4.36 Uji Petik Air Kebutuhan Sanitasi di Pelabuhan dan Bandara	69
Gambar 4.37 Pengawasan Udara dan Koordinasi Pelabuhan Bandara Sehat.....	70
Gambar 4.38 Pengawasan Limbah Cair di Pelabuhan dan Bandara.....	71
Gambar 4.39 Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan di Pelabuhan dan Bandara.....	72
Gambar 4.40 Pengawasan dan Tindakan Penyehatan SAB di Pelabuhan dan Bandara	73
Gambar 4.41 Inspeksi Sanitasi HSBU di Pelabuhan dan Bandara.....	74
Gambar 4.42 Pengelolaan Limbah Medis di Induk dan Wilker	75
Gambar 4.43 Kegiatan Verifikasi Rumor Ke Dinas Kesehatan Sukabumi	76
Gambar 4.44 Kegiatan Verifikasi Rumor ke Wilker Kertajati	77
Gambar 4.45 Penyelidikan Epidemiologi terhadap kasus leptospirosis.....	78
Gambar 4.46 Surveilans Epidemiologi dalam rangka deteksi dini faktor risiko penyakit.....	79
Gambar 4.47 Pengumpulan Data Surveilans Epidemiologi Penyakit di Pintu Masuk	80
Gambar 4.48 Skrining HIV – AIDS dan konsultasi Kesehatan.....	81
Gambar 4.49 Kegiatan Skrining TBC di Wilayah Kerja Indramayu dan BIJB Kertajati.....	82
Gambar 4.50 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Posko Nataru 2024-2025.....	83
Gambar 4.51 Pemasangan Perangkap Tikus	84
Gambar 4.52 Identifikasi Tikus dan Pinjal	85
Gambar 4.53 survei faktor risiko penyakit DBD.....	87
Gambar 4.54 Layanan survei faktor risiko penyakit diare.....	88
Gambar 4.55 Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS di Pelabuhan ratu.....	89
Gambar 4.56 Kegiatan Skrining TB di BIJB Kertajati	89
Gambar 4.57 Pelayanan Klinik di Pintu Masuk Negara	90
Gambar 4.58 Bukti Surat Pesanan Boarding Kit – Pengadaan APD Th. 2024	93
Gambar 4.59 Pelatihan BTCLS dan Seminar KONAS IX PERDOSPI.....	97
Gambar 4.60 Kegiatan 11th NSCE Yang diadakan di Hotel Haris Bandung,	98
Gambar 4.61 Kegiatan workshop PCR pemeriksaan leptospirosis	99
Gambar 4.62 Kegiatan koordinasi LS/LP program pendukung teknis P2P di Wilker Palabuhanratu, Sukabumi.....	100

Gambar 4.63 Kegiatan <i>coaching</i> SPIPT, PIPK, pemantauan SOP, kearsipan wilker, kepegawaian, perencanaan anggaran, keuangan dan BMN di Patimban dan Kertajati	103
Gambar 4.64 penyusunan laporan BMN UAPPA/B E-1 Ditjen P2P.....	104
Gambar 4.65 Pemusnahan BMN Selain Tanah dan Bangunan	105
Gambar 4.66 Koordinasi dan penyelesaian masalah pengelolaan BMN di Sesditjen P2P	105
Gambar 4.67 Pertemuan reviu Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) TA 2026	106
Gambar 4.68 konsultasi terkait penanganan pengaduan masyarakat dan Whistleblowing System	107
Gambar 4.69 kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke wilayah kerja Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati)	108
Gambar 4.70 kegiatan Konsultasi terkait Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke Inspektorat Jenderal.....	108
Gambar 4.71 kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke wilayah kerja	109
Gambar 4.72 kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi).....	109
Gambar 4.73 kegiatan Konsultasi terkait Advokasi Hukum dan Bantuan Hukum ke Hukormas Setditjen P2P	110
Gambar 4.74 kegiatan Koordinasi hukum ke Dinas Kesehatan Kota Bandung	111
Gambar 4.75 kegiatan Koordinasi hukum ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	111
Gambar 4.76 kegiatan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kemenkes tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	112
Gambar 4.77 kegiatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Wilker Pelabuhan Laut Cirebon	113
Gambar 4.78 Rapat penyusunan media KIE.....	114
Gambar 4.79 Kegiatan reviu penyusunan analisis beban kerja (ABK) di Wilker Palabuhanratu	115
Gambar 4.80 Kegiatan penyusunan peta dan informasi jabatan	116
Gambar 4.81 Paparan Penanganan Konflik Kepentingan Oleh Tim Kerja Hukormas Setijen P2P di Ruang Rapat BKK Kelas I bandung Tanggal 28 November 2024	116
Gambar 4.82 Rapat Kegiatan SOP AP BKK Kelas I Bandung	117
Gambar 4. 83 Rapat kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK ke Pos Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati	118
Gambar 4.84 Konsultasi kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK.....	118
Gambar 4.85 kegiatan Reviu Data Klasifikasi KKP	119
Gambar 4.86 Koordinasi satpel 5 Jabar terkait kontrak pengadaan kendaraan ambulans	121
Gambar 4.87 Kegiatan Rapat penyusunan profil di BKK Bandung.....	123
Gambar 4.88 Kegiatan sosialisasi petunjuk teknis seleksi administrasi (Tahap II) penerimaan PPPK	124

Gambar 4.89 Kegiatan konsultasi layanan mutasi kepegawaian ke pusat	125
Gambar 4.90 Kegiatan konsultasi penataan dan penyusunan kebutuhan pegawai dengan pusat	126
Gambar 4.91 Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD).....	127
Gambar 4.92 Kegiatan diklat jabatan fungsional pranata komputer di Bapelkes Cikarang	128
Gambar 4.93 Kegiatan workshop penyusunan anggaran dan akuntabilitas kinerja Sub Bagian Adiminstrasi Umum.....	128
Gambar 4.94 Kegiatan desk pembahasan dan penelaahan usulan kegiatan dan anggaran program P2P TA 202	129
Gambar 4.95 Kegiatan pengumpulan data RAK dan profil tahun 2024 di Wilker Indramayu	130
Gambar 4.96 Kegiatan desk, penelitian dan reuiu RKA-K/L pagu alokasi anggaran Ditjen P2P TA 2025	131
Gambar 4.97 Kegiatan penyusunan target dan pagu PNBK TA 2026	132
Gambar 4.98 kegiatan reuiu SAKIP desk APIP Tahun 2023 di Jakarta Pusat.....	133
Gambar 4.99 Kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan laporan tahunan TA 2024 di Wilker Palabuhanratu	133
Gambar 4.100 Kegiatan Rapat Bulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Pencegahan Kesehatan Triwulan I Tahun 2024	134
Gambar 4.101 Kegiatan pelaksanaan program monev P2P dalam rangka nataru di Kab. Majalengka	136
Gambar 4.102 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	138
Gambar 4.103 Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P	142
Gambar 4.104 Kegiatan desk pengawasan kearsipan di Swissbell Yogyakarta dan Kegiatan inventarisir pengelolaan kearsipan di Wilker Cirebon.....	143

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Distribusi Pegawai di Lingkungan BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	4
Grafik 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024.....	5
Grafik 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024	5
Grafik 4 Grafik Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2020 s.d 2024	13
Grafik 5 Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung Tahun 2020 s.d 2024	13

BAB I

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN LALU

1.1 HAMBATAN TAHUN LALU

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Guna mewujudkan misi Presiden Republik Indonesia dalam bidang kesehatan pada Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 6 (enam) tujuan strategis:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Untuk mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat menetapkan 4 (empat) tujuan:

1. Terwujudnya Pencegahan Penyakit yang komprehensif dan berkualitas
2. Terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium Penyakit dan Faktor risiko di wilayah dan pintu masuk
4. Terbangunnya Tata Kelola program yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung memiliki tujuan strategis yaitu terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah;
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pada awal tahun Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) indikator namun dikarenakan tidak ada temuan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sehingga Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti dihapuskan. Oleh Karena itu pada Bulan November 2024 dilakukan revisi Perjanjian Kerja menjadi 8 (delapan) Indikator Kinerja Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu:

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBN dengan capaian sebesar 0,96 dari target 0,96 (100%).
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian sebesar 100 dari target 98 (102%).
3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBN dengan capaian sebesar 1 dari target 0,97 (105,26%).
4. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 95,8 dari target 82 (116,56%).
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan capaian sebesar 98,65 dari target 93 (106,07%).
6. Kinerja implementasi WBK satker dengan capaian sebesar 88,79 dari target 82 (108,28%).
7. Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya dengan capaian sebesar 100% dari target 80% (125%).
8. Persentase Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar 98,34% dari target sebesar 96% (102,44%). Pagu anggaran Tahun 2024 BKK Kelas I Bandung sejumlah Rp. 28.172.373.000,- dan realisasi sejumlah Rp. 27.706.092.708,-

Nilai efisiensi BKK Kelas I Bandung sebesar 55%. Dengan persentase anggaran 98.34% dapat mencapai rata - rata kinerja 107,94%. Rata – rata capaian kinerja Tahun 2024 di BKK Kelas I Bandung sebesar 107,94%.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat terlihat dari keberhasilan dalam pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun lalu ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan diantaranya :

1. Rendahnya Pelaku Perjalanan di BIJB Kertajati

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau BIJB Kertajati resmi dioperasikan secara penuh pada tanggal 29 Oktober 2023. Bandara ini melayani 1 (satu) rute penerbangan internasional yaitu Kuala Lumpur dan 3 (tiga) rute penerbangan domestik yaitu Bali, Medan, dan Balikpapan. Selain itu BIJB juga melayani penerbangan khusus seperti umroh dan haji untuk daerah Jawa Barat.

Dengan aktifnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, diharapkan ada peningkatan lalu lintas penerbangan menuju Jawa Barat dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat. Namun melihat tren lalu lintas penumpang dan pesawat di BIJB Kertajati sepanjang tahun 2024, pengawasan pelaku perjalanan internasional hampir tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan melalui BIJB Kertajati membuat maskapai yang ada di Bandara Kertajati saat ini enggan mengoperasikan banyak rute penerbangan. Bahkan beberapa maskapai yang sebelumnya pernah beroperasi di Bandara Husein Sastranegara tidak membuka kembali penerbangan di BIJB Kertajati atau bahkan menutup rute penerbangan yang sebelumnya dibuka. Penerbangan umroh yang digadang-gadang menjadi primadona di BIJB Kertajati juga sudah tidak lagi beroperasi sejak selesai musim haji 2024 M/1445 H. Berdasarkan Data Angkutan Udara BIJB Kertajati tahun 2024, jumlah lalu lintas penumpang dan pesawat menurun dari bulan Januari sebanyak 45.266 orang dan 348 pesawat menjadi 19.679 orang dan 160 pesawat di bulan Desember.

Kondisi di BIJB Kertajati ini akan berdampak pada kemungkinan menurunnya angka target dan capaian untuk memenuhi target indikator kinerja pada tahun berikutnya. Di Bulan Desember yang merupakan musim puncak liburan natal dan tahun baru (nataru), jumlah pelaku perjalanan dan penerbangan cenderung menurun, padahal capaian di tahun ini menjadi acuan dalam penentuan target capaian di tahun berikutnya. Apabila kondisi ini tidak berubah, ada kemungkinan target pemeriksaan orang di tahun depan harus diturunkan dibandingkan dengan tahun ini.

2. *Self Blocking* sebesar Rp. 60.116.000,- pada bulan November 2024

Surat dari Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait Penghematan Perjalanan Dinas melalui mekanisme *self blocking* pada satker di lingkungan Ditjen P2P TA 2024. sehingga dilakukan *self blocking* pada Hal IV.a Blokir sebesar Rp. 60.115.000. Namun pada revisi DIPA ke XI, *self blocking* tidak diikuti dengan perubahan Pagu pada DIPA. berikut rincian *self blocking* BKK Kelas I Bandung.

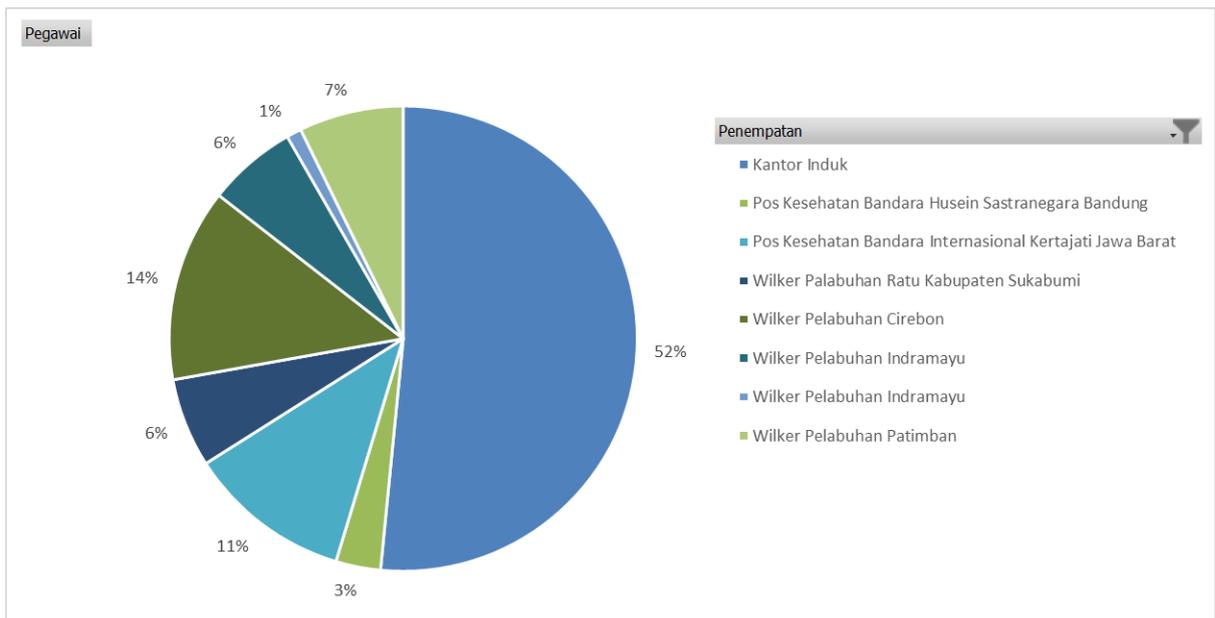
No	Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Block Amount	%	sisa anggaran
	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	7.597.886.000	7.441.076.656	30.057.000	97,94	126.752.344
1	4249PEA Koordinasi	123.070.000	122.556.559	430.000	99,58	83.441
2	4249PEF Sosialisasi dan Diseminasi	21.380.000	21.356.551	-	99,89	23.449
3	4249QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.698.967.000	2.682.209.924	10.868.000	99,38	5.889.076
4	4249QAH Pelayanan Publik Lainnya	818.201.000	798.755.174	17.507.000	97,62	1.938.826
5	4249RAB Sarana Bidang Kesehatan	3.858.097.000	3.743.429.267	-	97,03	114.667.733
6	4249TBC Layanan Manajemen SDM Internal	78.171.000	72.769.181	1.252.000	93,09	4.149.819
No	Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Block Amount	%	sisa anggaran
	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	20.574.487.000	20.265.962.962	30.058.000	98,50	278.466.038
1	4815AEA Koordinasi	219.528.000	183.289.049	30.058.000	83,49	6.180.951
2	4815EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.921.365.000	19.694.305.067	-	98,86	227.059.933
3	4815EBC Layanan Manajemen SDM Internal	64.656.000	45.364.960	-	70,16	19.291.040
4	4815EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	368.938.000	343.003.886	-	92,97	25.934.114
	Total	28.172.373.000	27.707.039.618	60.115.000	98,348	405.218.382

1.2 KELEMBAGAAN

1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

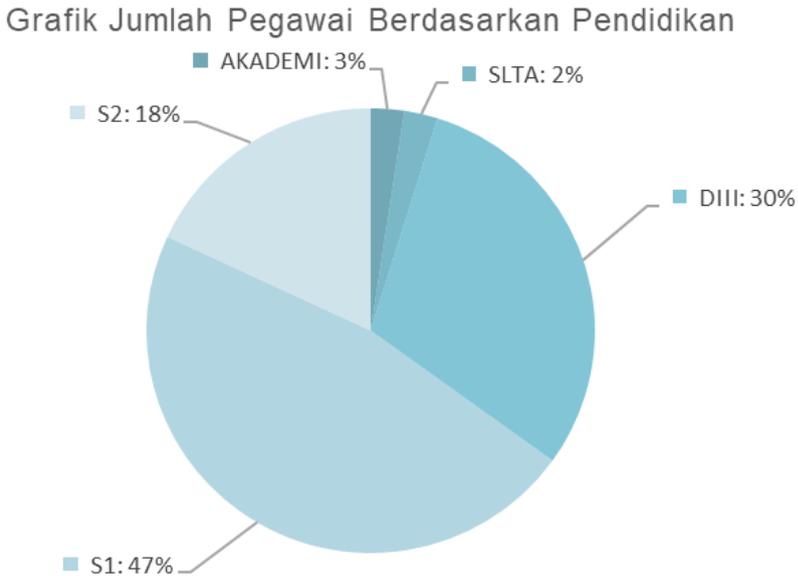
Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di BKK Kelas I Bandung diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Distribusi pegawai BKK Kelas I Bandung berdasarkan wilayah kerja, pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1 Distribusi Pegawai di Lingkungan BKK Kelas I Bandung Tahun 2024



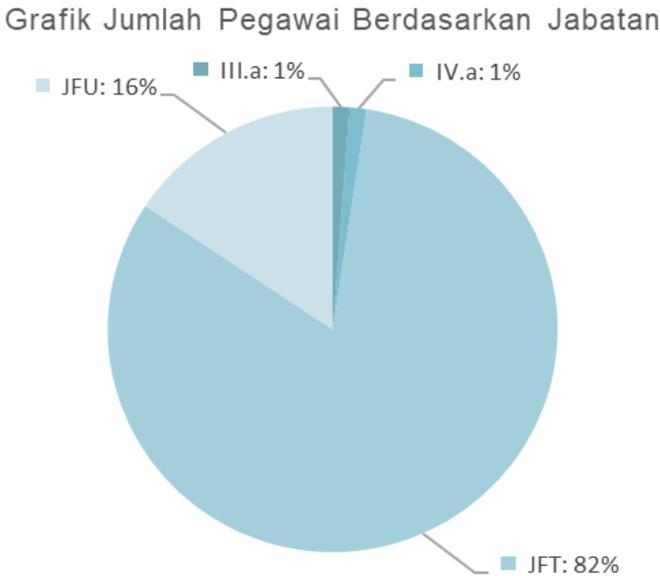
Jumlah Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BKK Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 71 orang PNS, 12 PPPK dan 14 orang PNPB sehingga total menjadi 97 orang yang tersebar baik di induk maupun wilayah kerja.

Grafik 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



ASN BKK Kelas I Bandung memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Berdasarkan kualifikasi jenjang pendidikan, pegawai BKK Kelas I Bandung didominasi oleh pegawai dengan jenjang pendidikan S1 (47%), D3 (30%), S2 (18%) dan SLTA (2%).

Grafik 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024



Pegawai Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung didominasi oleh kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 82% diikuti Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 16%, Eselon III,a 1% dan IV,a sebesar 1%.

1. Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yaitu Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor dan Pejabat eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

2. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Dari 68 orang dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terdiri atas :

Tabel 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JFT)	1
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (JFT)	1
4	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
5	Asisten Apoteker Terampil (JFT)	1
6	Dokter Ahli Madya (JFT)	2
7	Dokter Ahli Muda (JFT)	3
8	Dokter Ahli Pertama (JFT)	4
9	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	4
10	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
11	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
12	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	3

13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	8
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
15	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
16	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	2
17	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	1
18	Perawat Mahir (JFT)	5
19	Perawat Penyelia (JFT)	2
20	Perawat Terampil (JFT)	5
21	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
22	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	1
23	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	1
24	Pranata Komputer Terampil (JFT)	1
25	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JFT)	2
26	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JFT)	1
27	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JFT)	1
28	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	1
29	Sanitarian Ahli Muda (JFT)	2
30	Sanitarian Mahir (JFT)	2
31	Sanitarian Penyelia (JFT)	1
32	Sanitarian Terampil (JFT)	2

3. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 13 orang dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) terdiri dari :

Tabel 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU)	2
2	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JFU)	1

3	Bendahara (JFU)	1
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli (JFU)	2
5	Pembimbing Kesehatan Kerja / Analis Kesehatan Kerja (JFU)	1
6	Pengelola Barang Milik Negara (JFU)	1
7	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	2
8	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	1
9	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan (JFU)	1
10	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU)	1

1.2.2 SARANA DAN PRASARANA

A. Barang Tidak Bergerak

Aset tidak bergerak di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung per 31 Desember 2024 berupa Bangunan Kantor, Rumah Dinas, Luas Tanah, Alat Kesehatan Besar, dan Alat Perlengkapan Kantor.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung memiliki sarana prasarana barang tidak bergerak berupa tanah seluas 5.973 m² dan bangunan seluas 3.594 m². Kuantitas luas tanah dan bangunan berdasarkan lokasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan berdasarkan lokasi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS PER 31 DESEMBER 2024	KET
1	Tanah		
	- Tanah bangunan rumah negara gol II (Cirebon)	200 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Indramayu	528 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Cirebon	1000 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Kertajati	1626 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Pelabuhan Ratu	1060 m ²	
	- Tanah untuk Kantor Induk (Cikapayang)	780 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Patimban	779 m ²	
2	Gedung dan Bangunan		
	a. Bangunan Gedung Kantor Permanen		
	1) Bangunan Gedung Kantor di Wilker Cirebon	212 m ²	
	b. Bangunan Gedung Garasi di Wilker Cirebon	80 m ²	
	c. Rumah Negara di Cirebon Gol II Tipe A Permanen	130 m ²	
	d. Bangunan Gedung Kantor Permanen Induk (Cikapayang)	1.529 m ²	
	e. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker Cirebon	615 m ²	
	f. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker Indramayu	309 m ²	

	g. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker Pelabuhan Ratu	305 m2	
	h. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker Kertajati	414 m2	

B. Barang Bergerak

Sarana prasarana berupa barang bergerak di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung per 31 Desember 2024 sebanyak 52 unit yang terdiri dari 32 unit kendaraan roda 4 dan 20 unit kendaraan roda 2.

Tabel 4 Jenis dan Jumlah Barang Bergerak Bandung Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS PER 31 DESEMBER 2024	KET
1	Roda 4 (Empat)		
	a. Minibus	14 unit	
	b. Pick up	4 unit	
	c. Ambulance	11 unit	
	d. Mobil Listrik	3 unit	
2	Roda 2 (Dua)		
	a. Sepeda Motor	19 unit	
	b. Sepeda Motor Listrik	1 unit	

Berdasarkan lokasi, jenis dan jumlah barang bergerak sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Jumlah dan Lokasi Barang Bergerak Di BKK Bandung

NO	LOKASI	JENIS KENDARAAN					JUMLAH
		RODA EMPAT				RODA DUA	
		MINI BUS	AMBULANCE	PICKUP	MOBIL LISTRIK		
1	Kantor Induk (Bandung)	10	3	3	3	13	32
2	Wilker Cirebon	2	2	1	0	2	7
3	Wilker Indramayu Balongan	1	1	0	0	2	4
4	Wilker Palabuhan Ratu	0	1	0	0	1	2
5	Wilker Kertajati	0	2	0	0	2	4

6	Bandara Husein	0	1	0	0	0	1
7	Wilker Patimban	1	1	0	0	0	2
JUMLAH		14	11	4	3	20	52

1.2.3 DANA

Anggaran disusun dan dikelola berdasarkan rencana kebutuhan yang ada serta dengan mempertimbangkan pagu anggaran yang tersedia dan juga tidak terlepas dari peraturan perundangan yang berlaku.

a. Struktur Pengelola Keuangan

Tata kelola keuangan pada Sub Bagian Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung meliputi pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, pembayaran gaji dan tunjangan, melaksanakan perbendaharaan, melakukan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, melakukan penatausahaan dokumen keuangan dan pelaporan pajak. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan mempertimbangkan pagu anggaran yang tersedia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan anggaran pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh Kepala Balai dan memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan. Adapun struktur pejabat perbendaharaan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Struktur Pengelola Keuangan BKK Kelas I Bandung

b. Pagu Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, DIPA BKK Kelas I Bandung mengalami revisi DIPA sampai dengan 12 (dua belas) kali, yaitu:

1. DIPA Revisi 0

DIPA BKK Bandung awal terbit pada tanggal 30 november 2023 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

2. DIPA Revisi I

DIPA BKK Bandung Revisi I (Kanwil) terbit pada tanggal 11 Januari 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

3. DIPA Revisi II

DIPA BKK Bandung Revisi II (Kanwil) terbit pada tanggal 19 Februari 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

4. DIPA Revisi III

DIPA BKK Bandung Revisi III (Kanwil) terbit pada tanggal 21 Februari 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

5. DIPA Revisi IV

DIPA BKK Bandung Revisi IV (DJA) terbit pada tanggal 21 April 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA dan adanya penambahan pagu untuk Debarkasi Haji.

6. DIPA Revisi V

DIPA BKK Bandung Revisi V (Kanwil) terbit pada tanggal 2 Mei 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

7. DIPA Revisi VI

DIPA BKK Bandung Revisi VI (Kanwil) terbit pada tanggal 1 Juni 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

8. DIPA Revisi VII

DIPA BKK Bandung Revisi VII (DJA) terbit pada tanggal 4 Juli 2024 dikarenakan adanya penambahan pagu Anggaran bersumber Rupiah Murni Terkait Gaji dan Tunjangan PPPK BKK Kelas I Bandung sebanyak 10 orang sebesar Rp. 463.000.000,-

9. DIPA Revisi VIII

DIPA BKK Bandung Revisi VIII (DJA) terbit pada tanggal 15 Juli 2024 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA Triwulan III.

10. DIPA Revisi IX

DIPA BKK Bandung Revisi IX (DJA) terbit pada tanggal 15 Juli 2024 dikarenakan adanya penambahan PAGU Anggaran bersumber Rupiah Murni Terkait Gaji dan Tunjangan PPPK BKK Kelas I Bandung sebanyak 10 orang sebesar Rp. 463.000.000,-

11. DIPA Revisi X

DIPA BKK Bandung Revisi X (Kanwil) terbit pada tanggal 16 Oktober 2024 dikarenakan adanya penambahan pagu Anggaran bersumber PNBP terkait Penggunaan Kelebihan Realisasi Penerimaan atas Target PNBP di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung TA 2024 sebesar RP. 2.500.000.000,- serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA Triwulan IV.

12. DIPA Revisi XI

DIPA BKK Bandung Revisi XI (Kanwil) terbit pada tanggal 20 November 2024 dikarenakan adanya Surat dari Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait Penghematan Perjalanan Dinas melalui mekanisme *self blocking* pada satker di lingkungan Ditjen P2P TA 2024. sehingga dilakukan *self blocking* pada Hal IV.a Blokir sebesar Rp. 60.115.000,- . Namun pada revisi DIPA ke XI *self blocking* tidak diikuti dengan perubahan Pagu pada DIPA. berikut rincian *self blocking* BKK Kelas I Bandung.

13. DIPA Revisi XII

DIPA BKK Bandung Revisi XII (Pemukhiran KPA) terbit pada tanggal 21 Desember 2024 dikarenakan adanya Pemukhiran Revisi POK karena pergeseran pada akun 51 yaitu Uang Lembur dan Uang Makan PNS maupun PPPK.

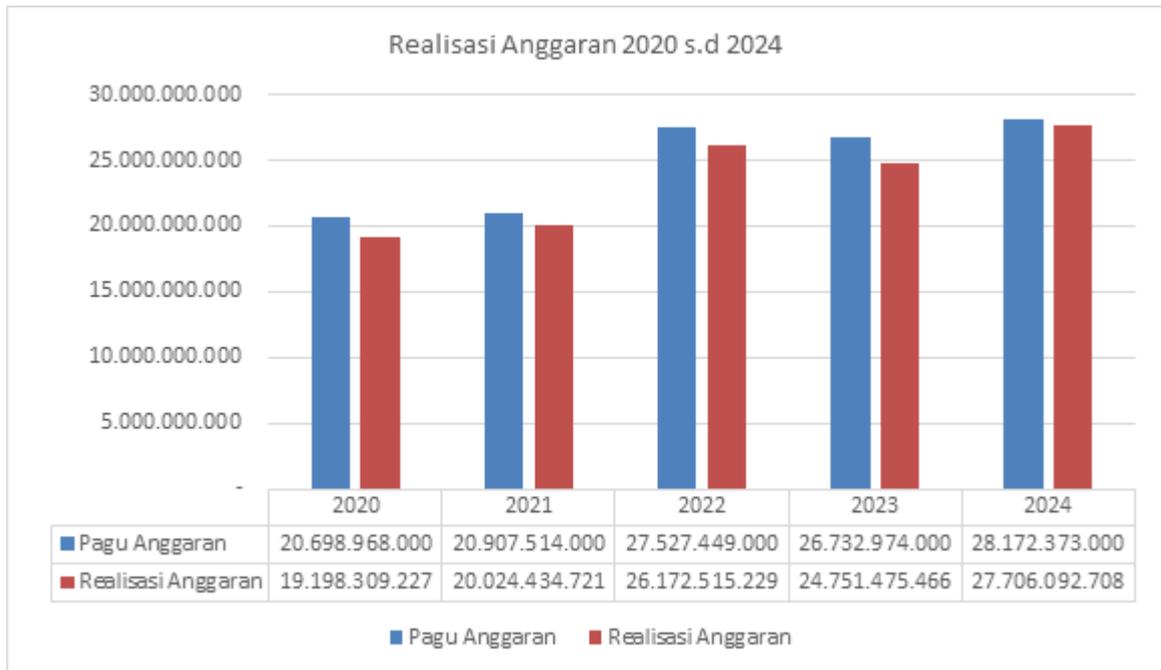
14. DIPA Revisi XI

DIPA BKK Bandung Revisi XI (Pemukhiran KPA) terbit pada tanggal 30 Desember 2024 dikarenakan adanya Pemukhiran Revisi POK karena pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker.

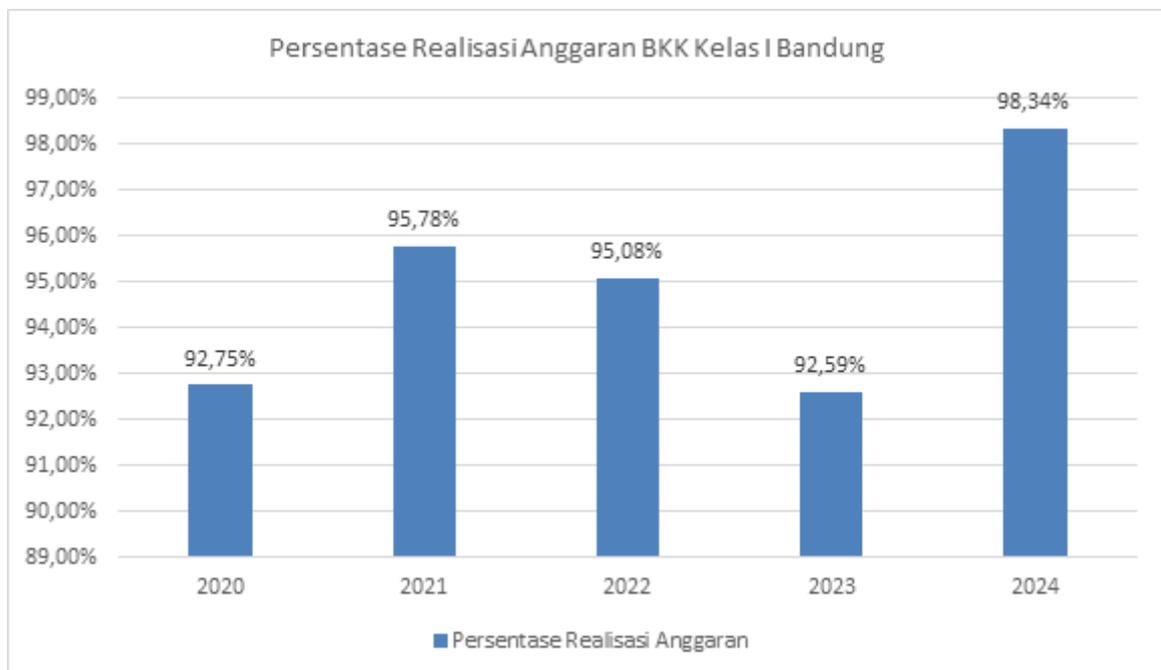
Sumber dana Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total persentase realisasi penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar 98,34% atau senilai Rp 27.706.092.708,-. Realisasi penggunaan

anggaran yang bersumber dana dari rupiah murni sebesar Rp Rp 23.948.737.467,- (98.56%) dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3.757.355.241,- (97%). Realisasi anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dari tahun 2020 s.d 2024 terlihat dari grafik berikut:

Grafik 4 Grafik Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung dari Tahun 2020 s.d 2024



Grafik 5 Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung Tahun 2020 s.d 2024



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada Balai Kekarantinaan Kelas I Bandung setiap tahunnya berada pada persentase diatas 90% meskipun terdapat penurunan pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan penurunan target penerimaan PNBPN sehingga banyak belanja yang bersumber dari dana PNBPN tidak dapat direalisasikan. Pada tahun 2024 realisasi anggaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena telah dilakukannya percepatan belanja khususnya belanja modal, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan dan mengutamakan pengajuan belanja yang bersumber dana dari rupiah murni disaat belanja yang bersumber dari dana PNBPN terhambat.

Tabel 6 Tabel 6 DIPA BKK Kelas I Bandung berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024

Uraian	2024		Capaian
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	12.213.181.000	12.029.470.077	98,50
Belanja Barang	13.387.192.000	13.215.042.631	98,71
Belanja Modal	2.572.000.000	2.461.580.000	95,71
TOTAL	28.172.373.000	27.706.092.708	98,34

BAB 2

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

2.1 DASAR HUKUM

Adapun Peraturan yang menjadi acuan dalam pembuatan Laporan Tahunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency virus, acquired immunodeficiency syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/2016/2024 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;
25. *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005;
26. Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2020-2024.

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

2.2.3 TUJUAN

Tujuan Umum

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2023-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2023-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka BKK telah menetapkan tujuan strategis BKK yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024**

2.2.2 SASARAN

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/ kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2020 - 2024 yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

2.2.3 INDIKATOR

Indikator kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN	0,96
			Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%
			Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/ bandara/ PLBN	0,97
		Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	82
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
			Kinerja implementasi WBK satker	82
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
			Persentase realisasi anggaran	96%

Tabel 8 Matriks RAK Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun	Kegiatan	Anggaran				
						2020	2021	2023	2023	2024
1.	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	a. Penambahan SDM kekarantinaan	3 wilker dan 3 pos pelabuhan/bandara (Wilker Cirebon, Palabuhanratu dan Indramayu, pos pelabuhan patimban, BIJB kertajati dan Bandara Husein Sastranegara Bandung)	2020 s.d 2024	a. Rekrutmen CPNS dan tenaga relawan untuk melaksanakan pengawasan di pelabuhan/ bandara	3.279.859	2.954.873	2.954.873	4.193.058	5.321.006
		b. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko.			b. Pemeriksaan orang (pelaku perjalanan, kunjungan poliklinik bukan penumpang, skrining TB/ HIV, pemeriksaan penjamah makanan), pemeriksaan alat angkut (kapal dan pesawat), pemeriksaan barang (jenazah), dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, Air, dan Vektor)					
		c. Pelaksanaan sosialisasi melalui berbagai media			c. Ketersediaan mobil <i>boarding clearance</i> , mobil evakuasi, alat pelindung diri (APD), <i>thermal scanner</i> , dokumen rencana kontingensi, dan alat pengolah data					
		d. Peningkatan sarana prasarana cegah tangkal penyakit.			d. Terjalannya jejaring kerja dan koordinasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara dalam rangka pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan					

		e. Penguatan jejaring kerja lintas program dan sektoral.			e. Terjalannya jejaring kerja dan koordinasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara dalam rangka pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan					
2.	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	a. Review penyusunan rencana kerja faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	3 wilker dan 3 pos pelabuhan/ bandara (Wilker Cirebon, Palabuhanratu dan Indramayu, pos pelabuhan patimban, BIJB kertajati dan Bandara Husein Sastranegara Bandung)	2020 s.d 2024	a. Pelaksanaan pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	426.507	1.664.899	837.564	1.152.126	3.986.689
		b. Penguatan jejaring kerja lintas sektoral dan lintas program			b. Koordinasi lintas sektor dan lintas program					
		c. Pengadaan alat dan bahan yang memadai untuk menunjang pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan			c. Pengadaan alat dan bahan yang memadai untuk menunjang pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan					
		d. Pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB			d. Penyuluhan kesehatan/ skrining penyakit menular					
		e. Peningkatan dokumentasi pencatatan dan pelaporan pengendalian faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan			e. Peningkatan dokumentasi pencatatan dan pelaporan pengendalian faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan					

		f. Peningkatan pengetahuan kapasitas SDM terkait faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan			f. Pelatihan SDM terkait faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan					
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	a. Peningkatan respon sinyal SKD KLB dan bencana	3 wilker dan 3 pos pelabuhan/bandara (Wilker Cirebon, Palabuhanratu dan Indramayu, pos pelabuhan patimban, BIJB kertajati dan Bandara Husein Sastranegara Bandung)	2020 s.d 2024	a. Koordinasi mengenai sinyal SKD KLB dan bencana	235.128	78.170	262.690	113.934	25.920
		b. Pembinaan pelabuhan dan bandara sehat			b. Kegiatan survei dan pengendalian tikus dan pinjal, survei larva Anopheles, survei dan pengendalian populasi kecoa dan lalat, survei dan pengendalian Aedes di wilayah perimeter dan buffer, pengawasan Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Sarana Air Bersih (SAB), pemeriksaan bakteriologis makanan, usap alat dan usap tangan penjamah TPM, pemeriksaan kimia lengkap dan bakteriologis kualitas air bersi di wilayah Pelabuhan/ bandara					
		c. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan sektoral dalam rangka program penyehatan lingkungan dan pengendalian vektor			c. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan sektoral dalam rangka program penyehatan lingkungan dan pengendalian vektor di Pelabuhan/bandara					
		e. Optimalisasi kegiatan deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara			d. Optimalisasi kegiatan deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara					

		e. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor di wilayah pelabuhan dan bandara			e. Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor di wilayah Pelabuhan dan bandara berupa pemberian surat rekomendasi, spraying, fogging, larvasidasi, disinfeksi, deratisasi/ fumigasi dan kegiatan pengendalian lainnya.					
		f. Optimalisasi sumber daya dalam kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan			f. Peningkatan kapasitas SDM di bidang Kesehatan lingkungan dan vektor					
4	Nilai kinerja anggaran	Melakukan koordinasi antar Substansi agar Realisasi Kinerja Anggaran Sesuai dengan rencana Pelaksanaan Kegiatan dan rencana penarikan dana yang disusun awal tahun. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Peningkatan capaian output dan efisiensi anggaran. Penyusunan rencana program dan anggaran. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi monev SMART DJA dan monev bappenas.	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2020 s.d 2024	Koordinasi dan Pelaksanaan Program Secara Terpadu	15.356.858	811.720	285.997	567.019	285.800
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	a. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran meliputi : percepatan penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, SPM yang akurat dan sebagainya.	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2020 s.d 2024	Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Pelaksanaan Anggaran	211.510	15.713.743	20.457.769	19.772.542	18.666.357

		b. Peningkatan manajemen kas meliputi : pengelolaan UP/ TUP yang benar, revisi DIPA, perencanaan kas, deviasi halaman III DIPA yang rendah dan meminimalisir retur SP2D.									
		c. Peningkatan kualitas laporan keuangan meliputi laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyelesaian pagu minus.									
6.	Kinerja implementasi WBK satker	a. Peningkatan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui manajemen perubahan.	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2020 s.d 2024	Peningkatan Pola Pikir dan Budaya Kerja serta Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi penyusunan standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan	574.502	67.500	326.678	65.843	257.092	
	b. Penataan tata laksana melalui penyusunan dan penerapan SOP, <i>e-government</i> dan keterbukaan informasi publik.										
	c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pola rotasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan perilaku pegawai serta penerapan sistem informasi kepegawaian.										
	d. Penguatan akuntabilitas kinerja meliputi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan										

		dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja serta pengelolaan akuntabilitas kinerja.								
		e. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle blowing system dan penanganan benturan kepentingan.								
		f. Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi penyusunan standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan								
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	a. Penyertaan pegawai untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop dan sebagainya.	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2020 s.d 2024	Melakukan Identifikasi secara berkala Pegawai untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop dan sebagainya agar tercapai Peningkatan Kapasitas SDM sebanyak 20 JPL pada 80% Pegawai	773.482	347.157	168.283	186.386	698.311
		b. Penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan.								
		c. Pelayanan kepegawaian meliputi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, ijin, cuti, mutasi, kenaikan gaji berkala, pensiun dan sebagainya.								
8	Persentase realisasi anggaran	a. Mengupayakan target RPD Bulanan tercapai b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pencapaian target penyerapan	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2023 s.d 2024	Pelaksanaan Realisasi Anggaran sesuai RPK dan RPD				19.920.492	203.927

		<p>c. Koordinasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh substansi</p> <p>d. Mendorong penyerapan belanja sesuai target perbulannya</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB 3

STRATEGI PELAKSANAAN

3.1 STRATEGI PELAKSANAAN

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan, maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni menguatkan deteksi, pencegahan dan respon penjabaran penyakit - faktor risiko untuk mendukung sistem kesehatan yang tangguh, dengan penekanan pada perluasan dan penambahan jenis vaksinasi, penemuan dan tata laksana Kasus penyakit menular di masyarakat dan pelayanan kesehatan (primer dan rujukan), meningkatkan skrining dan tata laksana penyakit tidak menular di pelayanan primer, surveilans berbasis laboratorium dan peningkatan kualitas lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BKK Kelas I Bandung telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi.

Arah kebijakan BKK tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut.
3. Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor.
4. Penggunaan teknologi informasi.

Strategi tersebut di atas adalah strategi secara umum, sedangkan strategi pencapaian per indikator adalah sebagai berikut :

1. Indikator Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBD. Strategi kegiatan yang dilakukan yaitu:
 - a. Penambahan SDM kekarantina melalui rekrutmen CPNS dan tenaga relawan untuk melaksanakan pengawasan di pelabuhan/ bandara selama masa pandemi Covid-19
 - b. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko.
 - c. Pelaksanaan sosialisasi melalui berbagai media cetak seperti pamflet dan banner tentang proses validasi atau pemeriksaan bagi pelaku perjalanan serta melalui media sosial tentang peraturan terbaru bagi pelaku perjalanan
 - d. Peningkatan sarana prasarana cegah tangkal penyakit.
 - e. Penguatan jejaring kerja lintas program dan sektoral.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Strategi kegiatan yang dilakukan :

- a. Review penyusunan rencana kerja faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
 - b. Penguatan jejaring kerja lintas sektoral dan lintas program
 - c. Pengadaan alat dan bahan yang memadai untuk menunjang pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
 - d. Pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB
 - e. Peningkatan dokumentasi pencatatan dan pelaporan pengendalian faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
 - f. Peningkatan pengetahuan kapasitas SDM terkait faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara. Strategi kegiatan yang dilakukan:
- a. Peningkatan respon sinyal SKD KLB dan bencana
 - b. Pembinaan pelabuhan dan bandara sehat
 - c. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan sektoral dalam rangka program penyehatan lingkungan dan pengendalian vektor
 - d. Optimalisasi kegiatan deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara dengan melakukan kegiatan survei faktor risiko meliputi survei jentik *Aedes sp*, survei jentik *Anopheles sp.*, survei kepadatan vektor diare (lalat dan kecoa), survei tikus dan pinjal, inspeksi hygiene sanitasi tempat-tempat umum (TTU), inspeksi hygiene sanitasi tempat pengelolaan pangan (TPP), inspeksi hygiene dan sanitasi sarana air bersih (SAB) serta pemeriksaan fisik, kimia dan bakteriologis parameter lingkungan.
 - e. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor di wilayah pelabuhan dan bandara melalui kegiatan pemberian surat rekomendasi, larvasidasi, fogging, spraying, pemasangan perangkap tikus serta perbaikan sanitasi lingkungan.
 - f. Optimalisasi sumber daya dalam kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor di wilayah pelabuhan dan bandara
4. Nilai kinerja anggaran. Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Peningkatan serapan anggaran
 - b. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran
 - c. Peningkatan capaian output dan efisiensi anggaran
 - d. Penyusunan rencana program dan anggaran
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi monev SMART
 - g. DJA dan monev bappenas.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran meliputi : percepatan penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, SPM yang akurat dan sebagainya.

- b. Peningkatan manajemen kas meliputi : pengelolaan UP/ TUP yang benar, revisi DIPA, perencanaan kas, deviasi halaman III DIPA yang rendah dan meminimalisir retur SP2D.
 - c. Peningkatan kualitas laporan keuangan meliputi laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyelesaian pagu minus.
6. Kinerja implementasi WBK satker. Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Peningkatan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui manajemen perubahan.
 - b. Penataan tata laksana melalui penyusunan dan penerapan SOP, e- government dan keterbukaan informasi publik.
 - c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pola rotasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan perilaku pegawai serta penerapan sistem informasi kepegawaian.
 - d. Penguatan akuntabilitas kinerja meliputi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja serta pengelolaan akuntabilitas kinerja.
 - e. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle blowing system dan penanganan benturan kepentingan.
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan public meliputi penyusunan standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya. Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Penyertaan pegawai untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop dan sebagainya.
 - b. penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan. Pelayanan kepegawaian meliputi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, ijin, cuti, mutasi, kenaikan gaji berkala, pensiun dan sebagainya.
8. Presentase Realisasi anggaran
- a. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran meliputi : percepatan penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, SPM yang akurat dan sebagainya.
 - b. Peningkatan manajemen kas meliputi : pengelolaan UP/ TUP yang benar, revisi DIPA, perencanaan kas, deviasi halaman III DIPA yang rendah dan meminimalisir retur SP2D.
 - c. Peningkatan kualitas laporan keuangan meliputi laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyelesaian pagu minus

3.2 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN

1. Pada Tahun 2024 sesuai dengan Kepdirjen P2P Nomor: HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan, terjadi perubahan struktur organisasi Balai Kekeparantinaan Kesehatan dari 3 (tiga) substansi menjadi

- 5 (lima) tim kerja. Hal ini menyebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada juga harus terbagi sehingga berdampak jumlah SDM yang terdapat di tim menjadi lebih sedikit, termasuk di Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas I Bandung. Dengan perampingan ini menjadi tantangan sendiri untuk efektivitas dan efisiensi tenaga dalam rangka mencapai target kegiatan yang sudah direncanakan
2. Struktur Organisasi yang baru menjadi tantangan sendiri bagi Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas I Bandung, khususnya kegiatan terkait Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yang meskipun bukan kegiatan yang baru, namun terdapat beberapa pembaruan peraturan dan teknis terkait kegiatan ini
 3. Kegiatan pengumpulan data surveilans (alat angkut, orang, barang, kesehatan lingkungan, dan vektor) masih belum keseluruhan lengkap dan tepat waktu dilaporkan ke induk sehingga data tidak dapat dianalisis dan disajikan dengan tepat
 4. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan di BKK Kelas I Bandung pada Tahun 2024 belum bisa dilaksanakan secara optimal dikarenakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum dilantik secara resmi sehingga belum ada legalitas yang kuat untuk selalu turun ke lapangan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ini
 5. Upaya tindakan penyehatan kapal masih belum berjalan sesuai prosedur sebagaimana mestinya
 6. Permasalahan bahasa yang terdapat pada pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam *self-assessment*, aplikasi TANGKAP
 7. Belum tersedianya anggaran tersendiri untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tim kerja 2 :Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
 8. Masih belum tersosialisasikan pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang

3.3 TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan kebijaksanaan dan program sebagai berikut yaitu:

1. Pada pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, di induk masih melibatkan tenaga epidemiolog yang ada meskipun bukan lagi dalam satu substansi (berbeda tim kerja). Sedangkan di wilker saling melakukan *backup* satu sama lain meskipun berbeda tim kerja;
2. BKK Kelas I Bandung melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah dengan menugaskan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada untuk membangun jejaring dalam rangka kegiatan terkait penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan kedepannya ;
3. Memberikan himbauan melalui chat *whatsapp* grup Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yang berisi daftar data yang harus dikumpulkan,

deadline serta penanggung jawab pengumpulan data. Selain itu juga difasilitasi dengan pembuatan keseragaman format dari induk untuk memudahkan penginputan data oleh petugas wilker;

4. Sementara PPNS berproses untuk pelantikan, pada tanggal 4 Oktober 2024 telah mulai dilakukan kegiatan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan berupa sanksi ringan teguran tertulis kesatu. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Perdirjen P2P No. SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional Pasal 6, serta Nota Kesepahaman antara BKK Kelas I Bandung dengan Klinik No. HK.03.01/C.X.5/3106/2023 Tanggal 17 November 2023. Atas dasar kedua peraturan tersebut, menjadi dasar yang cukup kuat untuk pemberian sanksi.
5. Dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang ditemukan di lapangan maka perlu adanya strategi/ terobosan dalam pencapaian pemenuhan persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut dan barang diantaranya :
 - a. Dalam rangka penguatan jejaring kerja lintas sektor dan lintas program terutama dalam peningkatan program pengawasan faktor risiko pada alat angkut dan barang, telah dilakukan beberapa terobosan di tahun 2024 , diantaranya:
 - 1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlunya mengisi SSHP (Satu Sehat Health Pass) untuk pelaku perjalanan yang berasal dari daerah terjangkit. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI tertanggal 20 Agustus 2024 nomor HK.02.02/C/2160/ 2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Mpox di pintu masuk, Pelabuhan dan Bandar Udara yang melayani Lalu Lintas Domestik dan di Wilayah.



Gambar 3.1 Sosialisasi penggunaan SSHP di Bandara Kertajati, september 2024

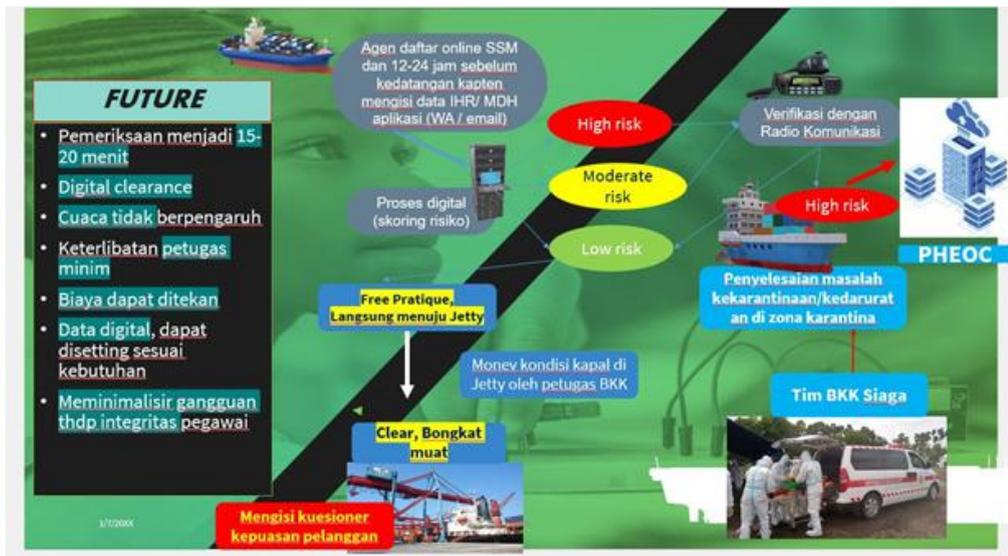
Dalam menjalin jejaring kerja dengan lintas sektor dan lintas program, khususnya dalam menyikapi surat edaran terkait kewaspadaan Mpox di pintu masuk, BKK Kelas I Bandung dari tim kerja 1 dan 2 segera melakukan respon dengan menindaklanjuti surat edaran tersebut kepada *stakeholder* yang ada di wilayah kerja BKK Bandung, memasang CCTV di area kedatangan pelaku perjalanan internasional serta melakukan kegiatan diseminasi informasi kewaspadaan terhadap Mpox di BIJB Kertajati Majalengka yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024.

b. Melakukan sosialisasi digitalisasi pemeriksaan kekarantinaan kapal (TANGKAP).

Menindaklanjuti adanya Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK. 02.02/C/2160/2024 tentang Melakukan rapat Koordinasi Lintas Sektor Pada Agent ISAA Dan INSA untuk melakukan Monitoring Evaluasi Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Pos Patimban- Subang pada tanggal 14 Agustus 2024. Penyampaian digitalisasi pengawasan kedatangan kapal, dihadiri oleh agent pelayaran ISAA, INSA digitalisasi sebagai inovasi pemeriksaan kedatangan kapal yang lebih efisien dan efektif. Teknis dari digitalisasi pemeriksaan kapal ini yaitu: sebelum dilakukan pemeriksaan kapal, tim dari BKK Kelas I Bandung mengirimkan instrumen *self-assessment* yang berisi daftar pertanyaan tentang kondisi kapal terutama terkait faktor risiko kesehatan di dalamnya ke email nakhoda.

Berdasarkan isian yang dilakukan oleh nakhoda, akan keluar hasil berupa warna merah/ kuning/ hijau. Perbedaan warna-warna tersebut menunjukkan tingkat risiko kesehatan pada kapal. Warna merah menunjukkan tingkat risiko kesehatan tinggi, kuning menunjukkan tingkat risiko kesehatan sedang, hijau menunjukkan tingkat risiko kesehatan rendah. Jika hasil menunjukkan warna merah, kapal posisi tetap berada di zona karantina, dan dilakukan komunikasi dari petugas BKK dengan nakhoda menggunakan *radio pratique* untuk menggali lebih dalam mengenai kondisi di dalam kapal. Hal ini untuk menjadikan dasar pemakaian APD level berapa yang akan digunakan oleh petugas BKK Kelas I Bandung ketika melakukan pemeriksaan sehingga meminimalisir faktor risiko infeksi terhadap petugas. Jika hasil menunjukkan warna kuning atau hijau, maka bisa langsung diterbitkan *Certificate of Pratique* (CoP) dan kapal diperbolehkan untuk sandar kemudian pemeriksaan dilakukan di *jetty* dan diserahkan CoP.

Permasalahan yang akan dihadapi adalah bahasa yang terdapat pada pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam *self-assessment*, saran dari petugas Pos Pelabuhan Patimban sebaiknya tidak hanya dalam Bahasa Indonesia saja, namun juga Bahasa Inggris sebagai bahasa universal yang digunakan ketika pemeriksaan kapal terutama kapal yang berasal dari luar negeri.



Gambar 3.2 Sosialisasi Penggunaan Aplikasi TANGKAP Wilker Patimban

6. Pada tahun 2024, staf tim kerja 2 BKK Bandung yang merupakan pecahan dari tim kerja 1 dan tim kerja 4. Dalam melakukan rencana kerja faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, tim kerja 2 masih bergabung dan bekerja sama dengan tim kerja 1 dan tim kerja 4, baik secara SDM maupun anggaran.
7. Dalam menunjang pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan, maka diperlukan sarana penunjang kegiatan. Pengadaan alat dan bahan yang memadai untuk menunjang pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2024 hampir 100% telah terealisasi. Termasuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai.
8. Pada tanggal 4 Desember 2024 Tim Kerja 2 dan tim kerja lainnya melakukan kunjungan ke wilayah kerja Palabuhanratu, dimana saat itu wilayah kerja Palabuhanratu sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi tentang kewaspadaan dini terhadap bahaya ancaman Leptospirosis. Dilaporkan temuan adanya kasus leptospirosis di wilayah kerja Palabuhanratu Sukabumii, sehingga tim surveilans dan tim pengawasan faktor risiko kesehatan pada orang melakukan skrining, edukasi dan advokasi kepada masyarakat dan juga berkoordinasi

dengan lintas sektor dan lintas program yang ada di wilker Palabuhanratu. Pada kesempatan tersebut, Tim Kerja 2 menyampaikan paparan tentang pengawasan alat angkut kapal di pelabuhan dimana dalam paparan tersebut diuraikan pula tentang upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Leptospirosis jika menimpa para ABK Kapal. dengan demikian diharapkan kasus ABK kapal yang meninggal akibat Leptospirosis tidak terulang kembali.



Gambar 3.3 Materi Diseminasi Informasi Pada Kegiatan Pengawasan Penyakit

9. Tim kerja 2 telah mengirim 2 (dua) orang staf dari wilker untuk mengikuti pelatihan fumigasi kapal selama 4 hari, tepatnya pada tanggal 22 - 25 Oktober 2024.. Hal ini merupakan salah satu terobosan di dalam mengatasi permasalahan tindakan penyehatan kapal sesuai prosedur yang berlaku dan untuk mencapai strategi peningkatan pengetahuan kapasitas SDM terkait faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Pelatihan Fumigasi ini diselenggarakan atas kerja sama antara Perhimpunan Karantina Kesehatan Indonesia dengan Cimurni Prima Jaya dan bertempat di gedung BPPTK (Milik Kementerian Kominfo) Kec. Cikarang, Kab. Bekasi. Adapun tujuan pelatihan ini diharapkan peserta mampu melakukan pengawasan fumigasi pada alat angkut dengan benar dan aman.

BAB 4 HASIL KERJA

4.1 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Selama Tahun Anggaran 2024 BKK Kelas I Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mendukung program kerja, visi serta misinya. Sampai dengan akhir Desember 2024 pencapaian kegiatan yang menjadi tupoksi dari BKK Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Pencapaian Kegiatan BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian %
Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ bandara/ PLBN	4,091,634,000	4,061,995,063	99,28
	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	3,400,181,000	3,283,903,012	96,58
	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/ bandara/ PLBN	27,900,000	22,409,400	80,32
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	301,254,000	262,249,672	87,05
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	67,894,000	63,767,799	93,92
	Kinerja implementasi WBK satker	66,316,000	63,761,119	96,15
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	142,827,000	118,134,141	82,71
	Persentase realisasi anggaran	20,074,367,000	19,830,819,412	98,79
JUMLAH		28,172,373,000	27,707,039,618	98,34

1. Input yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan :
 - a. Jumlah Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BKK Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 83 orang PNS dan 12 orang PPPK sehingga total pegawai ASN di BKK Kelas I Bandung sebanyak 83 orang yang terdiri dari 2 Pejabat Struktural, 68 orang Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak dan 13 orang Jabatan Pelaksana.
 - b. Anggaran BKK Kelas I Bandung tahun 2024 yaitu sebesar Rp 28.172.373.000,- yang terdiri dari:

Tabel 10 Pagu Anggaran BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

No	Kode Output	Nama Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	4249	Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	7.597.886.000	7.440.863.156	97.93
2	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	20.574.487.000	20.265.229.552	98.50
TOTAL			28.172.373.000	27.706.092.708	98.34

2. Output berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan/ program.

Tabel 11 Capaian Output BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

No.	Kode Output	Rincian Output	Realisasi Fisik Output	Keterangan
4249 Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk				
Koordinasi				
1.	4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4 Kegiatan	1. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fungsi KKP ke Pusat 2. Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fungsi Pelayanan Kesehatan 3. Koordinasi Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk/Wilayah 4. Koordinasi Jejaring dengan LP/LS Terkait Program Surveilans Epidemiologi
Sosialisasi dan Diseminasi				
2.	4249.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi	108 Orang	5. Diseminasi Informasi surveilans epidemiologi (108 orang)

Pelayanan Publik kepada Masyarakat				
3.	4249.QAA.011	Pelayanan kesehatan haji	40.480 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Dropping Obat Dari Binfar dan Operasional Klinik Embarkasi/Debarkasi Haji 2. Operasional Kekeparantinaan Kesehatan Embarkasi 3. Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan di Asrama Haji 4. Pemeriksaan Kesehatan Laik Terbang di luar masa Embarkasi dan Evaluasi pasca Debarkasi 5. <i>Operasional Kekeparantinaan Kesehatan Debarkasi</i>
4.	4249.QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/ lintas batas	1.700 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pelayanan Kesehatan Situasi Saat Bencana/Hari Besar Nasional/Hari Nasional 2. Pelayanan Kesehatan Klinik, skrining p menular, dan penjamah makanan di Pintu negara
Pelayanan Publik Lainnya				
5.	4249.QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	10 Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Sanitasi Asrama Haji 2. Uji Petik Keamanan Pangan 3. Uji Petik Air Kebutuhan Sanitasi di Pelabuhan dan Bandara. 4. Pengawasan Udara dan Koordinasi Pelabuhan Bandara Sehat 5. Pengawasan Limbah Cair di Pelabuhan dan Bandara 6. Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan di Pelabuhan dan Bandara 7. Pengawasan dan Tindakan Penyehatan SAB di Pelabuhan dan Bandara 8. Inspeksi Sanitasi HSBU di Pelabuhan dan Bandara 9. Pengelolaan Limbah Medis 10. Survey Leptospirosis dan Pengendalian Vektor Pada Kondisi Matra
6.	4249.QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	6 Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Rumor/Investigasi dan Penanggulangan Penyakit Potensial KLB di Pintu Masuk/Wilayah 2. Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah di Pintu Masuk/Wilayah 3. Surveilans Epidemiologi dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk/Wilayah 4. Pengumpulan Data Surveilans Epidemiologi Penyakit di Pintu Masuk 5. Skrining dan evaluasi deteksi dini Penyakit VCT HIV/ AIDS 6. Skrining Deteksi Dini Penyakit TBC
7.	4249.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	8 Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Faktor Pengendalian Penyakit pada situasi Khusus

8.	4249.QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	36 Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Perangkap Tikus 2. Persiapan Bahan dan Alat 3. Pemasangan Perangkap 4. Identifikasi Tikus dan Pinjal
9.	4249.QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	96 Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Vektor DBD
10.	4249.QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	60 Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Vektor Diare
11.	4249.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	12 Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Faktor Resiko Penyakit HIV/AIDS
12.	4249.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	9 Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Faktor Resiko Penyakit TB
Sarana Bidang Kesehatan				
13.	4249.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	13 Paket	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Media KIE Kesehatan Haji dan kegiatan hari besar nasional 2. Pengadaan Media KIE Situasi Khusus hari raya besar nasional dan Posko Mudik Lebaran serta Tahun Baru 3. Pelayanan Klinik di Pintu Masuk Negara 4. Pengadaan APD, Alat dan Bahan Penunjang Kekarantinaan (APD Kegiatan Surveilans Epidemiologi pada Situasi Bencana) 5. Pengadaan APD, Alat dan Bahan Penunjang Kekarantinaan (APD Kesehatan Haji di Bandara) 6. Pengadaan Alat Pelindung Diri Dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC 7. Boarding Kit Dalam Rangka Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Kesehatan 8. Alat dan Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal dan Surveilans Epidemiologi Secara Online 9. Media KIE untuk Diseminasi Informasi 10. Pengadaan Formulir Penerbitan Dokumen Kesehatan dan Surveilans Epidemiolog 11. Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor 12. Alat Pelindung Diri Pengendalian Vektor 13. Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
Layanan Manajemen SDM				
14.	4249.TBC.001	Pelatihan kesehatan	16 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) orang Uji Kompetensi Epidemiologi Kesehatan Jenjang Ahli 2. 5 (lima) orang Kejiata Pelatihan Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) 3. 17 (tujuh belas) orang Kegiatan pertemuan ilmiah epidemiologi nasional (PIEN) 4. 1 (satu) orang kegiatan uji kompetensi JF kesehatan periode II Tahun 2024 5. 3 (tiga) orang kegiatan Navigating The Skies: Advancing Health & Safety In Aviation 6. 1 (satu) orang Kegiatan online course tikus-pengenalan dan pengendaliannya 7. 2 (dua) orang pelatihan pengawasan fumigasi alat angkut di BBTIK Kominfo

				8. 4 (empat) orang kegiatan workshop penggunaan alat PCR Leptospirosis ke BBLKM
4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
Koordinasi				
15.	4815.AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	2 Kegiatan	1. Laporan koordinasi program P2P
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
16.	4815.EBA.956	Layanan BMN	4 Layanan	1. Laporan BMN 2. Laporan Penghapusan dan Pemusnahan BMN 3. Laporan Koordinasi Penyelesaian Masalah BMN 4. Laporan Penyusunan RKBMN
17.	4815.EBA.957	Layanan Hukum	3 Layanan	1. Laporan Dumas dan WBS 2. Laporan UPG 3. Laporan Konsultasi Advokasi dan Bantuan Hukum
18.	4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	2 Layanan	1. Artikel/Bulletin Web BKK Bandung 2. Laporan Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
19.	4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5 Layanan	1. Laporan Penyusunan ABK 2. Laporan Kegiatan Penyusunan Peta dan Informasi Jabatan 3. Pencetakan SOP 4. Laporan Penilaian WBK oleh Hukormas 5. Laporan Kegiatan Reviu Data Klasifikasi KKP
20.	4815.EBA.962	Layanan Umum	6 Layanan	1. Pengelolaan Kantor BERHIAS 2. Laporan Koordinasi RUP dan E-Katalog 3. Langganan Aplikasi BKK Bandung 4. Laporan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 5. Sewa Rumah Dinas Kepala Balai dan Sewa Kendaraan Operasional Kantor 6. Langganan Internet Kantor Induk dan Wilker
21.	4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1. Laporan Profil BKK Bandung
22.	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	13 Bulan	1. Pemberian Gaji dan Tukin PNS dan PPPK selama 12 Bulan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Layanan Manajemen SDM Internal				
23.	4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4 Orang	- 1 Orang Kegiatan Layanan Mutasi Kepegawaian - 1 Orang Konsultasi Penataan dan Penyusunan Kebutuhan Pegawai - 1 Orang Kegiatan Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Umum - 1 Orang Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Seleksi Administrasi Penerimaan PPPK Kemenkes Tahun 2024
24.	4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	- 1 Orang Kegiatan Uji Kompetensi Arsiparis Tingkat Ahli

				<ul style="list-style-type: none"> - 9 Orang Pelatihan Strategi Meningkatkan Kualitas SAKIP/LAKIP - 1 Orang Kegiatan Pelatihan Mandiri Perencana Ahli Pertama Jalur Pengangkatan Pertama - 1 Orang Kegiatan In House Training Pembekalan Terhadap Calon PPNS - 1 Orang Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional Pranata Komputer - 2 Orang Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) - 14 Orang Kegiatan Workshop Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja
Layanan Manajemen Kinerja Internal				
25.	4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penyusunan Dokumen E-Renggar 2. Dokumen Hasil Desk Pagu Indikatif 3. Dokumen hasil desk Pagu Alokasi
26.	4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kegiatan Penyusunan LAKIP 2. Dokumen Kegiatan Penyusunan SAKIP 3. Dokumen Kegiatan Penyusunan LAPTAH 4. Dokumen Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan P2P 5. Dokumen Monev Program P2P
27.	4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Keuangan Audited 2. Dokumen Laporan Keuangan Semester 1
28.	4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Pengelolaan Kearsipan

Pencapaian output diatas tidak lepas dari proses kegiatan yang dapat dilaporkan sebagai berikut :

A. 4249 Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk

1) 4249.PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (4 Kegiatan)

a) Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fungsi KKP ke Pusat

- Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Surveilans Epidemiologi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk *updating* kebijakan baru, isu-isu penyakit terbaru, program atau aplikasi yang dikembangkan oleh pusat terkait surveilans epidemiologi dan penindakan pelanggaran kekeantinaan kesehatan. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Bulan Februari berupa konsultasi ke Tim Kerja Hukormas Ditjen P2P terkait tugas fungsi Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan di BKK yang baru dibentuk, Bulan Juli dan

Oktober berupa koordinasi kegiatan surveilans dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan serta desk anggaran.



Gambar 4.1 Desk Anggaran Kegiatan Surveilans dan Penindakan Pelanggaran

- Konsultasi dan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah di Pintu Masuk negara ke Pusat/ Lintas Sektor/ Lintas Program

Kegiatan dilakukan dalam rangka konsultasi ke pusat terkait isu-isu Penyakit pelayanan kegawatdaruratan dan situasi khusus. pada tahun 2024 kegiatan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu bulan februari berupa konsultasi ke SKK terkait vaksinasi internasional, bulan juli dan Oktober Desk anggaran ke Bekasi



Gambar 4.2 Anggaran perencanaan tahun 2025

- b) Konsultasi dan koordinasi Pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan saat lintas sektor meminta bantuan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seperti Hari Nelayan, Kegiatan HKN dan Koordinasi kegiatan persiapan haji. kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu Bulan Februari di

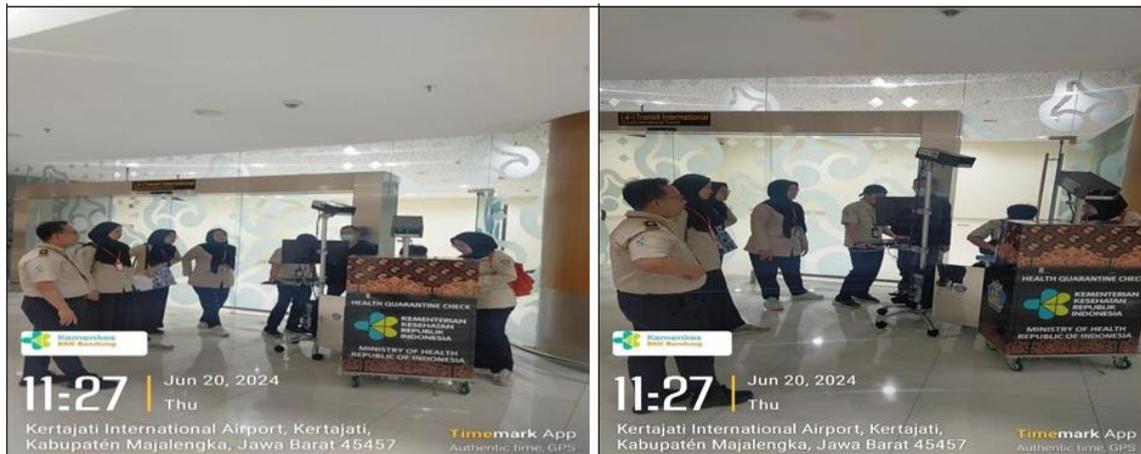
pelabuhan Cirebon, Bulan april Koordinasi ke Asrama haji Bekasi, Bulan September di Pelabuhan Kejawanan



Gambar 4.3 Dokumentasi di Asrama Haji Bekasi

c) Koordinasi Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk/Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghadiri undangan pertemuan terkait surveilans epidemiologi yang biasanya diadakan oleh wilayah baik itu Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maupun koordinasi dengan *stakeholder* wilayah kerja. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu: pada Bulan Maret berupa koordinasi penyelenggaraan surveilans epidemiologi dengan lintas sektor di BIJB Kertajati, Bulan Mei berupa koordinasi dalam rangka surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan dan vektor serta binatang pembawa penyakit di Asrama Haji Indramayu, Bulan Juni berupa koordinasi dalam rangka persiapan operasional debarkasi haji di BIJB Kertajati, Bulan Oktober berupa koordinasi penyelenggaraan surveilans epidemiologi di pintu masuk/ wilayah di Patimban dan Indramayu, Bulan November berupa koordinasi dalam rangka surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan dan vektor serta binatang pembawa penyakit di Asrama Haji Bekasi, dan Bulan Desember berupa koordinasi terkait penemuan kasus positif leptospirosis di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu.



Gambar 4.4 Koordinasi dalam Rangka Persiapan Operasional Debarkasi Haji

d) Koordinasi Jejaring dengan LP/LS Terkait Program Surveilans Epidemiologi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program perihal kegiatan maupun informasi terbaru yang berkaitan dengan program surveilans epidemiologi yang dilakukan oleh BKK Kelas I Bandung. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu: pada Bulan Januari (berupa koordinasi terkait pengawasan kekarantinaan kapal dan pelaku perjalanan 10 besar penyakit di Puskesmas Palabuhan Ratu, program pencegahan dan pengendalian penyakit menular lintas sektor sepanjang tahun 2023), Bulan Februari (berupa koordinasi terkait deteksi dini faktor risiko Penyakit Menular Langsung di Wilker Indramayu, pengawasan kesehatan terhadap orang (ABK), deteksi dini faktor risiko Penyakit Menular Langsung di Puskesmas Balongan), Bulan Maret (berupa Konsultasi sebagai tindak lanjut dari diklat pembentukan PPNS P2P Bidang Kementerian Kesehatan angkatan IV dan sosialisasi digitalisasi pemeriksaan kedatangan kapal), Bulan April (berupa rapat koordinasi JF epidemiolog menjelang kegiatan surveilans epidemiologi status kesehatan dan validasi status vaksinasi pelaku perjalanan internasional), Bulan Mei (berupa menghadiri pertemuan dengan instansi terkait (PPIH) dalam rangka persiapan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga jemaah calon haji di Embarkasi Bekasi) Bulan Juli (berupa koordinasi jejaring LP/LS terkait program surveilans epidemiologi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan deklarasi bebas jentik/pelabuhan sehat di Pelabuhan Kejawanan), Bulan Agustus (berupa koordinasi jejaring LP/LS terkait program surveilans epidemiologi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Wilker Balongan), Bulan September (berupa koordinasi terkait kewaspadaan terhadap Mpox di BIJB Majalengka dengan sasaran 28 orang dari instansi lintas sektor di BIJB), Bulan November (berupa koordinasi terkait penemuan kasus positif leptospirosis di wilayah TPI Palabuhan Ratu dan

kegiatan yang bersamaan dengan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji Indramayu), dan Bulan Desember (berupa koordinasi terkait penemuan kasus positif leptospirosis di wilayah TPI Palabuhan Ratu).



Gambar 4.5 Menghadiri Pertemuan dengan Instansi terkait (PPIH)

2) 4249.PEF.001 Sosialisasi dan Diseminasi (108 Orang)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan diseminasi informasi terbaru tentang penyakit dan kesehatan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi BKK Kelas I Bandung. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu: pada Bulan Februari (berupa diseminasi informasi kekarantinaan sekaligus menghadiri undangan rapat *table top exercise* dari PT AP II), Bulan Juli (berupa Diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dimana kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan deklarasi bebas jentik/ pelabuhan sehat), Bulan Agustus dan September (berupa diseminasi informasi kewaspadaan terhadap Mpox di BIJB Majalengka dengan sasaran 28 orang dari instansi lintas sektor di BIJB), Bulan November (berupa diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2024), dan Bulan Desember (berupa diseminasi kasus positif leptospirosis di TPI Palabuhan Ratu).



**Gambar 4.6 Kegiatan Diseminasi Kasus Leptospirosis di Wilker Palabuhan Ratu
Tanggal 3 - 4 Desember 2024**

3) 4249.QAA.011 Pelayanan kesehatan haji (40000 Orang)

Kegiatan Pelayanan Kesehatan haji , diantaranya :

a) Penerimaan Dropping Obat Dari Binfar dan Operasional Klinik Embarkasi/Debarkasi Haji

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan kegiatan pelayanan kesehatan haji yaitu penerimaan paket jemaah haji, paket Obat haji dan paket petugas yang dikirim dari Binfar Kemenkes. Penerimaan dilakukan di Asrama Haji Bekasi dan Asrama Haji Indramayu, Paket jemaah yang dikirim sebanyak 40.000 Paket jemaah (28.000 untuk JKS dan 12.000 untuk KJT).selain penerimaan paket jemaah dilakukan juga persiapan pelayanan kesehatan haji di klinik dan pemkes ke 3 berupa alat dan bahan kesehatan yaitu penataan klinik seperti bahan dan alat laboratorium, alkes pelayanan kegawatdaruratan, alkes pelayanan obat dan alkes pemeriksaan kesehatan ke 3. Kegiatan ini dilakukan bulan Mei 2024



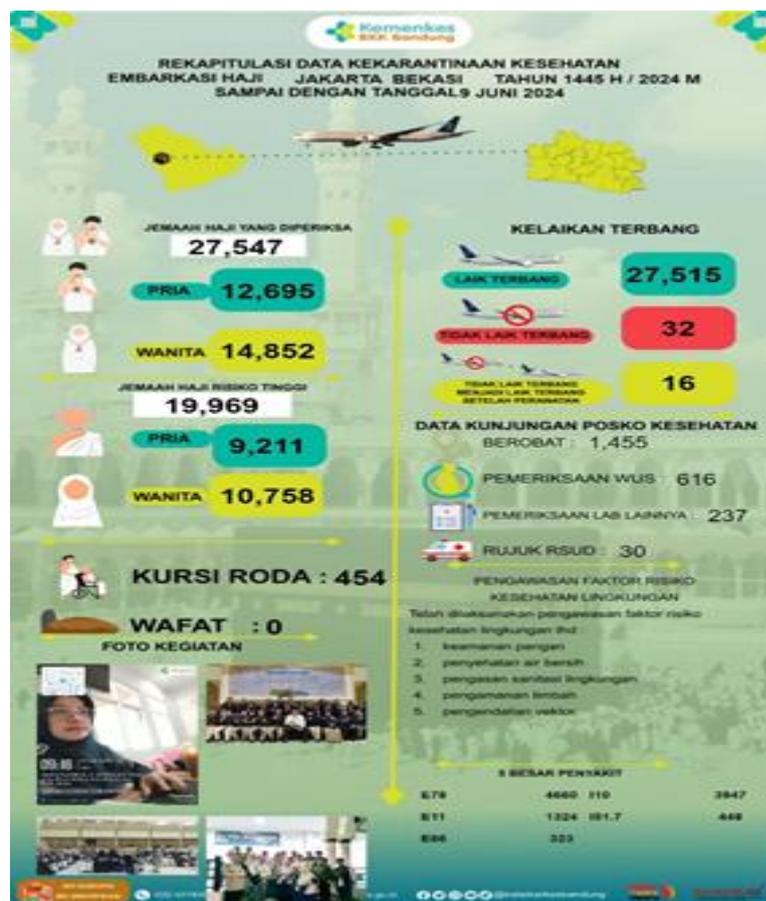
Gambar 4.7 Dropping Obat dari Direktorat Kefarmasian dan Alkes ke Asrama Haji Bekasi

b) Operasional Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi (Operasional Embarkasi Pelayanan Kesehatan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di poliklinik kepada calon jemaah haji yang sakit, maupun sehat dan petugas sekitar lingkungan asrama haji Bekasi dan Indramayu. Pelayanan yang disediakan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan rujukan. Pelayanan kesehatan diberikan dengan optimal karena selain petugas BKK Kelas I Bandung juga dibantu oleh beberapa petugas dari RSUD Bekasi dan puskesmas sekitar Bekasi dan Indramayu selain pelayanan Klinik dilakukan juga pemeriksaan laik terbang di pemeriksaan kesehatan ke 3 dimana ada perawat dan dokter

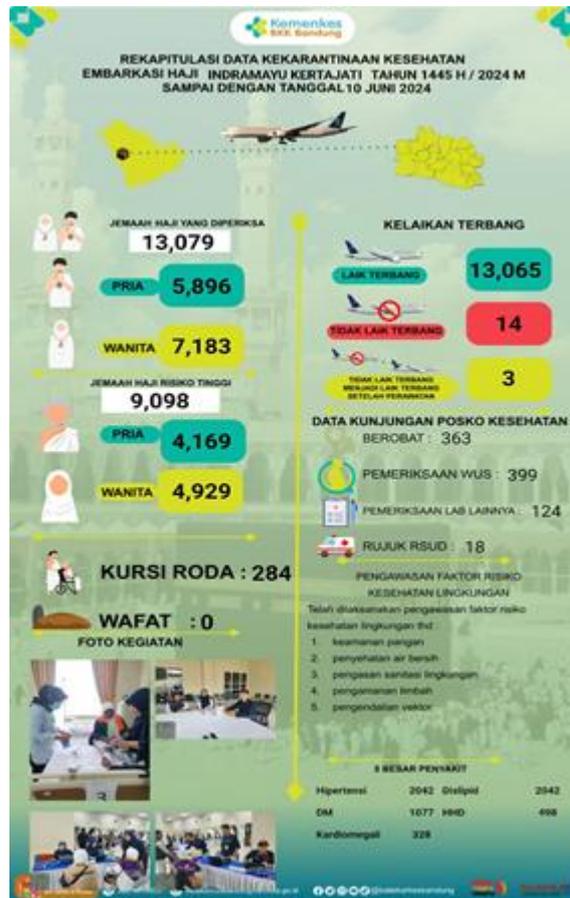
yang ditempatkan pada pemeriksaan tersebut. pada pemeriksaan laik terbang perawat bertugas melakukan pemeriksaan fisik kepada semua jemaah haji yang datang dan bila ditemukan penyakit atau keluhan maka dikonsulkan ke dokter dan dirujuk ke Poliklinik bila tidak bisa ditangani. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei dengan jumlah kunjungan poliklinik 1.699 calon jemaah haji, 376 petugas, dan 60 rujukan ke RS rujukan haji. Pelayanan Poliklinik embarkasi JKS Jamaah 1344 orang, Petugas 86 Orang. Pelayanan Poliklinik KJT dengan Jumlah kunjungan Jamaah 355 orang, Petugas 86 orang

Selain kegiatan di atas untuk menunjang pelayanan kesehatan haji didukung juga dengan pembelian bahan berupa bahan bakar (BBM) dan dan e-toll untuk pendampingan jemaah ke Bandara, untuk biaya e-toll hanya dianggarkan untuk embarkasi JKS karena bandara yang digunakan yaitu Bandara Soekarno-Hatta yang aksesnya melalui Tol sedangkan Embarkasi Indramayu menggunakan Bandara Kertajati yang tidak ada akses Tol. pembelian BBM dan E-toll dilakukan semua kegiatan berlangsung yaitu sekitar bulan Mei-Juni 2024. selain itu dilakukan juga pembelian bahan Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer serta pembelian obat dan Bahan kesehatan diluar droping dari Binfar. Pembelian obat dilakukan karena ada beberapa obat dan alkes yang tidak cukup dan tidak didroping Binfar seperti Cairan infus, pengisian oksigen, vitamin Fe, obat kombinasi demam batuk. pembelian bahan dilakukan selama kegiatan haji berlangsung yaitu bulan mei-Juni 2024



Gambar 4.8 Infografis Rekapitulasi Data Kekarantinaan Kesehatan

Periode Embarkasi JKS Tahun 2024 M/ 1445H



Gambar 4.9 Infografis Rekapitulasi Data Kekarantinaan Kesehatan Periode Embarkasi KJT Tahun 2024 M/ 1445H

c) Operasional Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi (Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Penyakit Potensial Wabah Pada Pelaku Perjalanan Internasional jemaah Haji Embarkasi)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penentuan status laik terbang jemaah calon haji. Hal ini dilakukan melalui surveilans data penyakit serta kondisi kesehatan terakhir serta pemeriksaan fisik sederhana berupa pemeriksaan suhu badan, tekanan darah (untuk yang mempunyai riwayat jantung), pengamatan fisik (untuk yang mempunyai riwayat diabetes mellitus atau anemia), serta pemeriksaan kehamilan (jika hasil tes pemeriksaan kehamilan terakhir sudah lebih dari 2 minggu). Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Mei dan Juni.



Gambar 4.10 Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Tahap Ketiga

d) Operasional Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi (Pengendalian Risiko Lingkungan di Embarkasi Haji)

Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan di Embarkasi Haji pada tahun 2024 dilaksanakan di 2 asrama haji di Jawa Barat, yaitu Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) dan Embarkasi Kertajati Indramayu (KJT). Kegiatan pengendalian risiko lingkungan di embarkasi haji berlangsung selama masa operasional haji mulai dari tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024. Petugas yang melaksanakan kegiatan pengendalian risiko lingkungan embarkasi di 2 lokasi berjumlah total 20 orang yang terdiri dari 12 tenaga sanitarian dan 8 tenaga entomolog kesehatan.

Kegiatan pengendalian risiko lingkungan di embarkasi haji terdiri dari kegiatan sanitasi dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Untuk kegiatan pengendalian di ranah sanitasi, dilakukan tindakan kaporitisasi atau pembubuhan kaporit untuk pengendalian kualitas bakteriologis air bersih. Air bersih di asrama haji akan diberi kaporit secara rutin, dimana kontrol dilaksanakan setiap hari dengan mengecek kandungan klor di dalam air bersih menggunakan rapid test. Jika air sudah tidak terdetek sisa klor, dilakukan penambahan kaporit.

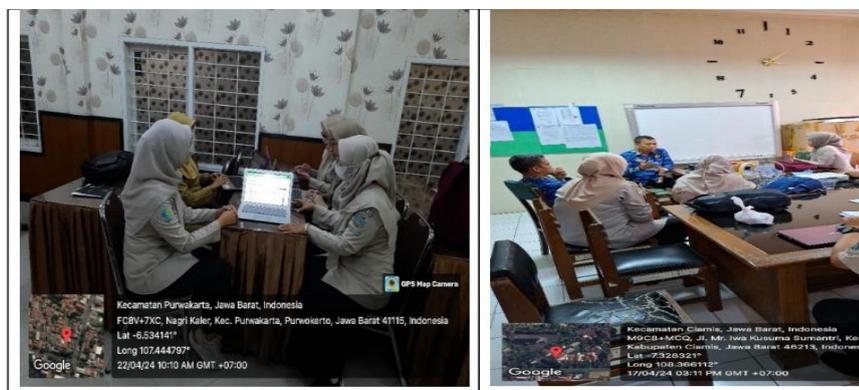
Sedangkan untuk pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, tindakan pengendalian lebih banyak dilakukan untuk pengendalian vektor lalat yang menjadi masalah di embarkasi haji. Keberadaan sampah organik yang tidak dikelola dengan baik memunculkan manifestasi lalat di lingkungan asrama haji. Untuk itu dilakukan tindakan spraying dan pemberian insektisida granule untuk mengendalikan kepadatan lalat. Selain itu, pada masa pra operasional haji, dilakukan tindakan fogging nyamuk untuk mengurangi kepadatan nyamuk di asrama haji.



Gambar 4.11 Pengendalian Risiko Lingkungan di Embarkasi Haji

e) Operasional Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi (Surveilans Epidemiologi Status Kesehatan dan Validasi Status Vaksinasi Internasional Pelaku Perjalanan Internasional)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi dan pemantauan status kesehatan pelaku perjalanan internasional yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan pra embarkasi, validasi status vaksinasi internasional, serta identifikasi faktor risiko kesehatan. Kegiatan berupa verifikasi data pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji Provinsi Jawa Barat oleh petugas BKK Bandung dengan mengunjungi dinas kesehatan kabupaten/kota terkait. Hal ini sebagai bentuk upaya deteksi dini terhadap penyebaran penyakit atau masalah kesehatan. Kegiatan ini diperlukan agar kendala terkait status kesehatan pelaku perjalanan internasional atau masalah dokumen kesehatan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota sehingga proses pemeriksaan kesehatan ketiga di embarkasi nanti dapat berjalan dengan lancar. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan April dan Mei.



Gambar 4.12 Surveilans Epidemiologi Status Kesehatan dan Validasi Status Vaksinasi

f) Operasional Kekejarantinaan Kesehatan Embarkasi (Koordinasi Pengawasan Pangan Pelaku Perjalanan Internasional (Jemaah Haji Jawa Barat)

Kegiatan koordinasi pengawasan pangan untuk jemaah haji dilaksanakan 1-2 minggu sebelum operasional Embarkasi Haji Tahun 2024 dilaksanakan yaitu pada akhir April 2024 sampai dengan awal bulan Mei 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi langsung dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini membahas tentang pentingnya Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk menginformasikan kepada *stakeholder* terkait terutama yang berhubungan dengan keamanan pangan di daerah asal jemaah haji berangkat yaitu catering di daerah, kementerian agama di daerah serta KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) di daerah masing-masing.

Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota harus memastikan pangan yang dibagikan baik berupa snack maupun makanan berat di daerah asal ataupun saat transit (bagi kloter jarak jauh) aman dari risiko keracunan maupun penyakit akibat pengelolaan pangan yang tidak baik. Pangan yang dibagikan harus memenuhi syarat kesehatan, berlabel, diberi tanda kapan maksimal pangan dikonsumsi, serta jelas identitas catering yang memberikan makanan minuman. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota juga harus memastikan pada hari H keberangkatan dari daerah kepada *stakeholder* terkait maupun jemaah haji itu sendiri agar tidak membawa makanan minuman yang mudah kedaluwarsa masuk ke dalam asrama haji, dikarenakan di asrama haji sudah disediakan akomodasi termasuk makanan minuman yang higienis, halal, dan bergizi.



Gambar 4.13 Koordinasi dengan Dinkes Kab/Kota Pangan Jemaah Haji

g) Operasional Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi (dalam kota)

Pada kegiatan embarkasi untuk layanan kegiatan di klinik memerlukan petugas tambahan untuk menunjang layanan kesehatan di klinik dan rujukan tenaga kesehatan yang di libatkan yaitu dari Dinkes Kota Bekasi dan dinkes kab Bekasi serta dari RSUD Chasbullah Abdul Madjid Tenaga kesehatan yang dilibatkan yaitu, Dokter umum, perawat, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dan Farmasi. dalam pelaksanaannya petugas dalam kota bekerja selama 12 jam dengan dibagi 3 tim.

h) Operasional Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi (Pelayanan Dokter Spesialis)

Pada kegiatan pelayan kesehatan haji ada beberapa jemaah yang tidak bisa ditangani langsung oleh dokter umum maka dilakukan rujukan ke dokter spesialis. dokter spesialis yang ditugaskan yaitu dari RSUD Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. sebelum pelaksanaan kegiatan BKK Kelas I bandung mengajukan permohonan kebutuhan dokter spesialis yaitu Spesialis Jantung, Spesialis Obgyn, Spesialis Internis dan Spesialis Jiwa. dalam pelaksanaannya ada beberapa jemaah yang dikonsulkan dan dinyatakan tidak laik terbang. pelaksanaan kegiatan dilakukan selama kegiatan embarkasi berlangsung yaitu pada bulan Mei s.d. Juni 2024.



Gambar 4.14 Jemaah Ny. M sedang diperiksa oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam

i) Operasional Kekarantinaan Kesehatan Embarkasi (Tenaga Operasional Administrasi Umum Operasional Kesehatan)

Kegiatan ini berupa tenaga bantuan administrasi dari dalam kota berupa bantuan pendistribusian paket jemaah yang dibagikan kepada jemaah haji pada waktu datang

tepatnya pada proses pemeriksaan ke-3 (Laik Terbang). Bantuan tenaga administrasi ini hanya untuk embarkasi JKS karena Penyimpanan paket yang ditempatkan di klinik lantai 2 memerlukan bantuan pengangkutan yang dibagikan ke jemaah di Aula embarkasi dikarenakan tempat yang tidak memadai. sedangkan di Asrama Indramayu paket bisa ditempatkan di dekat aula. Kegiatan ini berlangsung selama kegiatan haji di bulan Mei s.d. Juni 2024.



Gambar 4.15 Melakukan Pembagian Obat dan Perlengkapan Kesehatan Kepada Jamaah Haji

j) Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan di Asrama Haji

Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan di asrama Haji pada tahun 2024 dilaksanakan di 2 asrama haji di Jawa Barat, yaitu Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS) dan Embarkasi Kertajati Indramayu (KJT). Kegiatan pengawasan faktor risiko lingkungan di asrama haji dimulai dari tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024. Petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan faktor risiko lingkungan di 2 lokasi berjumlah total 20 orang yang terdiri dari 12 tenaga sanitarian dan 8 tenaga entomolog kesehatan.

Kegiatan pengawasan risiko lingkungan di asrama haji terdiri dari kegiatan penyehatan pangan (pemeriksaan penjamah makanan catering, organoleptik makanan minuman jemaah haji, bank sampel makanan minuman, penerimaan sampel makanan dari daerah transit, pengawasan pengolahan makanan, pengawasan tempat penyajian makanan di setiap gedung, serta sweeping bawaan makanan jemaah haji), penyehatan air (pengawasan kualitas, kuantitas air, serta penyehatan air berupa klorinasi pembubuhan disinfektan pembunuh bakteri), pengawasan gedung dan lingkungan (inspeksi hygiene

sanitasi, disinfeksi ruangan terkontaminasi), serta pengamanan limbah medis dari kegiatan klinik di embarkasi haji. Selain itu, dalam kegiatan pengawasan risiko lingkungan ini juga dilakukan di bandara BIJB kertajati majalengka tempat pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi KJT, dimana kegiatan yang dilakukan yaitu pengawasan makanan minuman jemaah haji untuk dimakan di pesawat, serta pengawasan gedung dan bangunan bandara.



Gambar 4.16 pengawasan makanan minuman jemaah haji

k) Pemeriksaan Kesehatan Laik Terbang di luar masa Embarkasi dan Evaluasi pasca Debarkasi

- Pemeriksaan Kesehatan Laik Terbang di luar masa Embarkasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan April sebelum calon jemaah haji masuk embarkasi dengan melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan seperti diagnosis akhir, hasil laboratorium, status istithaah, keterangan vaksinasi meningitis, dan keterangan hamil/ tidak hamil. Pada pemeriksaan dokumen tersebut mencari calon jemaah haji yang perlu pengawasan khusus sebelum masuk ke asrama diantaranya penyakit anemia, hipertensi, diabetes, jantung, gagal ginjal. Hasil kegiatan ini didapatkan 1.241 calon jemaah haji yang memiliki faktor risiko tidak laik terbang, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

- Evaluasi Pasca Debarkasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Agustus setelah pelaksanaan debarkasi haji dengan melakukan kunjungan ke dinas kesehatan kab/kota terkait jumlah jemaah haji wafat, evaluasi diagnosa kesehatan jemaah haji, hambatan pelayanan kesehatan di asrama haji.



Gambar 4.17 Kunjungan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota

I) Operasional Kekejarantinaan Kesehatan Debarkasi (Pelayanan Kesehatan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di poliklinik kepada jemaah haji yang baru tiba di Indonesia baik dalam keadaan sakit, maupun sehat dan petugas sekitar lingkungan BIJB Kertajati dan asrama haji Bekasi. Pelayanan yang disediakan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan rujukan. Pelayanan kesehatan diberikan dengan optimal karena selain petugas BKK Kelas I Bandung juga dibantu oleh beberapa petugas dari RSUD Bekasi dan petugas Dinas Kesehatan terkait. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Juli dengan jumlah kunjungan poliklinik sebanyak 152 jemaah haji, 183 petugas, dan 45 rujukan ke RS rujukan atau RS wilayah jemaah haji tinggal. Kunjungan Pelayanan Kesehatan Poliklinik Debarkasi Embarkasi JKS dengan jumlah jemaah 74 orang, Petugas 169 orang. Kunjungan Pelayanan Kesehatan Poliklinik Debarkasi Embarkasi KJT dengan jumlah jemaah 78 orang, Petugas 14 orang

Selain itu dilakukan juga kegiatan penjemputan atau pengawalan jemaah haji ke Bandara Soekarno-Hatta untuk embarkasi JKS pada semua kloter dengan jumlah 63 kloter. setiap kloter dikawal oleh satu ambulans dengan SDM 2 perawat dan 1 sopir.



Gambar 4.18 Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji

m) Operasional Kekejarantinaan Kesehatan Debarkasi (Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Penyakit Potensial Wabah Pada Pelaku Perjalanan Internasional jemaah Haji)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa jemaah haji sepulang dari berhaji tidak membawa penyakit menular potensial wabah yang masih menjadi perhatian di Arab Saudi antara lain: Meningitis *Meningococcus*, MERS-CoV, dan COVID-19. Hal ini dilakukan melalui pemindaian suhu tubuh (dipastikan tidak ada yang melebihi 38°C), pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat/Gendec (*General Declaration*) untuk melihat ada/tidaknya penumpang sakit atau faktor risiko kesehatan di pesawat, serta promosi kesehatan terkait perilaku yang harus dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari sepulang berhaji untuk mencegah penularan penyakit. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan Juni dan Juli.



Gambar 4.19 Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Penyakit Potensial Wabah

n) Penyuluhan Informasi Wolbachia

Kasus penyakit DBD khususnya kota Bandung menjadi kasus tertinggi di Indonesia. Dalam rangka mengendalikan penyakit DBD, Kemenkes melaksanakan program inovasi yaitu implementasi nyamuk *Aedes aegypti* ber Wolbachia. Kegiatan penyuluhan informasi wolbachia bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana implementasi nyamuk *Aedes aegypti* ber Wolbachia yang ada di Kota Bandung. Adapun masyarakat yang menjadi sasaran BKK Bandung yaitu usia anak sekolah, baik di pendidikan dasar maupun menengah. Hal ini dikarenakan banyak kasus DBD terjadi di lingkungan sekolah.

Penyuluhan membahas tentang binatang penyebab penyakit DBD, lingkungan yang mendukung pertumbuhan vektor DBD, serta bagaimana mekanisme nyamuk *Aedes aegypti*

ber-Wolbachia dalam menekan kasus DBD. Dalam penyuluhan ini juga menggunakan media diantaranya power point untuk menjelaskan materi, dan mikroskop untuk melihat secara langsung bagaimana wujud nyamuk *Aedes aegypti* dengan jelas.

Hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan penyuluhan ini yaitu bagaimana menentukan jadwal yang tepat untuk waktu penyuluhan, sasaran penyuluhan dikarenakan tidak memungkinkan memberikan penyuluhan kepada seluruh siswa karena keterbatasan sarana, serta bagaimana membuat perbedaan materi antara sekolah dasar dan sekolah menengah.



Gambar 4.20 Penyuluhan Informasi Wolbachia di Lembaga Pendidikan

o) Sanitasi dan Pengendalian Vektor Debarkasi

Kegiatan sanitasi dan pengendalian vektor pada masa debarkasi tidak jauh berbeda dengan kegiatan pada masa operasional embarkasi haji. Yang berbeda pada masa debarkasi haji yaitu adanya pelaksanaan kegiatan disinfeksi yang dilakukan terhadap alat angkut yang membawa jemaah haji. Dalam hal ini, bus jemaah haji dari bandara menuju asrama haji dilakukan tindakan disinfeksi untuk mengendalikan faktor risiko penyakit yang dibawa jemaah haji dari luar negeri. Selain itu, khusus di Bandara Kertajati Majalengka, petugas juga melakukan pemeriksaan sanitasi pesawat yang mengangkut jemaah haji,

melakukan pengambilan sampel makanan dari keberangkatan di Arab Saudi, dan melakukan pengambilan kaleng aerosol insektisida yang diaplikasikan selama penerbangan.

Hambatan yang dirasakan pada kegiatan debarkasi yaitu pelaksanaan kegiatan disinfeksi dimana terkadang alat yang digunakan untuk disinfeksi mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi dengan optimal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas menyediakan alat cadangan untuk berjaga-jaga bila tidak berfungsi/ rusak, alat cadangan bisa digunakan sehingga kegiatan tidak terhambat. Selain itu, hambatan yang dirasakan adalah adanya perbedaan lokasi turun jemaah haji pada waktu tertentu misalnya akibat hujan atau jarak kedatangan yang berdekatan antar kloter, yang membuat sering terjadi miskomunikasi antar petugas yang menghambat operasional kegiatan.



Gambar 4. 21 Sanitasi dan Pengendalian Vektor di Pesawat

- p) Evaluasi pelayanan Kesehatan pasca debarkasi dan evaluasi pelayanan kesehatan di pintu masuk negara

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September dengan melakukan perjalanan dinas ke dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk mensinkronkan data jumlah kesehatan haji yang pulang dalam keadaan sehat dan wafat baik di Arab Saudi maupun yang sudah tiba di Indonesia. Mengetahui situasi terkini terkait Kesehatan haji yang pulang dirujuk dari poliklinik debarkasi juga pengawasan resiko penyakit menular seperti meningitis meningokokus, MERS. Kegiatan ini juga untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan oleh BKK Kelas I Bandung di asrama haji



Gambar 4.22 Evaluasi pelayanan Kesehatan pasca debarkasi dan evaluasi pelayanan kesehatan

q) Bandara kertajati

Kegiatan ini dilakukan di bandara kertajati dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan kesehatan haji yang sehat maupun yang sakit serta pelayanan rujukan. Kegiatan dilakukan dengan cara memeriksa langsung keseha dan evakuasi keseha dari pesawat langsung maupun pelayanan keseha sakit di klinik Bandara Kertajati.



Gambar 4.23 pelayanan Kesehatan di Bandara Kertajati

r) Relokasi Barang pasca Debarkasi

Kegiatan ini dilakuakn setelah selesai kegiatan kepulangan/Debarkasi haji yaitu berupa relokasi atau pengangkutan barang alat dan bahan kesehatan maupun pendukung lainnya dari Asrama Haji Bekasi maupun asrma haji Indramayu dan Bandara Kertaji.selain merelokasi barang dilakukan juga pencatan dan pelaporan serta cek kelaikan barang yang sudah digunakan. Kegiatan dilakukan pada Bulan Agustus sampai September 2024



Gambar 4.24 Relokasi Barang pasca Debarkasi

s) Surveilans Epidemiologi Pada Pelaku Perjalanan Internasional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau kesehatan haji 21 (dua puluh satu) hari pasca kepulangan dari Arab Saudi. Hal ini dikarenakan menurut Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. HK.02.02/C/2782/2022 Tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Jemaah Haji di Embarkasi dan Debarkasi, Kesehatan haji yang telah pulang ke Tanah Air tetap mendapatkan pemantauan kesehatan. Pemantauan ini dimaksudkan sebagai deteksi dini terhadap penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Public Health Emergency of International Concern (PHEOC) seperti Covid-19, Mers-Cov, Meningitis, dan Polio. Kegiatan ini juga sebagai kelanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu: pra embarkasi, operasional embarkasi, dan operasional debarkasi. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Agustus, September, dan November.



Gambar 4.25 Surveilans Epidemiologi Pada Pelaku Perjalanan Internasional

t) Evaluasi Pengawasan Pangan Pelaku Perjalanan Internasional (Jemaah Haji Jawa Barat)

Kegiatan evaluasi pengawasan pangan pelaku perjalanan internasional difokuskan pada penanganan pangan kesehatan haji asal provinsi Jawa Barat selama masa embarkasi. Dari hasil pemantauan selama masa embarkasi berlangsung, makanan yang dibawa kesehatan haji dari daerah asal kesehatan berkurang kesehatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan adanya efektivitas dari kegiatan pengawasan pangan pra embarkasi yang dilakukan menjelang embarkasi berlangsung, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dihimbau untuk melakukan pengawasan pangan baik terhadap Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) daerah, kesehatan daerah, termasuk makanan yang dibawa kesehatan haji dari rumahnya untuk mengurangi risiko terjadinya keracunan pangan.

Hambatan dari pelaksanaan pengawasan pangan ini yaitu bagaimana pengawasan terhadap kesehatan haji yang tiba tengah malam di embarkasi, dikarenakan kedatangan kesehatan haji di malam hari belum disediakan akomodasi snack maupun makanan dari kesehatan embarkasi. Sedangkan terkadang kesehatan haji merasa lapar saat tiba di asrama haji. Hal ini berisiko Kesehatan haji mengkonsumsi makanan di luar asrama haji yang tidak dapat dijamin Kesehatan keamanan pangan nya.



Gambar 4.26 Evaluasi Pengawasan Pangan Pelaku Perjalanan Internasional

u) Konsultasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

Kegiatan konsultasi pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke asrama haji Jakarta Bekasi terkait pelaksanaan embarkasi di asrama haji JKS selama masa operasional haji tahun 2024. Seperti diketahui, untuk pelaksanaan haji tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depannya. Permasalahan tersebut diantaranya perihal pedagang makanan minuman yang diperbolehkan berdagang di ring I Asrama Haji Jawa Barat.

Selain itu, permasalahan yang belum selesai di asrama haji JKS yaitu permasalahan dapur dimana kondisi di dalam ruangan dapur panas dan perlu penambahan exhaust fan. Selain itu kondisi tidak adanya jembatan atap khusus untuk menghubungkan distribusi makanan dari dapur menuju gedung dimana saat kondisi hujan, ini dapat menjadi potensi terjadinya pencemaran terhadap pangan.

Hal ini sudah langsung disampaikan terhadap kepala UPT Asrama Haji Jakarta Bekasi dan adanya komitmen untuk bisa mengatasi hal tersebut pada tahun berikutnya. Itupun bisa direalisasikan tergantung dari dana yang diberikan dari APBN untuk operasional pemeliharaan gedung di Asrama Haji Jakarta Bekasi.



Gambar 4.27 Konsultasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

v) Evaluasi Pengendalian Risiko Lingkungan Pasca Debarkasi dan Pemeriksaan Leptospirosis

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengambilan sampel ginjal tikus di setiap wilayah kerja BKK Kelas I Bandung, untuk kemudian dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan kebedaaan bakteri leptospirosis yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesmas) Pangandaran.

Sampel ginjal tikus disimpan di dalam botol sampel yang sudah diberi alkohol 70%. Sampel ginjal tikus yang sudah diberi alkohol saat dibawa ke Labkesmas disimpan di dalam cool box berisi ice pack. Pemeriksaan leptospirosis ini dilakukan di Labkesmas Pangandaran sekaligus melakukan pertemuan evaluasi kegiatan debarkasi haji tahun 2024.

Kegiatan ini diikuti oleh 12 orang dari tim kerja Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan BKK Kelas I Bandung yang terdiri dari unsur jabatan fungsional Entomolog

Kesehatan dan Sanitarian dan berasal dari perwakilan masing-masing wilayah kerja di seluruh lingkungan BKK Bandung.

Hasil dari pemeriksaan leptospirosis tersebut menginformasikan terdapat lokasi yang positif bakteri leptospirosis, yaitu di wilayah kerja palabuhanratu sukabumi, wilayah kerja indramayu, dan wilayah kerja patimban. Hal ini harus ditindaklanjuti diseminasi informasi terutama terhadap stakeholder seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun penyelenggara pelabuhan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan surveilans penyakit leptospirosis baik terhadap orang maupun lingkungan.

Selain itu, hasil evaluasi yang disampaikan terkait debarkasi haji diantaranya yaitu terkait dapur operasional di embarkasi indramayu yang ke depan harus dilakukan survei terlebih dahulu agar mendapatkan lokasi yang memenuhi syarat sehubungan belum adanya dapur operasional di asrama haji indramayu. Kemudian masalah AC di gedung zamzam Embarkasi Jakarta Bekasi yang bermasalah selama penyelenggaraan haji 2024. Evaluasi juga membahas operasional pengangkutan sampah domestik di asrama haji bekasi yang tidak diangkat setiap hari saat debarkasi.



Gambar 4.28 Evaluasi Pengendalian Risiko Lingkungan Pasca Debarkasi dan Pemeriksaan Leptospirosis

w) Konsultasi implementasi teknologi kesehatan

Kegiatan konsultasi implementasi teknologi kesehatan dijabarkan melalui kegiatan koordinasi pengembangan telur *Aedes aegypti* ber-*Wolbachia* untuk kota Bandung di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (BBLKL) Salatiga. Seperti diketahui bahwa asal telur untuk pengembangan proyek kesehatan di kota Bandung dikembangkan di BBLKL Salatiga.

Kunjungan ini untuk mempelajari dan memastikan bagaimana telur nyamuk dikembangkan di laboratorium termasuk bagaimana teknis pengiriman telur ke kota Bandung. Dalam hal ini juga dipelajari bagaimana BBLKL Salatiga memastikan telur *Aedes aegypti* yang dikirim 100% mengandung kesehatan dan 100% bebas virus penyebab penyakit seperti DBD, chikungunya.

Output dari kegiatan ini adalah petugas BKK Bandung sebagai identifikator di lapangan semakin yakin dan bisa menjelaskan kepada masyarakat yang masih ragu terkait proyek implementasi kesehatan, dikarenakan sudah melihat secara langsung bagaimana nyamuk ini dikembangkan dan sudah dipastikan keamanannya.



Gambar 4.29 Konsultasi implementasi teknologi Kesehatan

x) Saka Bhakti Husada Ditjen P2P Latihan Bersama Tingkat Nasional ke 2 Kemenkes RI

Memperingati Hari Ulang Tahun Saka Bakti Husada ke-39, BKK Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan latihan bersama nasional (latbernas) dengan tema “Jangan ada DBD diantara kita”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2024 bertempat di Kantor Induk BKK Bandung di Jalan Cikapayang No.5 Kota Bandung.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta didik pramuka setingkat SMA/ sederajat dan tamu undangan dari berbagai unsur kepramukaan baik tingkat kota, wilayah maupun pusat (Dirjen P2P Kemenkes RI). Peserta ada yang menghadiri secara offline di lokasi, dan ada juga yang online melalui aplikasi zoom.

Kegiatan ini lebih banyak membahas tentang penyakit DBD mulai dari situasi kondisi DBD di kota Bandung yang menjadi kota dengan status kasus terbanyak yang disampaikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian membahas tentang pengendalian vektor DBD, proyek implelementasi nyamuk *Aedes aegypti* ber-wolbachia serta vaksin DBD yang sedang dikembangkan. Selain itu juga ada kegiatan latihan lapangan yaitu praktek penggunaan mesin fogging pengendalian DBD, dan juga pengenalan larva dan nyamuk *Aedes*, dan berbagai macam metode pengendalian DBD.



Gambar 4.30 Kegiatan Saka Bakti Husada Ditjen P2P

4) 4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di kesehatan/bandara/lintas batas (1700 Orang)

a) Monitoring Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Saat Bencana/ Hari Besar Nasional/ Hari Raya Nasional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau, koordinasi, serta persiapan pada kegiatan situasi khusus arus mudik lebaran, nataru, hari besar nasional maupun hari keagamaan. kegiatan ini dilaksanakan sebagai pemantauan kegiatan situs agar berjalan dengan baik dan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya BKK Kelas I bandung melakukan pengawasan arus mudik lebaran dan Natru di Wilker bandra Kertajati dan pengawasan di sepanjang wilker indramayu, Wilker Cirebon sepanjang Jalan Pantura sampai dengan perbatasan jawa Tengah. Dalam hal pelaksanaan kegiatan ada persiapan sebelum untuk pembentukan Posko Situasi khusus terpadu dengan Dinkes Prov, Dinas Kab Kota, BPBD, Dishub, PMI, Satpol PP, TNI, Kepolisian dan yang lainnya. Kegiatan ini dilakukan pada bulai April 2024 untuk Arus Mudik Lebaran dan Bulan Desember 2024 untuk kegiatan Nataru.



Gambar 4.31 Monitoring Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Saat Bencana/ Hari Besar Nasional/ Hari Raya Nasional

- b) Pelayanan Kesehatan klinik, skrining penyakit menular dan penjamah makanan di pintu masuk negara

Kegiatan dilakukan di semua wilayah Pintu Masuk Negara BKK Kelas I Bandung. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa pemeriksaan penjamah makanan, penyuluhan kesehatan terkait penyakit menular di pintu masuk negara seperti HIV, TB, Leptospirosis dan yang lainnya. Setiap Wilayah kerja melakukan kegiatan dalam satu tahun 1-2 kali kegiatan. Untuk pemeriksaan penjamah makanan dilakukan dengan cara memeriksa semua penjamah makan yang ada di pintu masuk negara di Wilker BKK Kelas I Bandung yaitu di Wilker Kertajati, Wilker Cirebon, Wilker Patimban, Wilker, Indramayu, Wilker Palabuhanratu. Pada kegiatan ini diprioritaskan pada penyuluhan terkait leptospirosis dimana hasil pemeriksaan pada tikus oleh tim PRL angka leptospirosis di Wilker cukup tinggi oleh karena itu pada akhir tahun 2024 dilakukan penyuluhan dan pemeriksaan pada orang di Wilayah kerja lebih dioptimalkan.



Gambar 4.32 Pelayanan Kesehatan klinik, skrining penyakit menular dan penjamah makanan di pintu masuk negara

- 5) 4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (8 Layanan)
 - a) Pemeriksaan Sanitasi Asrama Haji dan Bandara

Kegiatan pemeriksaan sanitasi asrama haji dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan asrama haji yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Dari tahapan tersebut, 2 tahap dilaksanakan sebelum masa operasional haji dan 1 tahap dilaksanakan selama operasional haji. Rentang waktu pemeriksaan tersebut yaitu 6 bulan sebelum operasional haji (tahap pertama), 1 minggu sebelum operasional haji (tahap kedua), dan dilakukan secara rutin selama operasional haji dilaksanakan (tahap ketiga).

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemeriksaan sanitasi asrama haji terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, UPT Asrama Haji, Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Labkesda Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dan kota Bekasi, BKK Kelas I Bandung, serta BBLKM Jakarta.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan pada setiap gedung yang ada di lingkungan asrama haji. Point point yang dinilai yaitu persyaratan kesehatan gedung istirahat jemaah haji, aula pertemuan, unsur Keselamatan Kesehatan Kerja, Kualitas Air Bersih, Persyaratan dapur, Tempat Penampungan Sampah Sementara, Masjid dan lain-lain.

IKL Tahap I dilaksanakan pada 4-5 Desember 2023 dimana tanggal 4 Desember 2023 di Asrama haji indramayu dengan hasil 73, 17 (kategori cukup), sedangkan tanggal 5 Desember 2023 di asrama haji Bekasi dengan nilai 80,44 (Kategori Baik). Untuk IKL Tahap II dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan hasil asrama haji Bekasi 90,45 (kategori Baik Sekali), dan asrama haji indramayu 84,2 (kategori Baik). Pada dasarnya ada peningkatan nilai dari IKL tahap I ke tahap II, hanya saja tetap ada catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk operasional haji selanjutnya. Diantara permasalahan yang cukup kritis adalah permasalahan keamanan pangan (kualitas dapur), kualitas bakteriologi air bersih.



Gambar 4.33 Kegiatan IKL Tahap I di Asrama Haji Indramayu, 4 – 5 Desember 2023

b) Uji Petik Keamanan Pangan

Tempat Pengolahan Pangan (TPP) terdiri dari rumah makan, restoran, jasa boga/ catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan, BKK Bandung selaku pihak yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan TPP di lingkungan bandara dan pelabuhan melalui kegiatan uji petik secara berkala sebagai langkah preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di pelabuhan dan bandara.

Kegiatan uji petik keamanan pangan ini meliputi pengambilan sampel makanan minuman, sampel usap alat makan, serta sampel usap tangan penjamah makanan. Sampel

tersebut kemudian diperiksa di laboratorium terakreditasi untuk mengetahui apakah hasil uji petik tersebut memenuhi syarat (aman) atau tidak memenuhi syarat (berbahaya) bagi kesehatan penjamah makanan dan masyarakat. Hasil uji petik yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun dengan total sampel yang diambil yaitu 66 sampel makanan minuman dan 67 sampel usap tangan penjamah makanan, hasilnya seluruhnya memenuhi syarat kesehatan (aman).

Dengan hasil tersebut, dibuat analisis sederhana, artinya penjamah makanan sudah mulai menyadari pentingnya prinsip hygiene sanitasi pangan dan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Tangan yang memenuhi syarat menandakan penjamah rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Sedangkan pangan yang memenuhi syarat menandakan pangan dimasak dengan baik dan makanan matang dikelola dengan baik.



Gambar 4.34 Uji Petik Keamanan Pangan

c) Uji Petik Air Kebutuhan Sanitasi di Pelabuhan dan Bandara

Dalam rangka menjaga kualitas air untuk kebutuhan sanitasi yang ada di lingkungan atau berhubungan langsung dengan kegiatan di pelabuhan dan bandara, perlu tindakan pengawasan untuk memastikan keamanannya. BKK Kelas I Bandung mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan di wilayah kerjanya. Air di pelabuhan dan bandara digunakan untuk kegiatan operasional gedung, kebutuhan air di pesawat dan kapal, maupun untuk kebutuhan lainnya.

Dari 20 titik Sarana Air Bersih (SAB) untuk pemeriksaan bakteriologis dan 7 titik SAB untuk pemeriksaan kimia air dari seluruh wilayah kerja BKK Kelas I Bandung baik pelabuhan maupun bandara, diperoleh hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) parameter bakteriologi di keseluruhan titik kecuali SAB di wilayah kerja palabuhanratu Sukabumi. Sedangkan sisanya di 6 kali pemeriksaan bakteriologi maupun kimia, hasilnya telah memenuhi syarat (aman).

Treatment yang dilakukan terhadap kualitas bakteriologis air yang tidak memenuhi syarat dilakukan dengan pemberian kaporit tablet yang dimasukkan ke dalam reservoir air. Pemberian kaporit ini efektif untuk membunuh bakteri patogen yang ada di dalam air bersih sehingga bisa digunakan untuk keperluan sanitasi seperti mandi, cuci, kakus kecuali untuk air minum harus dilakukan pengolahan lanjutan.



Gambar 4.35 Uji Petik Air Kebutuhan Sanitasi di Pelabuhan dan Bandara

d) Pengawasan Udara dan Koordinasi Pelabuhan Bandara Sehat

Pengawasan udara di lingkungan pelabuhan dan bandara sehat merupakan aspek penting yang harus dilakukan pengawasan secara ketat. Sumber pencemaran yang dapat meningkatkan kadar polutan pencemar maupun secara fisik di udara harus dikontrol agar tidak mengganggu aktivitas operasional baik di pelabuhan maupun bandara. Sumber pencemaran di udara ada banyak sekali, bisa dari alat angkut itu sendiri (bahan bakar) maupun dari lingkungan (misalnya adanya aktivitas pabrik di sekitar pelabuhan dan bandara). Terlebih di pelabuhan tertentu semisal pelabuhan patimban, sedang dilakukan perluasan lahan pelabuhan dan terdapat banyak pencemar udara. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari adanya pelabuhan bandara sehat yaitu terciptanya lingkungan pelabuhan dan bandara yang bersih dan sehat.

BKK Bandung sebagai fungsi pengawasan melakukan uji petik kualitas udara terutama udara polutan. Dilakukan pengukuran kadar polutan pencemar seperti CO (Karbon Monoksida), NO₂ (Nitrogen Oksida), PM (Partikulat Meter) 2,5 dan 10 serta pencemar lainnya. Dari hasil pengawasan udara yang dilakukan selama 6 kali dalam 1 tahun, polutan yang ada di area wilayah perimeter pelabuhan dan bandara masih dalam batas normal (aman).

Meskipun demikian, perlu adanya sosialisasi terhadap pekerja terutama di area proyek seperti di pelabuhan patimban, untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) masker chemical secara rutin karena kadar debu yang cukup tinggi saat proyek berlangsung.

Kegiatan koordinasi pelabuhan dan bandara sehat difokuskan terhadap 3 lokasi, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, Bandara BIJB Kertajati Majalengka, dan PPN Palabuhanratu Sukabumi. Terlebih PPN Kejawanan dan Bandara BIJB Kertajati difokuskan untuk mengikuti penilaian pelabuhan dan bandara sehat 2024. Hasil dari koordinasi tersebut membuahkan hasil baik dimana PPN Kejawanan Cirebon dan Bandara BIJB Kertajati menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai pelabuhan dan bandara sehat tahun 2024. Sedangkan untuk PPN Palabuhanratu Sukabumi dalam tahap awal pembentukan forum pelabuhan sehat dan bersiap menjalankan program pelabuhan sehat bersama seluruh stakeholder.



Gambar 4.36 Pengawasan Udara dan Koordinasi Pelabuhan Bandara Sehat

e) Pengawasan Limbah Cair di Pelabuhan dan Bandara

Kegiatan pengawasan limbah cair di pelabuhan dan bandara dilakukan untuk memastikan air limbah yang dibuang ke lingkungan, yang berasal dari lingkungan pelabuhan dan bandara, aman tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Kegiatan pengawasan limbah cair ini dilakukan dengan melakukan monitoring evaluasi beberapa parameter kualitas air limbah, dan konstruksi maupun metode pengolahan air limbah termasuk potensi keberadaan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan bandara dan pelabuhan.

Parameter kualitas air limbah yang diperiksa meliputi pengukuran pH, kadar oksigen terlarut (Dissolve Oxygen), Total Suspended Solid (TSS)/ Total Padatan tersuspensi maupun Total Dissolved Solid (TDS)/ Total Padatan Terlarut. Sedangkan untuk konstruksi dilihat apakah ada instalasi pengolahan air limbah dan metode apa yang digunakan. Dalam hal ini juga dilakukan wawancara terhadap pengelola pelabuhan dan bandara apakah mengelola limbah B3 atau tidak yang dihasilkan dari operasional kegiatan pelabuhan dan bandara.

Hasil pemeriksaan parameter kualitas limbah cair di seluruh wilayah kerja BKK Kelas I Bandung hasilnya masih dalam ambang batas normal dan tidak mencemari lingkungan. Hasil wawancara ditemukan limbah B3 di beberapa wilayah kerja seperti di BIJB Kertajati Majalengka terdapat limbah B3 oli bekas dari aktivitas operasional bandara. Limbah B3 juga ditemukan di pelabuhan namun belum optimal pengawasannya. Seluruh pelabuhan dan bandara di lingkungan BKK Kelas I Bandung belum ada yang memiliki Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) Limbah B3.



Gambar 4.37 Pengawasan Limbah Cair di Pelabuhan dan Bandara

f) Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan di Pelabuhan dan Bandara

Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di lingkungan pelabuhan dan bandara yang ada di wilayah kerja BKK Kelas I Bandung dilakukan secara rutin setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan kondisi riil di lapangan dengan form pemeriksaan TPP yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan. Item yang diperiksa diantaranya yaitu kondisi bangunan TPP, kondisi makanan, peralatan makan, kondisi penjamah, pengelolaan sampah, pengelolaan vektor dan binatang pembawa penyakit, dan sebagainya.

Dari sebanyak 78 TPP di lingkungan bandara dan pelabuhan, mayoritas TPP yang Tidak Memenuhi Syarat ada di lingkungan pelabuhan. Sedangkan TPP yang memenuhi syarat ada di lingkungan bandara. Hal ini disebabkan TPP yang ada di pelabuhan merupakan TPP perorangan yang dikelola secara mandiri dan biasanya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi bagaimana TPP di pelabuhan dikelola tambah pengetahuan penjamah yang kurang. Sedangkan TPP di bandara biasanya dikelola dengan baik karena bandara identik dengan tempat umum yang punya standar tinggi. Selain itu dikarenakan di bandara waktu kunjung singkat, maka makanan yang diolah pun biasanya cenderung fast food.



Gambar 4.38 Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan di Pelabuhan dan Bandara

g) Pengawasan dan Tindakan Penyehatan SAB di Pelabuhan dan Bandara

Pengawasan dan tindakan penyehatan sarana air bersih di pelabuhan dan bandara di wilayah pengawasan BKK Kelas I Bandung bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas air bersih yang digunakan untuk kegiatan operasional termasuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh media air bersih. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara rutin setiap 1 bulan sekali mencakup pemeriksaan konstruksi sarana air bersih, kimia sederhana (pH dan sisa chlor) serta kualitas fisika (bau, warna, kekeruhan). Selain pada reservoir, pengawasan juga dilakukan terhadap kran distribusi di pelabuhan dan bandara.

Dari hasil rekapan kegiatan pengawasan Sarana Air Bersih selama 1 tahun, terdapat sarana air bersih yang tidak memenuhi syarat pada awal tahun (Januari 2024) di beberapa titik sampel. Hal yang tidak memenuhi syarat tersebut berasal dari pemeriksaan laboratorium

dimana di dalam sarana ditemukan bakteri E.coli. Setelah dilakukan tindakan desinfeksi pada air berupa pembubuhan kaporit tablet, hasil SAB di seluruh SAB yang awalnya tidak memenuhi syarat, menjadi memenuhi syarat sampai dengan pemeriksaan di akhir tahun.

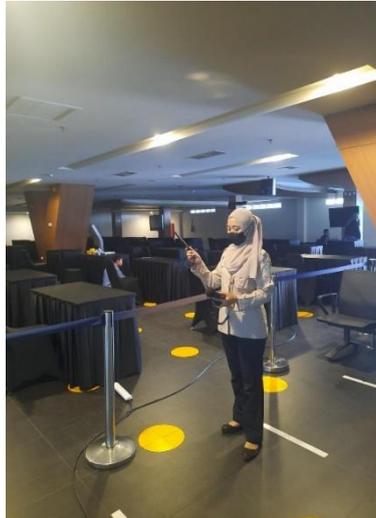


Gambar 4.39 Pengawasan dan Tindakan Penyehatan SAB di Pelabuhan dan Bandara

h) Inspeksi Sanitasi HSBU di Pelabuhan dan Bandara

Inspeksi Sanitasi Higiene Sanitasi Bangunan Umum atau lebih dikenal dengan istilah TTU (Tempat-Tempat Umum) dilaksanakan secara rutin setiap bulan bersamaan dengan kegiatan pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP). Inspeksi ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi riil dengan form pemeriksaan TPP dengan cara observasi checklist.

Point pemeriksaan TTU terdiri dari kondisi fisik bangunan, pencahayaan, kebisingan, dan lain sebagainya. Dari 54 TTU yang ada di lingkungan bandara dan pelabuhan yang masuk ke dalam pengawasan BKK Kelas I Bandung, keseluruhannya memenuhi syarat kesehatan. Terdapat temuan temuan tetapi masih dalam kategori minor.



Gambar 4.40 Inspeksi Sanitasi HSBU di Pelabuhan dan Bandara

i) Pengelolaan Limbah Medis

Pengelolaan limbah medis di seluruh wilayah kerja BKK Kelas I Bandung dilakukan terhadap limbah medis yang dihasilkan dari pelayanan medis terbatas di BKK Kelas I Bandung. Pelayanan medis terbatas tersebut diantaranya berasal dari pelayanan vaksinasi internasional dimana terdapat limbah botol vaksin dan jarum suntik, serta dari pelayanan klinik di pelabuhan maupun bandara. termasuk situasi khusus yaitu pada musim haji, posko idul fitri dan posko nataru. Limbah medis ini dikumpulkan dalam wadah khusus dan akan dimusnahkan secara berkala melalui kerja sama dengan pihak ke-3 pemusnah limbah.

Total limbah medis yang dibuang kepada pihak ke-3 selama tahun 2024 yaitu sebanyak 756,35 kg. Jumlah ini merupakan jumlah total limbah medis yang berasal dari pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kerja, kegiatan embarkasi haji, dan situasi khusus. Untuk tahun 2024, BKK Kelas I Bandung bekerja sama dengan transporter PT Arah Environmental Indonesia dan pemusnah limbah yaitu PT Graha Alam Industri.



Gambar 4.41 Pengelolaan Limbah Medis di Induk dan Wilker

j) Survei Leptospirosis dan Pengendalian Vektor Pada Kondisi Matra

Survei leptospirosis ini dilaksanakan pada bulan Desember 2024 di wilayah kerja Palabuhanratu Sukabumi. Survei ini dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan leptospirosis di Labkesmas Pangandaran dimana hasil positif ditemukan lebih dari 50% tikus di wilayah kerja Palabuhanratu. Berdasarkan teori, jika ditemukan positif leptospirosis pada 3 tikus, maka kemungkinan akan ada 1 kasus pada manusia. Atas dasar tersebut, BKK Bandung melalui tim kerja Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan melakukan survei leptospirosis pada ginjal tikus, lingkungan (sampel air dan tanah) serta melakukan surveilans pada orang dengan hasil rapid tes dinyatakan positif leptospirosis.

Dari hasil tersebut, ditemukan sampel positif pada lingkungan yaitu pada sampel tanah di area pelabuhan. Sedangkan pada air tidak ditemukan bakteri leptospira. Diduga tidak ditemukannya bakteri pada air diakibatkan tercampur dengan air laut dimana air laut mengandung garam yang mampu membunuh atau melemahkan bakteri. Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, dilakukan tindakan pengendalian terpadu yang dilaksanakan oleh tim BKK Bandung wilayah kerja Palabuhanratu bersama stakeholder diantaranya pihak PPN Palabuhanratu. Untuk media air, dilakukan pembubuhan kaporit di saluran yang menggenang.

Saluran pembuangan air limbah (SPAL) dilakukan pembongkaran dan penataan ulang. Perlu koordinasi lebih lanjut apakah dari tindakan tersebut mampu mengurangi potensi penyebaran leptospirosis atau tidak.

6) 4249.QAH.017 Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (5 Layanan)

a) Verifikasi Rumor/Investigasi dan Penanggulangan Penyakit Potensial KLB di Pintu Masuk/Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan ketika BKK Kelas I Bandung mendapatkan informasi adanya kasus suspek penyakit menular potensial wabah di pintu masuk atau dari Dinas Kesehatan maupun hasil pemantauan e-SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon). Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan ke instansi terkait (Dinas Kesehatan Kab/Kota) atau kunjungan ke lapangan bersama instansi terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sehingga dapat segera dilakukan upaya pengendalian. Kegiatan yang dilakukan berupa pengambilan data umum kasus suspek, hasil anamnesa sementara kasus suspek, serta upaya yang sudah dilakukan oleh lintas program/lintas sektor terkait.

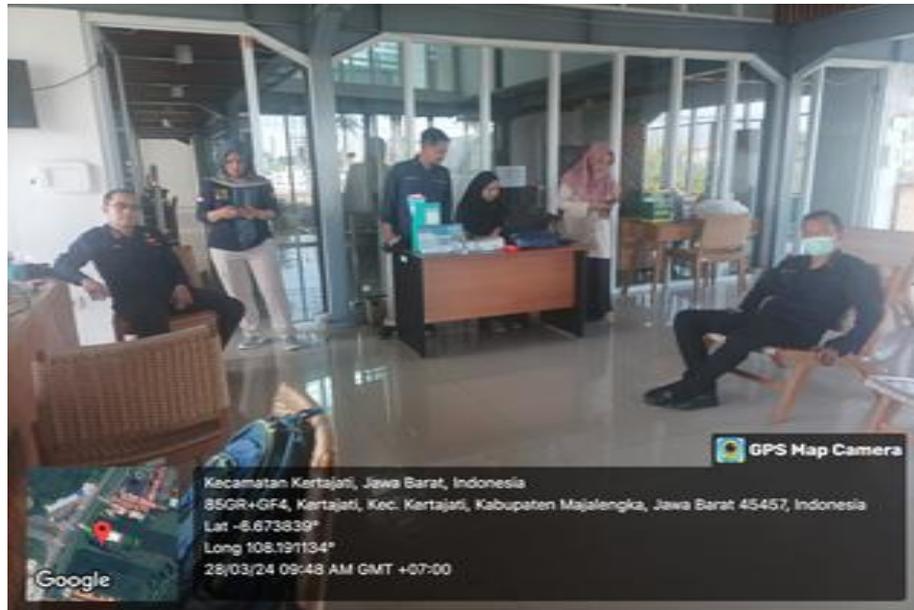
Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu: pada Bulan Januari (berupa verifikasi data berdasarkan pemantauan data e-SKDR minggu 1-2 tahun 2024 terkait kasus malaria, pneumonia, dan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor serta upaya tindak lanjut dari Dinkes setempat), Bulan Februari (berupa verifikasi data berdasarkan pemantauan data e-SKDR minggu 1-5 tahun 2024 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi terkait kasus demam tifoid, pneumonia, difteri, AFP, GHPR, serta informasi terkait surveilans jemaah haji pra embarkasi dari Dinkes setempat).



Gambar 4.42 Kegiatan Verifikasi Rumor Ke Dinas Kesehatan Sukabumi

Bulan Maret (berupa verifikasi rumor ke Wilker Kertajati terkait lonjakan kasus DBD di Puskesmas Sukamulya, faktor risiko penyakit diare, dan typhoid), Bulan April (berupa

verifikasi rumor wabah Covid di Cirebon), Bulan Oktober (berupa verifikasi rumor/investigasi dan penanggulangan penyakit potensial KLB di pintu masuk negara di Santosa Hospital Kopo, Bandung), dan Bulan November (berupa verifikasi rumor adanya kasus leptospirosis pada pedagang di TPI Palabuhan Ratu).



Gambar 4.43 Kegiatan Verifikasi Rumor ke Wilker Kertajati

b) Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah di Pintu Masuk/Wilayah

Kegiatan ini dilakukan ketika ada informasi ditemukannya kasus penyakit potensial KLB/wabah di wilayah kerja maupun kabupaten/kota di sekitar wilayah kerja yang sudah diverifikasi. Dengan dilakukannya penyelidikan diharapkan semua orang yang terpapar penyakit dapat terdeteksi dengan cepat sehingga kita dapat segera memutus mata rantai penularan. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan ke instansi terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota) atau kunjungan ke lapangan bersama instansi terkait untuk menelusuri informasi identitas dan klinis kasus, riwayat perjalanan penyakit, pelacakan kontak erat kasus, riwayat paparan serta mengidentifikasi dan pemetaan faktor risiko. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran epidemiologi wabah dan menjadi dasar dalam upaya penanggulangan wabah. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan Juli (berupa kegiatan PE atas laporan adanya kasus penyakit meningitis bakterialis pada petugas haji yang baru kembali di wilayah Kabupaten Cimahi), Bulan November (berupa PE terhadap kasus leptospirosis pada pedagang di TPI Palabuhan Ratu).



Gambar 4.44 Penyelidikan Epidemiologi terhadap kasus leptospirosis

c) Surveilans Epidemiologi dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk/Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan analisa data survey vektor dan binatang pembawa penyakit (DBD, pes, malaria, diare), data faktor risiko kesehatan lingkungan (sanitasi) di area buffer wilayah kerja, kemudian melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan atau puskesmas di area buffer untuk mencari data sekunder kunjungan penyakit potensi KLB/penyakit akibat vektor atau akibat faktor risiko kesehatan lingkungan. Selain itu, juga digali informasi upaya pengendalian yang telah dilakukan. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis sebagai bahan evaluasi mengenai efektivitas upaya pengendalian yang dilakukan dan perencanaan tindak lanjut apabila upaya pengendaliannya dinilai kurang efektif.

Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu: pada Bulan Januari (berupa Penguatan SE di pintu masuk dan SKDR melalui aplikasi SKDR online, penyeragaman data laporan dan koordinasi pengisian Sinkarkes dan pelaporan harian, serta ditemukannya 1 kasus campak di Kota Cirebon (status KLB) berdasarkan e-SKDR minggu 1-3 tahun 2024, pengawasan Nataru dan Bandara Kertajati) Bulan Februari (berupa SE dalam rangka deteksi FR penyakit menular di wilayah Wilker Palabuhan Ratu yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, skrining TB dan HIV yang diselenggarakan oleh BKK Bandung Wilker Palabuhan Ratu dengan RSUD Palabuhan Ratu), Bulan Maret (berupa SE dalam rangka deteksi FR penyakit menular di Wilker Cirebon yang dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi digitalisasi pemeriksaan kapal, kegiatan di Dinkes Subang bertujuan untuk berkoordinasi terkait persiapan surveilans operasional haji, penyusunan rencana kontinjensi pencegahan penyakit menular potensial wabah di Kab. Subang serta kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD, kegiatan sosialisasi digitalisasi pemeriksaan kapal), Bulan April (berupa koordinasi pengisian laporan surveilans, SINKARKES dengan kesiapan posko mudik di Wilker Cirebon), Bulan Mei (berupa SE dalam rangka deteksi FR penyakit menular di Asrama Haji Bekasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan inspeksi sanitasi lingkungan Asrama Haji), Bulan Juni (berupa SE dalam

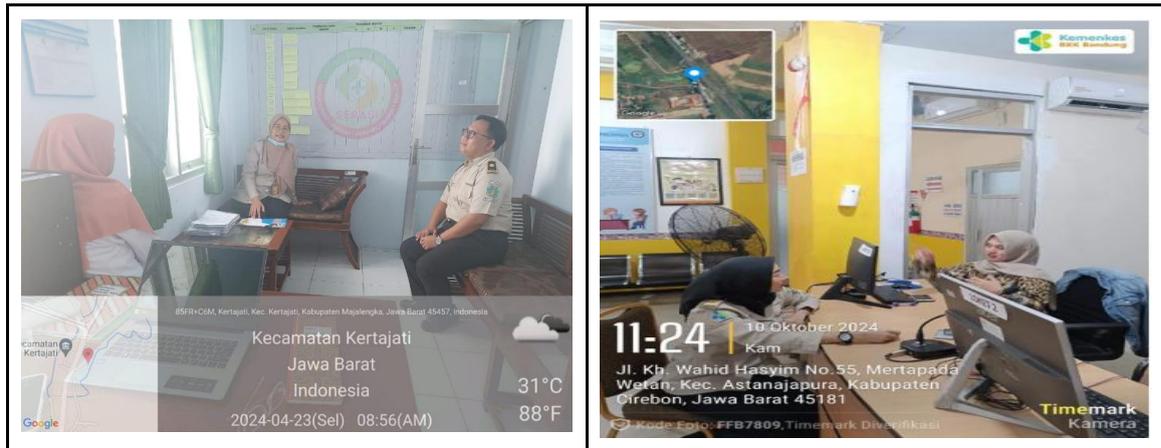
rangka deteksi FR penyakit menular di Batam berupa kegiatan pertemuan nasional SKDR), Bulan September (berupa Surveilans epidemiologi dalam rangka deteksi dini faktor risiko penyakit menular langsung di pintu masuk/wilayah di Wilker Patimban), Bulan Oktober (Surveilans epidemiologi dalam rangka deteksi dini faktor risiko penyakit menular langsung di pintu masuk/wilayah di Wilker Patimban, Palabuhan Ratu, dan Cirebon), Bulan November (berupa SE dalam rangka deteksi dini faktor risiko penyakit pada pelaku perjalanan internasional (jemaah umroh) dan e-SKDR di wilayah KBB dan Kota Cimahi), dan Bulan Desember (berupa SE dalam rangka persiapan pengawasan lalu lintas penumpang dan alat angkut Nataru).



Gambar 4.45 Surveilans Epidemiologi dalam rangka deteksi dini faktor risiko penyakit

d) Pengumpulan Data Surveilans Epidemiologi Penyakit di Pintu Masuk

Saat ini penyebaran penyakit dapat melebihi kecepatan masa inkubasi penyakit, sehingga di setiap pintu masuk negara (point of entry) harus mempunyai kemampuan yang baik dalam deteksi dini dan respon setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah maupun kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD) atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) salah satunya melalui pengumpulan data surveilans epidemiologi. Kegiatan ini dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data 10 (sepuluh) besar kunjungan penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat dari kesehatan/bandara terutama data penyakit menular. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkoordinasi dan mengunjungi fasyankes di wilayah buffer kesehatan/bandara. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat melihat tren penyakit atau masalah kesehatan yang ada di wilayah sekitar 79esehatan/bandara sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan kewaspadaan terhadap penyakit tertentu yang berpotensi menjadi wabah di pintu masuk. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai Desember yang merupakan kegiatan rutin bulanan wilker.



Gambar 4.46 Pengumpulan Data Surveilans Epidemiologi Penyakit di Pintu Masuk

e) Skrining dan evaluasi deteksi dini Penyakit VCT HIV/ AIDS

Perkembangan era globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi, menimbulkan dampak yang luas tidak saja pada arus informasi dan teknologi yang begitu pesat dan sangat terbuka, perubahan trend dan perilaku masyarakat yang semakin bebas. Seiring perkembangan dunia, maka akan berbanding lurus dengan terjadi peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara yang masuk dan keluar Indonesia. Berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan berbagai macam penyakit yang dapat dialami oleh setiap orang, sehingga memerlukan kewaspadaan dini dari semua pihak salah satunya penyakit HIV/AIDS. Pelabuhan/bandara merupakan tempat transit para penumpang maupun awak alat angkut di suatu negara atau daerah. Kemungkinan terkena risiko HIV AIDS cukup tinggi. Sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sehat diantaranya menumbuhkan risiko PMTS (Penyakit Menular Trans Seksual) di masyarakat tak terkecuali di lingkungan Pelabuhan/ bandara.

Kegiatan Skrining penyakit HIV di BKK Kelas I Bandung dilakukan di 5 Lokasi yaitu di Induk/Pos Bandara Husein, Bandara Kertajati, Wilker Cirebon, Wilker Indramayu, Wilker Patimban dan Wilker Palabuhanratu. Sasaran dari kegiatan skrining HIV ini yaitu pegawai atau petugas dipintu masuk negara, ABK, Petugas Bandara, Masyarakat yang ada di wilayah Bandara maupun Pelabuhan. Selain kegiatan skrining dilakukan kegiatan koordinasi dan evaluasi dengan Dinkes setempat untuk persiapan maupun laporan hasil kegiatan skrining. Kegiatan skrining dilakukan secara terpadu dengan pihak Puskesmas terdekat dikarenakan BKK Kelas I Bandung maupun Wilker belum punya akun SIHA yaitu laporan terkait HIV AIDS. Pada Tahun 2024 didapatkan 1 orang dengan suspek HIV diberikan rujukan untuk pemeriksaan darah dan 2 orang dengan resiko HIV diberikan edukasi.



Gambar 4.47 Skrining HIV – AIDS dan konsultasi Kesehatan

f) Skrining Deteksi Dini Penyakit TBC

Balai Kekarantinaan Kesehatan mempunyai kewajiban mengantisipasi terjadinya penularan penyakit di point of entry maupun antar daerah melalui penerbangan/pelabuhan. Salah satu langkah yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya penularan penyakit adalah melaksanakan deteksi dini terhadap kelompok faktor risiko. Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Bandung adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab secara teknis dan administratif kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI. BKK mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mencegah masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui suatu tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan.

Kegiatan skrining penyakit TBC di BKK Kelas I Bandung dilakukan di semua Wilker dan kantor Induk (Kantor Induk/Pos Bandara Husein, Wilker Kertajati, Wilker Cirebon, Wilker Indramayu, Wilker Patimban dan Wilker Palabuhanratu). Sasaran dari kegiatan skrining TBC ini yaitu pegawai atau petugas di pintu masuk negara, ABK, Petugas Bandara, Masyarakat yang ada di wilayah Bandara maupun Pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan cara mengumpulkan orang yang ada di area pelabuhan atau bandara dan dilakukan pemeriksaan langsung juga ke ABK dengan cara melakukan skrining di Kapal. dari hasil kegiatan bila ditemukan pasien yang terdeteksi atau dicurigai TB maka langsung dilakukan rujukan ke Puskesmas wilayah setempat untuk dilakukan pemeriksaan TCM. Pada Tahun 2024 didapatkan 19 orang dengan suspek TB diberikan rujukan untuk pemeriksaan dahak dan 21 orang dengan resiko TB diberikan edukasi.



Gambar 4.48 Kegiatan Skrining TBC di Wilayah Kerja Indramayu dan BIJB Kertajati

7) 4249.QAH.U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (1 Layanan)

Layanan kesehatan pada situasi khusus merupakan upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara melalui kegiatan deteksi dan respon terhadap faktor–faktor risiko yang mungkin berpengaruh pada masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan pada situasi khusus bencana, even nasional/internasional, keagamaan dan hari besar nasional. pada tahun 2024 kegiatan dilakukan pada saat arus mudik lebaran dan kewaspadaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). kegiatan diutamakan pada tanggal merah atau ketika cuti bersama dengan ketentuan lama jaga posko mudik maupun Nataru lebih dari 8 Jam. kegiatan lebih banyak dilakukan di wilayah kerja Bandara Kertajati yang melayani kegiatan penerbangan dan wilayah kerja Cirebon dalam pengawasan orang di jalur pantura Cirebon. Kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan Dinas Kesehatan setempat, Kepolisian, TNI, BPBD, Satpol PP, Otoritas bandara maupun Pelabuhan.



**Gambar 4.49 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Posko Nataru 2024-2025
di BIJB Kertajati – Majalengka**

8) 4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes (72 Layanan)

a) ATK Pemasangan Perangkap Tikus

Pembelian ATK untuk pemasangan perangkap tikus diantaranya yaitu pembelian kertas untuk print form survei dan form identifikasi. Kemudian pembelian papan dada untuk memudahkan dalam penulisan form survei, pulpen untuk menulis, penggaris untuk mengukur ciri kuantitatif tikus.

b) Persiapan Bahan dan Alat

Alat dan bahan yang dibelanjakan untuk kegiatan survei faktor risiko penyakit pes yaitu umpan, karung tikus, plastik, sisir, kertas stiker, kapas, timbangan, masker serta handscoon. Untuk umpan, biasanya setiap kegiatan pemasangan perangkap, akan dibelikan umpan berupa kelapa yang dibakar, keju, atau makanan lain yang sesuai dengan kebiasaan tikus menggigit makanan di lokasi pemasangan. Untuk karung tikus menggunakan karung goni berwarna putih dengan tujuan memudahkan untuk menemukan pinjal yang jatuh dari tubuh tikus.

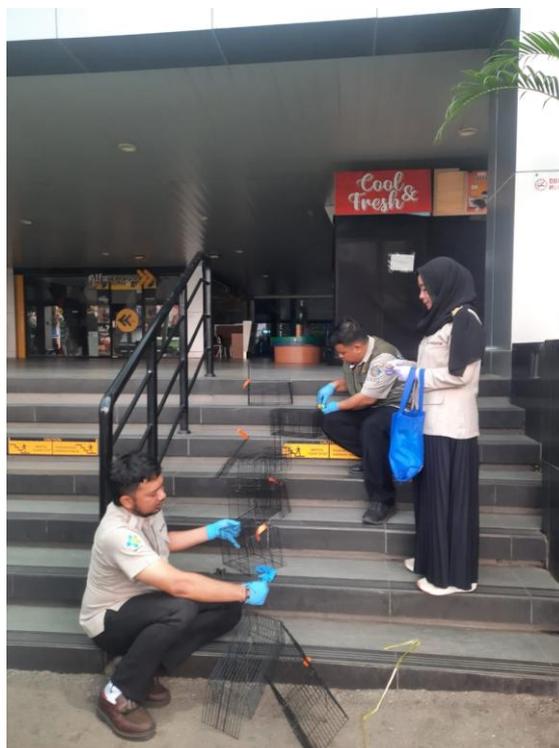
Plastik dibelikan plastik putih yang berfungsi untuk mematikan tikus dengan cairan chloroform. Sisir berfungsi untuk memisahkan pinjal yang ada dalam tubuh tikus. Kertas stiker digunakan untuk pelabelan sampel ginjal dan pinjal tikus. Timbangan digunakan untuk menimbang berat tikus. Masker dan handscoon yaitu Alat Pelindung Diri ketika kegiatan berlangsung baik saat pemasangan perangkap, identifikasi tikus maupun pengambilan sampel ginjal yang ada dalam tubuh tikus.

c) Pemasangan Perangkap

Pada tahun 2024, pemasangan perangkap tikus dilakukan di seluruh wilayah kerja BKK Bandung yaitu Bandara Husein Sastranegara Bandung, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Indramayu, Pelabuhan Patimban, Pelabuhanratu Sukabumi serta Bandara BIJB Kertajati Majalengka. Kegiatan pemasangan perangkap diawali dengan melakukan pemetaan untuk menentukan titik pemasangan perangkap sehingga kegiatan dapat berjalan dengan efektif efisien. Pemetaan dilakukan berdasarkan tangkapan tikus di tahun sebelumnya, adanya laporan keberadaan tikus, dan tanda-tanda jejak tikus.

Alat dan bahan yang harus disiapkan untuk pemasangan perangkap tikus yaitu perangkap tikus (single live trap), APD petugas (Handscoon, masker, sepatu, ID card, rompi), umpan tikus, surat tugas, form pemasangan perangkap. Pemasangan perangkap ini dilakukan selama 4 hari 4 malam, dimana setiap harinya hasil tangkapan akan dilakukan identifikasi.

Dari hasil survei vektor Pes pada tahun 2024, pemasangan perangkap telah dilaksanakan di seluruh wilayah kerja dengan jumlah pemasangan sebanyak 9 (sembilan) kali dalam 1 tahun. Total luas wilayah yang dilakukan kegiatan survei faktor risiko pes seluas 72 hektar (keseluruhan).



Gambar 4.50 Pemasangan Perangkap Tikus

d) Identifikasi Tikus dan Pinjal

Setelah tikus didapatkan dari lapangan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi tikus dan pinjalnya. Kegiatan ini penting untuk mengetahui jumlah dan jenis tikus yang tertangkap berikut dengan keberadaan pinjal yang menjadi inti dari penyebaran penyakit

Pes. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu APD personal, karung goni putih, chloroform, buku identifikasi, timbangan gram, jangka sorong, kapas, alkohol 70%, sisir serit serta plastik sampah. Identifikasi dilakukan terhadap ciri kualitatif yaitu warna rambut (punggung dan perut), bentuk hidung, bentuk tubuh serta tekstur rambut. Sedangkan ciri kuantitatif yaitu mengukur panjang badan, ekor, kaki belakang, telinga, berat badan, jumlah puting susu pada tikus. Dari hasil pengukuran tersebut dapat teridentifikasi jenis tikus yang didapatkan. Sebelum identifikasi dilakukan, biasanya tikus akan disisir untuk mengetahui jumlah pinjal.

Jumlah tikus yang didapatkan akan dihitung sebagai success trap, yaitu jumlah tikus yang tertangkap dibagi jumlah perangkap yang dipasang. Kemudian setelah itu menghitung jumlah pinjal yang didapatkan. Indeks pinjal yaitu jumlah pinjal yang diperoleh dibagi jumlah tikus yang didapat. Apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu (<1) maka kategori indeks pinjal minor, artinya tidak perlu melakukan pengendalian. Akan tetapi jika indeks pinjal lebih dari satu (>1) maka perlu dilakukan tindakan pengendalian yaitu dengan melakukan peracunan (poisoning), atau pendebuan (dusting).

Jumlah tikus yang didapatkan selama periode tahun 2024 dari seluruh wilayah kerja BKK Bandung didapatkan tikus sebanyak 319 tikus dengan jumlah terbanyak diperoleh di wilayah kerja Palabuhanratu Sukabumi dengan total tangkapan 117 tikus dan paling sedikit di wilayah kerja BIJB Kertajati Majalengka dengan 2 ekor tikus saja. Untuk Indeks pinjal secara keseluruhan selama 1 tahun tidak ditemukan indeks pinjal mayor, yang artinya potensi penyebaran penyakit pes rendah.



Gambar 4.51 Identifikasi Tikus dan Pinjal

9) 4249.QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (96 Layanan)

a) Survei Vektor DBD

Layanan survei 86eseha DBD merupakan survei yang difokuskan pada *breeding place* dari nyamuk *Aedes sp* terutama *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* yang menjadi 86eseha utama dan sekunder penularan penyakit DBD. Tempat perindukan 86eseha penyakit DBD biasanya disebut 86esehatan dikarenakan nyamuk *Aedes sp*. Berkembang biak dengan meletakkan telurnya pada wadah yang menampung air. Pada umumnya 86esehatan yang dimaksud adalah wadah yang dibuat manusia seperti bak mandi, ember, ban bekas, serta wadah 86esehat yang menampung air. Ada juga 86esehatan alamiah seperti tanaman yang menyimpan air seperti bromelia, tempurung kelapa, dan yang lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah kerja BKK Bandung dengan jangka waktu setiap bulan, sehingga dalam 1 tahun didapatkan 12 kali laporan survei 86eseha DBD. Dalam pelaksanaannya, survei ini dibantu oleh kader yang merupakan perwakilan masyarakat di 86esehatan atau bandara yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai. Data pada tahun 2024 menunjukkan terdapat wilayah kerja yang ditemukan keberadaan larva *Aedes sp*, yaitu di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Pelabuhan Cirebon, dan Palabuhanratu Sukabumi. Terlebih lagi di wilayah kerja Palabuhanratu Sukabumi selama 12 bulan tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan banyak 86esehatan yang tidak menetap yang ada disana. Contohnya yaitu perahu yang sudah lama tidak digunakan setiap bulan berbeda-beda, drum bekas penyimpanan ikan yang selalu berbeda setiap bulannya mengakibatkan larva *Aedes sp*. Selalu ditemukan.

Wilayah 86esehatan dan bandara harus menjadi zona steril dari risiko penyakit DBD, sehingga apabila ditemukan 1 (satu) saja perindukan, maka sudah dikategorikan tidak memenuhi syarat. Tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko penyebaran penyakit DBD ini diantaranya yaitu pembubuhan larvasida, yaitu insektisida berupa butiran granule yang mampu membunuh larva/ jentik nyamuk. Akan tetapi 86esehata ini akan menjadi sia-sia jika jenis 86esehatan yang digunakan sering dilakukan pembersihan, maka daya insektisida akan hilang ataupun 86esehatan alami dikarenakan insektisida akan diserap tanah.



Gambar 4.52 survei faktor risiko penyakit DBD

10) 4249.QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare (60 Layanan)

a) Survei Vektor Diare

Survei vektor diare diarahkan pada serangga lalat dan kecoa yang menjadi penyebab utama penyakit diare. Lingkungan pelabuhan dan bandara harus terbebas dari lalat dan kecoa, dikarenakan selain menjadi vektor penyakit, juga mengganggu estetika lingkungan bandara dan pelabuhan. Survei ini rutin dilakukan setiap bulan di seluruh wilayah kerja sehingga dalam 1 tahun akan didapatkan 12 laporan survei. Terdapat metode yang berbeda dalam melakukan survei diare. Untuk lalat, survei dilakukan dengan menggunakan alat fly grill dan terdapat rumus dan metode dalam menginterpretasikan data. Sedangkan untuk survei kecoa digunakan umpan lem yang akan dipasang selama 1x24 jam.

Untuk kategori kepadatan, survei lalat dan kecoa memiliki indeks yang sama dimana kepadatan baik lalat maupun kecoa tidak boleh lebih dari dua (>2). Jika indeks melebihi ambang batas, maka harus dilakukan tindakan pengendalian. Terdapat beberapa alternatif tindakan pengendalian, yaitu dengan cara residual spraying dengan penyemprotan insektisida, poisoning dengan menaburkan racun serangga, pemasangan lem agar vektor menempel pada media lem. Dari data tahun 2024, terdapat lokasi yang tidak memenuhi syarat untuk vektor kecoa, yaitu di Bandara Husein S. Bandung di bulan Januari, Maret serta Mei, dan pelabuhan Cirebon pada bulan Desember 2024. Sedangkan untuk vektor lalat, hasil bervariasi pada setiap wilayah kerja. Tetapi tindakan pengendalian selalu dilakukan dengan metode yang paling sering yaitu mengendalikan dengan poisoning yaitu pemberian insektisida granula yang akan membunuh lalat dalam hitungan 1-5 menit.

Gambar 4.53 Layanan survei faktor risiko penyakit diare



11) 4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (12 Layanan)

Pelaksanaan kegiatan skrining HIV AIDS dilakukan pada bulan Januari di BJB Kertajati, Februari di 88esehatan Palabuhan Ratu, Mei di 88esehatan Palabuhan Ratu dan Ujung Genteng, Juni di 88esehatan 88esehat, Juli di 88esehatan Kejawanan, Agustus di PLTU Sumur Adem Indramayu dan BJB Kertajati, Oktober di 88esehatan Palabuhan Ratu dan Kejawanan berbarengan dengan Hari Nelayan, 88esehata di area perimeter buffer Kantor Induk dan Bandara Husein. Pada skrining HIV Aids dilaksanakan dengan mengisi kuesioner dan pemeriksaan rapid HIV, yang dibantu dengan jejaring Puskesmas terdekat untuk penginputan SIHA dan rujukan. Pada Tahun

2024 didapatkan 1 orang dengan suspek HIV diberikan rujukan untuk pemeriksaan darah dan 2 orang dengan resiko HIV diberikan edukasi.



Gambar 4.54 Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS di Pelabuhan ratu

12) 4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB (9 Layanan)

Pelaksanaan kegiatan skrining TB dilakukan pada bulan januari di bijb kertajati, februari di kesehatan palabuhan ratu, mei di kesehatan palabuhan ratu dan ujung genteng, juni di Kesehatan, juli di kesehatan kejawanan, agustus di pltu sumur adem indramayu dan bijb kertajati, oktober di kesehatan palabuhan ratu dan kejawanan berbarengan dengan hari nelayan, kesehata di area perimeter buffer kantor induk dan bandara husein. Pada skrining TB dilaksanakan dengan mengisi kuesioner tanda gejala TB. Pada Tahun 2024 didapatkan 19 orang dengan suspek TB diberikan rujukan untuk pemeriksaan dahak dan 21 orang dengan resiko TB diberikan edukasi.



Gambar 4.55 Kegiatan Skrining TB di BIJB Kertajati

13) 4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan 89esehatan di pintu masuk (13 Paket)

- a) Pengadaan Media KIE Kesehatan Haji dan kegiatan hari besar nasional

Pengadaan Media KIE ini bertujuan sebagai media informasi untuk kegiatan situasi khusus haji. kesehatan Haji di Jawabarat merupakan Jamah paling banyak di Indonesia yaitu sebanyak 38.732 jemaah dengan layanan di 2 Embarkasi yaitu Embarkasi JKS di Bekasi dan Embarkasi KJT di Indramayu. Kegiatan haji menitikberatkan di kegiatan preventif yaitu pencegahan dimana diperlukan beberapa media KIE untuk penyebarluasan informasi. Media KIE yang dibuat berupa Spanduk pada kegiatan Embarkasi dan debarkasi sebanyak 5 lembar, Leaflet yang dibagikan ke sebanyak 5.100 lembar dan Roll Banner yang dipasang di 2 Asrama Haji dan Bandara Kertajati sebanyak 4 Buah. Kegiatan dilakukan pada Bulan Juni sampai dengan Agustus 2024.

- b) Pengadaan Media KIE Situasi Khusus hari raya besar nasional dan Posko Mudik Lebaran serta Tahun Baru

Pengadaan Media KIE ini bertujuan sebagai media informasi terkait Situasi khusus arus mudik/nataru dan kegiatan hari Besar nasional serta Bencana. Pada tahun 2024 media KIE yang dibuat yaitu untuk kegiatan, situasi Khusus Arus Mudik Lebaran, Media KIE Nataru, Media KIE HKN, media KIE Kesehatan kerja. Media KIE berupa Spanduk, Leaflet dan Roll Banner yang dibagikan ke 5 Wilker yaitu Kertajati, Patimban, Cirebon, Indramayu dan Palabuhanratu dengan rincian Spanduk dan Roll Banner sebanyak 2 buah untuk tiap Wilker dalam 2 kegiatan (arus mudik dan Nataru) dan leaflet sebanyak 500 lembar untuk 5 lokasi dalam 2 kegiatan (arus mudik dan Nataru). Pencetakan media KIE dilakukan sepanjang tahun 2024 tepatnya di Bulan April, Mei, November dan Desember 2024

- c) Pelayanan Klinik di Pintu Masuk Negara

Pelayanan klinik di bandara diantaranya pemeriksaan, pengobatan dan penerbitan surat laik terbang, surat ijin angkut orang sakit pada penumpang/ pelaku perjalanan. Pemeriksaan kesehatan pada air crew pesawat. Pemeriksaan, pengobatan dan penerbitan surat keterangan sehat pada non penumpang/ pegawai sekitar bandara. pelayanan klinik di pelabuhan diantaranya pemeriksaan, pengobatan pada ABK dan pegawai sekitar pelabuhan.



Gambar 4.56 Pelayanan Klinik di Pintu Masuk Negara

- d) Pengadaan APD, Alat dan Bahan Penunjang Kekarantinaan (APD Kegiatan Surveilans Epidemiologi Pada Situasi Bencana)

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan juga upaya deteksi dini penyakit melalui kegiatan surveilans epidemiologi di wilayah kerja pelabuhan maupun bandara. Selain itu, dalam beberapa situasi khusus petugas surveilans BKK Kelas I Bandung juga sering dilibatkan misalnya adalah adanya event baik lokal, nasional, maupun internasional, juga bencana. Hal ini dikarenakan pernah beberapa kali terjadi bencana seperti gempa dan banjir bandang di daerah Jawa Barat yang merupakan wilayah cakupan BKK Kelas I Bandung. Dalam melakukan tugas tersebut petugas memiliki risiko seperti tertular penyakit dan terjadinya kecelakaan. Untuk itu petugas perlu dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD).

APD ini akan digunakan oleh petugas selain dengan tujuan melindungi petugas dari faktor risiko kesehatan dan kecelakaan kerja selama bertugas, serta sebagai identitas petugas surveilans. Selain APD, juga dilakukan pembelian alat kesehatan berupa termometer infrared, masker dan handscoon. Alat kesehatan ini untuk kegiatan debarkasi haji. Handscoon ini diperuntukkan petugas BKK Kelas I Bandung dan juga lintas sektor yang bertugas yang melakukan kontak langsung dengan jemaah haji setelah keluar dari bus (Debarkasi JKS) dan keluar dari pesawat (Debarkasi KJT). Masker ini dibagikan kepada seluruh jemaah ketika turun dari bus bandara (untuk Debarkasi JKS), dan ketika baru keluar dari pesawat (untuk Debarkasi KJT). Tujuan dibagikannya masker kepada seluruh jemaah adalah untuk menghindari penularan dari jemaah yang sakit dan melindungi jemaah yang sehat dari tertular penyakit. Seperti pada umumnya terjadi setelah kepulangan dari Arab Saudi, tidak sedikit jemaah haji yang mengalami flu dan batuk yang agak berat. Kemudian pembelian thermometer infrared sebanyak 2 unit dimaksudkan untuk digunakan oleh 2 (dua) orang petugas yang stand by di thermal scanner pada saat kedatangan jemaah haji di Bandara Kertajati, sebagai alat bantu mengkonfirmasi atau validasi ulang ketika ada jemaah haji yang tertangkap suhu di atas 38°C oleh thermal scanner.

Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu: pada Bulan Maret (berupa pengadaan safety shoes sebanyak 30 buah dan jaket karantina 30 buah), Bulan Juli (berupa pengadaan sleeping bag sebanyak 6 buah, kantong jenazah sebanyak 30 buah, kaos sebanyak 30 buah, rompi bandara sebanyak 30 buah), Bulan September (berupa pengadaan kantong jenazah, tas peralatan), dan Bulan Desember (berupa Pengadaan kaos pengawasan kekarantinaan).

- e) Pengadaan Alat Pelindung Diri Dalam Rangka Penerbitan SSCC/ SSCEC

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja

pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melakukan tugas tersebut petugas memiliki risiko seperti tertular penyakit dan terjadinya kecelakaan. Untuk itu petugas perlu dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD). Dalam Kepdirjen No. HK.02.02/C/1401/2024 dijelaskan bahwa APD diperlukan dalam kewaspadaan wabah di pintu masuk negara. APD diperlukan untuk melindungi petugas dari bahaya fisik, kimia, biologi ataupun radiasi. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pada Bulan September (berupa pengadaan masker, handscoon, alkohol 70%), Bulan Oktober (berupa pengadaan kantong jenazah, tas peralatan), dan Bulan Desember (berupa pengadaan masker, handscoon).

f) *Boarding Kit* Dalam Rangka Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Kesehatan

UPT Bidang Kekarantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam Kepdirjen No. HK.02.02/C/1401/2024 dijelaskan bahwa beberapa perlengkapan diperlukan dalam kewaspadaan wabah di pintu masuk negara. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu: pada Bulan Januari (berupa pengadaan helm sebanyak 20 buah), Bulan Februari (berupa pengadaan pelampung sebanyak 15 buah), Bulan Maret (berupa pengadaan pelampung sebanyak 5 buah, earplug sebanyak 20 dus, tas boarding sebanyak 20 buah, clipboard sebanyak 20 buah, senter sebanyak 20 buah, jas hujan sebanyak 20 buah, kaca mata lapangan sebanyak 20 buah, shoes cover sebanyak 40 buah, wearpack sebanyak 20 buah), Bulan September (berupa pengadaan thermometer infrared), Bulan Oktober (berupa pengadaan masker, handscoon, dan alkohol 70%), dan Bulan Desember (berupa pengadaan jas hujan).

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) Boarding Kit Berupa Tas Boarding, Clipboard, Pelampung, dan Earplug TA 2024	SATUAN KERJA: BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG				
	NOMOR DAN TANGGAL SP: KN.01.03/8.1/ /2024 tanggal 14 Maret 2024				
	SUMBER DANA: DIPA BALAI KARKES KELAS I BANDUNG Nomor SP DIPA 024.05.2.415712/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan 4249.RAB.001.052.F.521211				
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : Muhammad Dani Suarman, SE Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Alamat : Jalan Cikapayang No.5, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung 40116 selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan ;					
Nama : CV. Cipta Derma Bangsa Alamat : Komp. Pesanggrahan Indah Blok 1 No. 12 Ujungberung Bandung.					
yang dalam hal ini diwakili oleh: Nani Nur'aeni selaku Direktur selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
No	Merk	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total (Rp)
1	Tas Boarding	20	unit	789.000	15.780.000
2	Clipboard	20	unit	28.000	560.000
3	Pelampung (Life Jacket)	5	unit	575.000	2.875.000
4	Earplug	20	box	324.900	6.498.000
Jumlah					25.713.000

Gambar 4.57 Bukti Surat Pesanan Boarding Kit – Pengadaan APD Th. 2024

g) Alat dan Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal dan Surveilans Epidemiologi Secara *Online*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung penerbitan dokumen kesehatan kapal secara online diperlukan ATK. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu: pada Bulan Januari (berupa pengadaan kertas HVS dan tinta printer), Bulan Februari (pengadaan ATK, maintenance box printer, keyboard dan mouse wireless), Bulan Juli (berupa pengadaan ATK pendukung penerbitan dokumen kesehatan secara online), Bulan Agustus (berupa pembelian cartridge printer Epson), Bulan September (berupa pembelian peripheral komputer, tinta printer, bahan pendukung penerbitan dokumen

kesehatan), Bulan Oktober (berupa pembelian tinta printer, ATK bahan pendukung penerbitan dokumen kesehatan), Bulan November (berupa pembelian ATK dan bahan pendukung penerbitan dokumen kesehatan), dan Bulan Desember (berupa pembelian ATK, lemari berkas, rak laci, SSD eksternal, alat cetak dokumen, dan lain-lain).

h) Media KIE untuk Diseminasi Informasi

Perjalanan penularan penyakit hingga menjadi wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB) bisa terjadi sangat cepat. Wabah/ KLB penyakit tersebut dapat menimbulkan korban yang tidak sedikit, dan tidak hanya itu dampaknya akan meluas hingga perekonomian, sosial politik dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya pencegahan penularan penyakit tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dilakukan dalam berbagai kegiatan kekarantinaan kesehatan. Informasi mengenai upaya kekarantinaan kesehatan, informasi faktor risiko kesehatan, serta upaya cegah tangkal keluar atau masuk penyakit perlu disampaikan dan disebarluaskan (diseminasi) kepada stakeholder, pengguna jasa dan masyarakat umum maupun di pelabuhan/ bandara. Dalam rangka penyebarluasan atau diseminasi informasi maka BKK Kelas I Bandung perlu menyediakan media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang pencegahan penularan penyakit menular tersebut. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pada Bulan September (berupa pengadaan roll banner, tripod dan barcode scan kedaruratan kesehatan terhadap MPox), Bulan Oktober (berupa pengadaan media KIE), dan Bulan Desember (berupa pengadaan kaos sablon KIE dan stiker leptospirosis).

i) Pengadaan Formulir Penerbitan Dokumen Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi

Kegiatan ini berupa penggantian formulir pengawasan pada alat angkut, orang, barang untuk didistribusikan ke seluruh wilayah kerja serta perlengkapan lain yang mendukung dalam pelaporan dan pengarsipan dokumen. Pada Tahun 2024, kegiatan ini berupa pengadaan formulir COP, PHQC, SSCC/ SSCEC dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Februari dan September.

j) Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor

Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor diadakan untuk mendukung kegiatan survei dan pengendalian vektor di lingkungan wilayah kerja bandara dan pelabuhan dalam lingkup pengawasan BKK Bandung. Adapun sarana prasarana yang dilakukan pengadaan yaitu pembelian insektisida vektor DBD, larvasida DBD, Insektisida Vektor Diare, Perangkap Kecoa, Racun Lalat, Racun Tikus serta Hygiene Swab.

Pembelian insektisida untuk vektor DBD yang dipilih masih dari golongan organofosfat yaitu insektisida dengan bahan aktif metil pirimifos 500 g/l dikarenakan insektisida golongan sintetik piretroid masih ditemukan menjadi terduga resistensi pada nyamuk khususnya di wilayah Jawa Barat. Untuk larvasida DBD masih dipercayakan kepada insektisida granule dari

golongan organofosfat dengan bahan aktif temephos 1% ukuran kemasan kecil 10 gram. Dari hasil uji resistensi larva nyamuk, temephos 1% masih terbilang efektif untuk membunuh larva/jentik nyamuk. Insektisida vektor diare yang digunakan adalah insektisida dengan kandungan fipronil 0,05% untuk mengendalikan vektor kecoa. Perangkap kecoa masih mengandalkan perangkap lem yang mengandung attractant yang dinilai masih sangat efektif dalam melakukan survei vektor kecoa.

Untuk racun lalat masih mengandalkan insektisida granule dengan kandungan bahan aktif thiamethoxam 10% yang sangat efektif mengendalikan populasi lalat dewasa. Racun tikus menggunakan insektisida dengan bahan aktif bromadiolon 0,05 % dengan prinsip racun lambat sehingga efektif dalam mengendalikan populasi tikus. Hygiene swab adalah alat rapid test untuk mengukur kadar kuman secara fotometrik pada sebuah objek. Prinsip kerja hygiene swab adalah menggunakan lidi kapas yang didalamnya sudah disiapkan media pengaya yang nantinya ketika dimasukkan ke dalam alat hygiene kit akan membantu membaca jumlah koloni bakteri.

Realisasi pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor di tahun 2024 telah tercapai sebesar 99,43% dengan nominal realisasi Rp 196.208.049. Realisasi dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu Februari 2024 (insektisida vektor DBD, larvasida, insektisida diare, perangkap kecoa), Maret 2024 (perangkap kecoa dan racun tikus), Juli 2024 (insektisida vektor DBD, larvasida, insetisida diare, racun lalat dan hygiene swab), Agustus 2024 (larvasida, perangkap kecoa dan racun lalat), September 2024 (insektisida DBDm larvasida, insektisida diare, racun lalat dan racun tikus), Oktober 2024 (Insektisida DBD, larvasida, perangkap kecoa, racun lalat). Pelaksanaan pengadaan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan arahan dari tim pengadaan dan pemasukan PNBPN sehingga dilaksanakan dengan cara bertahap. Pengadaan sarana prasarana pengendalian vektor ini didistribusikan dari kantor induk ke seluruh wilayah kerja BKK Bandung.

k) Alat Pelindung Diri Pengendalian Vektor

Dalam melakukan upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara terutama dari risiko penyakit tular vektor, petugas memiliki risiko seperti tertular penyakit dan terjadinya kecelakaan. Untuk itu petugas perlu dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD). Dalam Kepdirjen No. HK.02.02/C/1401/2024 dijelaskan bahwa APD diperlukan dalam kewaspadaan wabah di pintu masuk negara. APD diperlukan untuk melindungi petugas dari bahaya fisika, kimia, biologi ataupun radiasi. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu: APD sepatu safety dan tas peralatan direalisasikan pada bulan Maret 2024, Wearpack, masker dan handscoon pada bulan Agustus 2024. Anggaran untuk pengadaan ini terealisasi sebesar 98, 54%.

l) Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan

Kegiatan pengawasan sanitasi lingkungan memiliki risiko terjadinya penularan penyakit maupun kecelakaan dikarenakan langsung berhubungan dengan media lingkungan seperti air bersih, limbah cair, keamanan pangan, pengawasan tempat-tempat umum. Untuk itu dibutuhkan Alat Pelindung Diri (APD) personal untuk memproteksi diri dari segala macam bahaya, baik bahaya fisik, kimia, biologi, termasuk radiasi. Sarana dan prasarana sanitasi lingkungan terdiri dari Jaket, Face Mask, Gloves, Perangkap tikus, safety boot, bahan disinfeksi. Serta kaporit tablet.

Pada tahun 2024, realisasi pengadaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali. Pada bulan Maret dilaksanakan realisasi pengadaan berupa safety boot dan bahan disinfeksi, bulan Juli dilaksanakan realisasi untuk pengadaan bahan disinfeksi. Pada bulan Agustus dilakukan pengadaan berupa jaket, safety boot, bahan disinfeksi serta kaporit. Terakhir bulan September dilakukan pengadaan gloves dan kaporit. Realisasi anggaran yang terserap dari pengadaan ini mencapai 99,48%. Pengadaan ini didistribusikan ke seluruh wilayah kerja BKK Bandung dan sebagian ke asrama haji Bekasi dan Indramayu yaitu kaporit tablet dan bahan disinfeksi yang digunakan untuk kebutuhan pengawasan sanitasi embarkasi haji.

14) 4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan (16 Orang)

a) Mengikuti diklat, seminar, workshop Pelayanan Kesehatan Teknis Dokter, perawat, Pranata Laboratorium dan Tenaga Kesehatan Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi yang menunjang untuk memberikan pelayanan kesehatan, seperti:

- Pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* untuk perawat: Asep Saepulloh, Yusep, Dedeh, Nurul Ikhsan, Agus Widiyanto
- Seminar KONAS IX PERDOSPI 2024, *Navigating the Skies : Advancing Health and Safety in Aviation*: dr. Ardina, dr. Elly, Rishamdi



Gambar 4.58 Pelatihan BTCLS dan Seminar KONAS IX PERDOSPI

- b) Mengikuti diklat, seminar, workshop surveilans epidemiologi, kekarantinaan dan pelayanan kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelaksanaan uji kompetensi dan untuk menghadiri pertemuan Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK) bersama *Field Epidemiology Program (FETP) Indonesia* dan Perhimpunan Ahli Epidemiologi Nasional (PAEI). Pertemuan ini merupakan forum ilmiah bagi para mahasiswa, alumni FETP maupun tenaga ahli Epidemiologi Kesehatan untuk membahas peran penting para epidemiolog dan membahas berbagai perkembangan ilmu epidemiologi serta keberlangsungan FETP kedepan. Disamping itu, pertemuan ini juga merupakan sarana untuk menyampaikan kebijakan pemerintah dan upaya global dalam mengembangkan kebutuhan tenaga ahli epidemiologi lapangan dalam mendukung implementasi *International Health Regulations 2005* dan *Global Health Security Agenda (GHSA)*.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia profesional di bidang epidemiologi agar mampu untuk mencegah, mendeteksi dan merespon masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Output yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah pembaharuan dan peningkatan informasi peserta tentang strategi nasional, inisiatif dan aspek-aspek epidemiologi lapangan dalam praktek pengendalian

penyakit dan memperkuat peran Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) dalam penyelenggaraan program terutama di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Pada Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pada Bulan Januari dan Bulan Agustus (berupa mengikuti ujian kompetensi jabatan fungsional epidemiolog kesehatan), dan Bulan Oktober (berupa keikutsertaan dalam PIEN).



Gambar 4.59 Kegiatan 11th NSCE Yang diadakan di Hotel Haris Bandung, 20 - 23 Agustus 2024

c) Pelatihan *Basic Sea Survival*

Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan anggaran direvisi untuk kegiatan mengikuti diklat, seminar, workshop surveilans epidemiologi.

d) Mengikuti diklat, seminar, workshop sanitarian / entomolog kesehatan

Kegiatan ini direalisasikan dengan mengikuti workshop PCR pemeriksaan leptospirosis yang dilaksanakan di BBLKM Jakarta pada tanggal 19-20 Desember 2024. Workshop ini difokuskan pada pemeriksaan PCR untuk pemeriksaan sampel ginjal tikus dan tanah untuk pemeriksaan leptospirosis. Kegiatan ini diikuti oleh 4 orang tenaga entomolog kesehatan dan sanitarian di lingkungan BKK Kelas I Bandung.



Gambar 4.60 Kegiatan workshop PCR pemeriksaan leptospirosis

B. 4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) 4815.AEA.502 Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program (2 Kegiatan)

a. Kegiatan Koordinasi Evaluasi Program

Pelaksanaan kegiatan koordinasi evaluasi Kepala Balai berupa kegiatan konsultasi ke pusat, koordinasi ke wilayah kerja maupun undangan kegiatan lintas sektor/ lintas program pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Kegiatan rapat koordinasi direktorat P2P "Desk Sinkronisasi Data Pegawai di Lingkungan Ditjen P2P" di Kota Bekasi pada tanggal 16 - 19 Januari 2024
- Kegiatan rapat koordinasi teknis program P2P di Denpasar pada tanggal 6 - 8 Mei 2024
- Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) di BSD Tangerang pada tanggal 23-26 April 2024
- Kegiatan asistensi penyusunan rencana aksi, dialog kinerja dan logbook ke Kemenkes Jakarta pada tanggal 12 September 2024
- Kegiatan Pelatihan *executive health policy course* di Jakarta Pusat pada tanggal 2-3 September 2024
- Kegiatan tindak lanjut masalah kepegawaian ke Ditjen P2P Kemenkes, Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2024
- Kegiatan monev multimoda dan logistik di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2024
- Kegiatan koordinasi LS/LP program pendukung teknis P2P di Wilker Palabuhanratu, Sukabumi pada tanggal 19-20 November 2024
- Konsultasi program P2P ke pusat pada tanggal 9 Desember 2024



Gambar 4.61 Kegiatan koordinasi LS/LP program pendukung teknis P2P di Wilker Palabuhanratu, Sukabumi

b. Koordinasi Pelaksanaan Program

Kegiatan koordinasi pelaksanaan program P2P berupa kegiatan konsultasi ke pusat, koordinasi ke wilker maupun undangan kegiatan lintas sektor/lintas program pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Kegiatan koordinasi LS/ LP kepegawaian dan umum ke Wilker Cirebon dan Wilker Indramayu pada tanggal 9 Januari 2023
- Kegiatan koordinasi LS/ LP BMN di Wilker Indramayu dan menghadiri apel HUT KPLP di Pelabuhan Cirebon pada tanggal 30 Januari 2024
- Kegiatan koordinasi LS/ LP terkait tarif dan pagu PNBPN di Kota Cirebon pada tanggal 12 Februari 2024
- Kegiatan koordinasi LS/ LP BMN terkait pemeliharaan gedung wilker di Wilker Kertajati dan Indramayu pada tanggal 4-5 Maret 2024
- Kegiatan Optimalisasi Proses Absensi Pegawai koordinasi LS/ LP Kepegawaian dan Umum di Majalengka, Subang & Indramayu pada tanggal 19-20 Maret 2024
- Kegiatan koordinasi LS/ LP kepegawaian dan umum tentang memaksimalkan proses absensi face recognition di Kota Cirebon pada tanggal 22 Maret 2024
- Kegiatan koordinasi LS/ LP kepegawaian dan umum tentang memaksimalkan proses absensi *face recognition* di Wilayah kerja Plara pada tanggal 26-27 Maret 2024
- Kegiatan koordinasi LS/LP data dan informasi persiapan embarkasi haji Indramayu - Kertajati 2024 pada tanggal 7 Mei 2024
- Kegiatan rapat koordinasi kepegawaian di Ditjen P2P Tahun 2024 pada tanggal 26-29 Mei 2024
- Kegiatan koordinasi LS/ LP BMN di Asrama Haji Kertajati Indramayu (KJT) pada tanggal 22 Mei 2024
- Koordinasi LS/ LP perencanaan dan anggaran kegiatan pelayanan kesehatan embarkasi haji di Asrama Haji Indramayu pada tanggal 22 Mei 2024
- Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Advokasi dan Konfirmasi PLN Cirebon tanggal 13 Juni 2024
- Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi ASN tanggal 11 Juni 2024
- Kegiatan rekon pengembalian belanja dan sosialisasi penginputan nota dinas dan laporan perjalanan dinas pada aplikasi SINADI di Wilker Kertajati tanggal 4 Juli 2024
- Koordinasi LS/ LP terkait perencanaan di Wilker Kertajati tanggal 5 Juli 2024
- Kegiatan LS/ LP rapat koordinasi persiapan kedatangan haji tahun 1445 H/2024 M di BIJB Kertajati tanggal 21 Juni 2024
- Kegiatan rapat persiapan keberangkatan jemaah haji Embarkasi Kertajati (KJT) tahun 1445 H / 2024 M di Asrama Haji Indramayu tanggal 2 Mei 2024
- Kegiatan koordinasi kepegawaian dalam rangka pendampingan ujian dinas TK.I di Wilker Cirebon tanggal 29 Juli 2024
- Kegiatan koordinasi LS/ LP data dan informasi penyiapan sarana dan prasarana ujian dinas tahun 2024 di Kota Cirebon tanggal 29 Juli 2024

- Kegiatan interview calon PPNS dan rapat pembahasan SOP penanganan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Jakarta tanggal 12-13 Agustus 2024
- Kegiatan *coaching* SPIPT, PIPK, pemantauan SOP, kearsipan wilker, kepegawaian, perencanaan anggaran, keuangan dan BMN di Patimban dan Kertajati tanggal 29-30 Agustus 2024
- Kegiatan LS/ LP advokasi hukum terkait monitoring pelaksanaan ujian dinas di Kota Cirebon tanggal 29 Juli 2024
- Koordinasi LS/ LP data dan informasi terkait pemasangan QR code pada BMN dan cek fisik kendaraan rontgen di Kota Cirebon tanggal 19 Agustus 2024
- Koordinasi LS/ LP data dan informasi terkait verifikasi lapangan penghargaan bandar udara sehat tahun 2024 di Kab. Majalengka tanggal 24-25 Juli 2024
- Kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan revisi target dan pagu PNBP TA 2025 di Ditjen P2P Kemenkes tanggal 23 September 2024
- Kegiatan Undangan Pertemuan Sosialisasi Perbendaharaan Akhir Tahun Anggaran 2024 tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2024 di Grand Savero Hotel Bogor
- Kegiatan pertemuan target pagu PNBP tahun anggaran 2026 di Lingkungan Kemenkes di Bekasi tanggal 16-18 Oktober 2024
- Kegiatan rapat koordinasi pengelolaan organisasi dan SDM di Lingkungan Kemenkes ke Aston Convention Center Kota Bekasi tanggal 7-9 Oktober 2024
- Kegiatan LS/ LP pengadaan barang dan jasa di Bekasi tanggal 22 Oktober 2024
- Kegiatan koordinasi LS/ LP pengadaan barang dan jasa di Wilker Kertajati dan Indramayu tanggal 4 November 2024
- Konsolidasi penyusunan serta desk PIPK Ditjen P2P TA 2024 tingkat satuan kerja kantor pusat dan UPT di Hotel Horison Bekasi tanggal 20-21 November 2024
- Kegiatan LS/ LP pengadaan barang dan jasa di Jakarta tanggal 14 November 2024
- Koordinasi LS/ LP pengadaan barang dan jasa di Wilker Kertajati tanggal 25 November 2024
- Koordinasi pemantauan dan pelaporan administrasi umum program P2P di Kota Yogyakarta tanggal 11-14 Desember 2024
- Koordinasi dukungan informasi kepegawaian BKK Bandung ke Jakarta tanggal 24 Desember 2024
- Koordinasi LS/LP perencanaan, SAKIP dan reformasi birokrasi di Wilker Cirebon tanggal 31 Desember 2024
- Kegiatan koordinasi LS/LP Perencanaan terkait target pagu PNBP di BIJB Kertajati tanggal 24 Desember 2024
- Koordinasi LS/LP perencanaan, SAKIP dan reformasi birokrasi di Wilker Indramayu tanggal 30 Desember 2024

- Kegiatan koordinasi LS/LP perencanaan, SAKIP dan reformasi birokrasi di Kab. Subang tanggal 30 Desember 2024
- Kegiatan koordinasi LS/LP pengadaan barang dan jasa di Wilker Cirebon tanggal 31 Desember 2024
- Koordinasi LS.LP penyusunan RPD 2025 dan pengelolaan keuangan di Wilker Patimban tanggal 30-31 Desember 2024



Gambar 4.62 Kegiatan *coaching* SPIPT, PIPK, pemantauan SOP, kearsipan wilker, kepegawaian, perencanaan anggaran, keuangan dan BMN di Patimban dan Kertajati

2) 4815.EBA.956 Layanan BMN (4 Layanan)

a. Laporan Penyusunan BMN

Kegiatan ini meliputi Rekonsiliasi dan Penyusunan BMN Tahun 2023 pada tanggal 23-26 Januari 2024 di Kota Bekasi dan penyusunan laporan BMN UAPPA/B E-1 Ditjen P2P Triwulan III TA 2024 di Hotel Harris Kota Bekasi pada tanggal 15 - 18 Oktober 2024



Gambar 4.63 penyusunan laporan BMN UAPPA/B E-1 Ditjen P2P

b. Penghapusan dan Pemusnahan BMN

Kegiatan ini meliputi Koordinasi dan konsultasi kepada KPKNL Bandung dalam rangka kegiatan pra penghapusan barang yang akan di hapus. Selain itu juga konsultasi penghapusan yang berhubungan dengan pengelolaan BMN yang memenuhi peraturan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 Tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN meliputi:

- Kegiatan penghapusan dan pemusnahan BMN barang persediaan selain tanah dan/atau bangunan di Kantor Induk Balai Karkes Kelas I Bandung pada tanggal 19 Januari 2024,
- Kegiatan Bimtek tentang implementasi aplikasi BMN "SIMAN V2" di KPKNL Bandung pada tanggal 26-28 Juni 2024,
- Kegiatan rekon dan stok opname BMN ke Wilker Kertajati pada tanggal 4 Juli 2024
- Konsultasi dan menyampaikan surat permohonan lelang ke KPKNL Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2024,
- Kegiatan penetapan lelang BMN Balai Karkes Kelas I Bandung di Kota Cirebon pada tanggal 2 September 2024,
- Koordinasi untuk menerima salinan risalah lelang mobil rontgen ke KPKNL Cirebon pada tanggal 3 September 2024,

- Kegiatan sosialisasi inventarisasi BMN dan pemanfaatan BMN oleh KPKNL Bandung tanggal 20 Desember 2024



Gambar 4.64 Pemusnahan BMN Selain Tanah dan Bangunan

c. Penyelesaian masalah BMN

Kegiatan dilakukan dengan Konsultasi pengelolaan barang milik negara ke pusat selama tahun 2024 meliputi :

- Konsultasi laporan keuangan dan BMN audited terkait prosedur analitis BPK dan Triwulan I Tahun 2024 ke pusat pada tanggal 21 Maret 2024
- Kegiatan penyelesaian masalah BMN di Biro Keuangan dan BMN Kemenkes RI tanggal 28 November 2024
- Koordinasi dan penyelesaian masalah pengelolaan BMN di Seditjen P2P Kemenkes RI Jakarta tanggal 31 Desember 2024.



Gambar 4.65 Koordinasi dan penyelesaian masalah pengelolaan BMN di Seditjen P2P

d. Penyusunan RKBMN.

Kegiatan Penyusunan RKBMN dilaksanakan dengan menghadiri undangan dari pusat dalam rangka penyusunan RKBMN. Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan

keadaan yang sedang berjalan sebagai data dalam melakukan tindakan yang akan datang. kegiatan meliputi pertemuan reviu rencana kebutuhan BMN (RKBMN) TA 2026 Ditjen P2P Kemenkes di Hotel Horison Ultima Bekasi tanggal 30-31 Oktober 2024.



Gambar 4.66 Pertemuan reviu Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) TA 2026

3) 4815.EBA.957 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P (3 Layanan)

Kegiatan Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P dilakukan ke pusat dan lintas sektor/lintas program pada tahun 2024 antara lain :

a. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (51A)

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebagai pemberi jasa pelayanan kepada masyarakat terkadang menerima masukan dan saran dari masyarakat mengenai jasa yang sudah diberikan. Masukan dan saran ini perlu dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga sering ditemui beberapa masalah yang harus segera diselesaikan sehingga perlu dibuat tim untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah. Dalam pengaduan masyarakat dan WBS yang diterima, Balai Kekarantinaan

Kesehatan Kelas I Bandung melaksanakan rapat internal dan konsultasi Dumas ke Pusat. Kegiatan dimaksudkan untuk konsultasi mengenai penanganan pengaduan masyarakat yang telah terjadi dan ataupun solusi pengaduan masyarakat yang akan terjadi. BKK Bandung berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang timbul terhadap pelayanan yang diberikan salah satunya dengan berkonsultasi dan berkoordinasi permasalahan atau tanggapan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diterima dengan bagian Hukormas P2P terkait pengaduan masyarakat.

- Perjalanan dinas luar kota oleh 1 petugas a.n dr. Nadindra Madhyasta kegiatan konsultasi terkait penanganan pengaduan masyarakat dan Whistleblowing System ke Inspektorat Jenderal Kemenkes RI tentang pada tanggal 2 April 2024. Konsultasi penanganan pengaduan masyarakat dan Whistleblowing System ke pusat (Itjen) telah dilakukan pada tanggal 2 April 2024 sebanyak 1 kali.



Gambar 4.67 konsultasi terkait penanganan pengaduan masyarakat dan Whistleblowing System

b. Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) (51B)

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan. UPG menerima laporan gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait.

- Perjalanan dinas a.n Fitri Mayawati, SKM kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke wilayah kerja Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) pada tanggal

26 Maret 2024



Gambar 4.68 kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke wilayah kerja Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati)

- Perjalanan dinas a.n Fitri Mayawati, SKM kegiatan Konsultasi terkait Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke Inspektorat Jenderal Kemenkes RI pada tanggal 2 April 2024.



Gambar 4.69 kegiatan Konsultasi terkait Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke Inspektorat Jenderal

- Perjalanan dinas luar kota oleh 1 petugas a.n Nuni Nurbayani kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke wilayah kerja Pelabuhan Laut Cirebon pada tanggal 14 Oktober 2024.



Gambar 4.70 kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi ke wilayah kerja

- Perjalanan dinas dalam kota oleh 2 petugas a.n Fitri Mayawati, SKM dan Nuni Nurbayani kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) ke Bandara Husein Sastranagara Kota Bandung pada tanggal 22 November 2024.



Gambar 4.71 kegiatan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)

c. Advokasi Hukum dan Bantuan Hukum (51C)

Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan yang memberikan bantuan hukum dan pembinaan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokasi hukum dapat dilakukan

melalui: Penelaahan dan pengkajian masalah hukum, Fasilitasi dan penguatan penanganan masalah hukum, Inventarisasi dan yurisprudensi masalah hukum. Advokasi hukum dapat membantu melindungi hak-hak orang yang mungkin diabaikan. Advokat sering menjadi satu-satunya dukungan independen yang diterima orang-orang di beberapa momen paling menantang dalam hidup mereka. Dengan adanya permasalahan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kekarantinaan kesehatan, perlu pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan BKK Bandung. bahwa pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan BKK Bandung diberikan untuk menghadapi permasalahan hukum yang timbul sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta kelancaran berkoordinasi dalam pelaksanaan advokasi hukum, perlu pengaturan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan BKK Bandung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan konsultasi ke pusat mengenai mekanisme pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum yang perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran hukum di ruang lingkup BKK Bandung.

- Perjalanan dinas luar kota oleh 3 petugas a.n Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM, Nurul Afifa, S.Si.T, M.Keb., MH.Kes dan Rahmawati Jati Murwani kegiatan Konsultasi terkait Advokasi Hukum dan Bantuan Hukum ke Hukormas Setditjen P2P Kemenkes RI pada tanggal 1 Oktober 2024.



Gambar 4.72 kegiatan Konsultasi terkait Advokasi Hukum dan Bantuan Hukum ke Hukormas Setditjen P2P

- Perjalanan dinas dalam kota oleh 2 petugas a.n Nurul Afifa, S.Si.T, M.Keb., MH.Kes dan dr. Nadindra Madhyastha kegiatan Koordinasi hukum ke Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tanggal 22 November 2024.



Gambar 4.73 kegiatan Koordinasi hukum ke Dinas Kesehatan Kota Bandung

- Perjalanan dinas dalam kota oleh 3 petugas a.n Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM, Rahmawati Jati Murwani dan Ayu Retno Setyowati kegiatan Koordinasi hukum ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 November 2024



Gambar 4.74 kegiatan Koordinasi hukum ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

4) 4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pelayanan Humas dan Protokoler (2 Layanan)

Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pelayanan Humas dan Protokoler dilakukan ke pusat dan lintas sektor/lintas program pada tahun 2024 antara lain :

a. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (51A)

Implementasi keterbukaan informasi publik dapat dilakukan dengan berbagai langkah seperti membuat peraturan, membentuk tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), mengalokasikan anggaran dan menyediakan ruang khusus, petugas khusus yang melayani informasi publik, mengumumkan informasi publik melalui website, melakukan update informasi melalui website dan media sosial, dan melayani permohonan informasi

publik melalui tatap muka dan daring. sehingga setiap informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna dan Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi dan dokumentasi pada setiap Badan Publik di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di instansi. BKK Bandung telah memiliki tim PPID sejak tahun 2023, untuk mengimplementasikan keterbukaan publik maka perlu dilakukan kegiatan keterbukaan dan keamanan informasi publik ke wilayah kerja sehingga penyebaran informasi mengenai tugas PPID semakin diketahui oleh pegawai wilayah kerja.

- Perjalanan dinas a.n Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM dan Nurul Afifa, S.Si.T, M.Keb., MH.Kes kegiatan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kemenkes tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 2 April 2024.



Gambar 4.75 kegiatan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kemenkes tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

- Perjalanan dinas a.n Ayu Retno Setyowati kegiatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Wilker Pelabuhan Laut Cirebon tanggal 14 Oktober 2024.



Gambar 4.76 kegiatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Wilker Pelabuhan Laut Cirebon

b. Desiminasi/Promosi Informasi Kegiatan Melalui Penyusunan Media KIE (Layanan Humas) (51B)

Penggunaan media sosial di masyarakat yang terus berkembang saat ini semakin banyak dimanfaatkan berbagai pihak termasuk instansi pemerintahan. Penggunaan dan penyebaran informasi yang mudah lewat media sosial seperti foto, video, perekaman suara, dll membuat banyak penggunanya betah menghabiskan banyak waktu untuk menikmati dan membuat banyak konten. Adanya internet membuat jarak dan waktu jadi tidak berarti. Banyak yang menggunakan media sosial ini sebagai media penyampaian informasi, kolaborasi, hingga promosi. Transparansi dan kecepatan membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah serta dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi konten yang dibuat oleh instansi tersebut. Media sosial itu sebenarnya bukan hanya WhatsApp, Facebook, Twitter ataupun Instagram. Semua konten, ide, pemikiran dan komunikasi yang dilakukan secara *online* juga dapat didefinisikan sebagai media sosial.

Dalam pengelolaan media sosial, konten merupakan salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan. Penyusunan strategi komunikasi dan publikasi media sosial yang teragenda merupakan hal yang perlu dilakukan secara berkala oleh pengelola media sosial. Pengelola juga perlu memperhatikan tren, tema, serta waktu dalam membuat dan mempublikasikan konten. Penyusunan dapat dilakukan dengan kolaborasi dengan akun-akun

terkait. sehingga bila mampu menyuguhkan konten yang dibutuhkan oleh masyarakat niscaya akan diperoleh respon yang baik bagi instansi pemerintahan itu sendiri. dengan adanya Tim PPID di BKK Bandung diharapkan masyarakat semakin mengenal BKK Bandung. untuk mencapai tujuan itu salah satu kegiatan yang dilakukan tim PPID adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk berkreasi dalam penyusunan media KIE yang akan diterbitkan dalam konten Website dengan cara pembuatan artikel yang dilakukan oleh 32 orang masing-masing 1 halaman.



Gambar 4.77 Rapat penyusunan media KIE

5) 4815.EBA.960.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (5 Layanan)

a. Review Penyusunan Analisis Beban Kerja

Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu. Kegiatan penyusunan peta dan informasi jabatan di BKK Kelas I Bandung berupa koordinasi ke wilker sebanyak 2 kali pada tahun 2024 meliputi :

- Kegiatan reuiu penyusunan analisis beban kerja (ABK) di Wilker Palabuhanratu pada tanggal 28-29 November 2024
- Kegiatan pelayanan analisis beban kerja (ABK) di Wilker Indramayu pada tanggal 27 Desember 2024



Gambar 4.78 Kegiatan reviu penyusunan analisis beban kerja (ABK) di Wilker Pelabuhanratu

b. Penyusunan Peta dan Informasi Jabatan

Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Maksud penyusunan peta jabatan adalah menggambarkan struktur kewenangan tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan, memperoleh informasi jabatan secara tepat dan akurat dan memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kebutuhan ASN dalam struktur organisasi. Kegiatan penyusunan peta dan informasi jabatan di BKK Kelas I Bandung berupa rapat internal sebanyak 1 kali pada tahun 2024 dengan mengundang narasumber dari BKN Kanreg III pada tanggal 31 Desember 2024.



Gambar 4.79 Kegiatan penyusunan peta dan informasi jabatan

c. Penyusunan monev SOP AP KKP

Reformasi birokrasi, salah satu area perubahan yaitu penataan tatalaksana, mensyaratkan adanya monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP) setiap tahun. SOP AP merupakan proses bisnis yang jelas dalam suatu prosedur yang standar yang disusun dalam rangka mewujudkan salah satu program pemerintah yaitu komitmen untuk melakukan pelayanan publik yang berkualitas (prima), memuaskan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Monev SOP AP merupakan bagian rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan, sehingga penerapan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan SOP AP benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui mana SOP AP yang perlu dilakukan revisi/penyusunan SOP baru dan SOP yang sudah tidak relevan/berlaku lagi.

Salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring SOP AP yaitu melakukan pencetakan SOP AP yang sudah direview oleh Tim Penyusun SOP dan Tim SKI, perlu dilakukan pencetakan SOP AP untuk dibagikan ke wilayah kerja BKK Bandung sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam segala pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKK Bandung. Adapun SOP AP yang dicetak merupakan SOP AP yang telah direvisi dan telah dilakukan pembaharuan. Kegiatan Monitoring SOP AP dilakukan melalui rapat evaluasi monev SOP AP dengan berupa pencetakan buku SOP AP sebanyak 1 paket dan rapat evaluasi monev SOP AP dilakukan pada tanggal 28-29 November 2024 sebanyak 25 paket.



Gambar 4.80 Paparan Penanganan Konflik Kepentingan Oleh Tim Kerja Hukormas Setijen P2P di Ruang Rapat BKK Kelas I Bandung Tanggal 28 November 2024



Gambar 4.81 Rapat Kegiatan SOP AP BKK Kelas I Bandung

d. **Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK**

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mendorong seluruh Unit Kerja melaksanakan pembangunan Zona Integritas sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kesehatan. Dalam rangka menerapkan WBK di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu dengan membentuk tim zona integritas, menginventarisir data dukung indikator penilaian

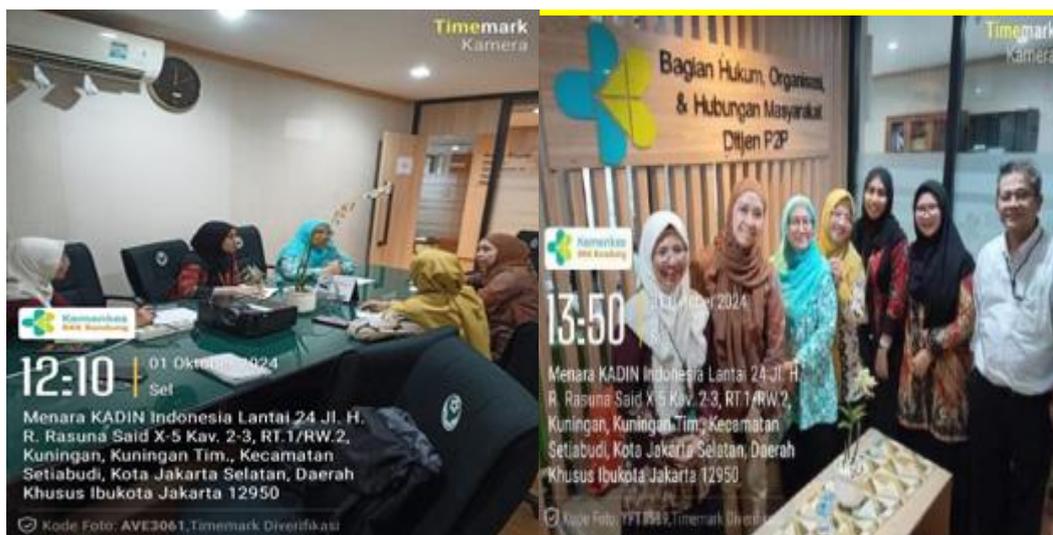
WBK dan fasilitasi persiapan dan penilaian WBK.

- Perjalanan dinas luar kota oleh 1 petugas a.n Ayu Retno Setyowati kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK ke Pos Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada tanggal 26 Maret 2024 membahas tentang perubahan substansi menjadi tim kerja di BKK Bandung.



Gambar 4. 82 Rapat kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK ke Pos Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati

- Perjalanan dinas luar kota oleh 2 petugas a.n Fitri Mayawati, SKM dan dr. Nadindra Madhyastha kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK pada tanggal 1 Oktober 2024 membahas persiapan pendampingan Assessment Penilaian Satker WBK/WBBM dan Coaching SKI/SPIPT.



Gambar 4.83 Konsultasi kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK

e. **Reviu Data Klasifikasi KKP**

Kegiatan Reviu Data Klasifikasi KKP di BKK Kelas I Bandung berupa rapat internal di kantor induk BKK Kelas I Bandung untuk menyamakan atau mereviu kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam klasifikasi KKP tersebut yang sudah terlaksana, kegiatan berupa pembelian konsumsi snack kegiatan Reviu Data Klasifikasi KKP (Layanan Organisasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi) tanggal 9 Desember 2024.



Gambar 4.84 kegiatan Reviu Data Klasifikasi KKP

6) 4815.EBA.962.Layanan Umum (6 Layanan)

a. **Pengelolaan Kantor Berhias**

Gerakan Kantor Berhias disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) tentang Gerakan Kantor Berhias di lingkungan Kemenkes yang ditetapkan pada 27 Maret 2018. Gerakan ini bertujuan mendorong pegawai pada lingkungan kerjanya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta peduli lingkungan. Kegiatan pengelolaan kantor berhias di BKK Kelas I Bandung berupa pembelian stiker dan media KIE berhias dan perawatan taman dalam rangka berhias di kantor induk dan wilker dengan rincian sebagai berikut:

- Pembelian tanaman hias di Wilayah Kerja Pelabuhan Patimban bulan April 2024
- Pembelian bunga meja di kantor induk BKK Bandung
- Penggantian logo KKP menjadi BKK dan stiker oneway pintu di Wilker Patimban
- Pembelian karangan bunga di Wilker Kertajati bulan November 2024
- Perawatan taman dalam rangka berhias Wilker Kertajati

b. **Penyusunan Rencana Umum Pengadaan**

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilaksanakan agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat segera di eksekusi oleh pejabat pengadaan maupun Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. Kegiatan penyusunan RUP TA. 2024 di BKK Kelas I Bandung berupa Kegiatan koordinasi RUP dan e-katalog versi 6.0 di Jakarta Selatan pada tanggal 24 Desember 2024.

c. Layanan Aplikasi Meeting Berbayar

Kegiatan Layanan Aplikasi Meeting Berbayar di BKK Kelas I Bandung berupa Langganan Akun Zoom/hosting lainnya, Langganan Akun Google Drive/hosting lainnya dan Pembelian Lisensi Ms. Office Original untuk keperluan perkantoran selama satu tahun meliputi :

- Langganan Akun Zoom/hosting lainnya berupa Biaya langganan cloud 2 cCPU dan domain renewal bkkbandung.net
- Langganan Akun Google Drive/hosting lainnya berupa Biaya langganan google workspace business standard bkkbandung.net
- Pembelian Lisensi Ms. Office Original berupa Pembelian lisensi microsoft 365 family allNg sub PK Lic 1YR Online

d. Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan pengelolaan barang dan jasa tahun 2024 berupa pembelian ATK, konsultasi ke pusat dan kegiatan survei pasar / klarifikasi atau pembuktian kualifikasi saat proses lelang meliputi :

- Kegiatan survei dan koordinasi pengadaan barang dan jasa di Wilker Kertajati tanggal 20 Maret 2024
- Koordinasi pengadaan barang dan jasa di Wilker Cirebon tanggal 20 September 2024
- Koordinasi satpel 5 Jabar terkait kontrak pengadaan kendaraan ambulans di Tangerang Selatan tanggal 26 November 2024
- Kegiatan koordinasi pengadaan barang dan jasa di Wilker Indramayu tanggal 20 Desember 2024
- Koordinasi teknis pengadaan barang dan jasa di Pos Pelabuhan Patimban tanggal 27 Desember 2024
- Kegiatan koordinasi teknis PBJ ke Wilker Patimban tanggal 30 Desember 2024
- Belanja bahan dokumen pemilihan dan kontrak berupa pembelian kertas HVS



Gambar 4.85 Koordinasi satpel 5 Jabar terkait kontrak pengadaan kendaraan ambulans

- e. Sewa Rumah Dinas Pimpinan dan Kantor
 - Sewa Rumah Dinas Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung TA 2024 sesuai BAST No BJ.01.03/8.1/014/2024 2 Januari 2024, BAP BJ.01.03/8.1/015/2024 tanggal 2 Januari 2024
 - Biaya sewa kendaraan operasional periode Januari 2024
- f. Keperluan Perkantoran dan Belanja Operasional Lainnya

Kebutuhan Langganan Internet Pos an Wilker sebanyak 6 Wilker serta Langganan Internet Induk dan Stelan Dinas Pegawai sebanyak 83 orang berupa :

 - Pembayaran belanja barang Internet Service Provider Kantor Induk Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung 2024 Bulan Januari - Desember 2024
 - Biaya langganan jasa internet wilker dan pos bulan Januari - Desember 2024
 - Biaya keperluan perkantoran triwulan IV tahun 2024 kantor induk dan wilker
 - Pembayaran belanja barang sekaligus Pakaian Dinas Pegawai BKK Kelas I Bandung TA 2024 sebanyak 83 stel tanggal 2 Desember 2024

7) 4815.EBA.963.Layanan Data dan Informasi (1 Layanan)

- a. Penyusunan Profil dan Media KIE

Profil merupakan grafik atau ikhtisar yg memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Profil bertujuan memberikan gambaran/informasi kepada pembaca tentang kegiatan dan hasilnya pada tahun yang bersangkutan atau perbandingan/trend dengan tahun sebelumnya. Media merupakan salah satu alat bantu penyampaian informasi. Tujuan dari pembuatan media salah satu diantaranya sebagai media informasi yang mencerahkan bagi pembacanya. Beberapa

media yang dicetak yaitu media KIE informasi BKK dengan poster akrilik, pencetakan laporan tahunan, profil, RAK dan Media implementasi WBK/WBBM berupa akrilik, poster, leaflet, XBanner, dll. Media KIE Implementasi WBK/WBBM diperuntukkan dalam rangka dukungan kegiatan WBK WBBM dari tiap. Berbagai macam media yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya BKK dalam rangka meraih WBK/WBBM. kegiatan Penyusunan Profil dan Media KIE dilaksanakan meliputi :

- Media KIE Balai Kekarantinaan Kesehatan berupa cetak backdrop, pembuatan poster tata tertib kunjungan Balai Karkes Bandung, backdrop quotes, pedoman matrix pembagian peran hasil Balai Karkes Kelas I Bandung, wallpaper ruang adum, wallpaper ruang podcast, spanduk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PPPK, backdrop mihrab, backdrop musola, poster hukdis, poster ber-AKHLAK dan roll banner tarif PNBK, piagam penghargaan penyelenggaraan ibadah haji di Bandara Kertajati 1445 H / 2024 M, roll banner anti korupsi, spanduk dan poster maklumat pelayanan, backdrop lantai 5, poster komitmen integritas, huruf timbul dan logo Kemenkes, stiker ambulan logo dan huruf Kemenkes dan Saka Bakti Husada, WBK dan standar pelayanan BKK Kelas I Bandung TA 2024
- Media KIE Balai Kekarantinaan Kesehatan berupa pembuatan poster bendera isyarat karantina kapal, infografis pegawai, struktur balai dan akrilik di Wilker Cirebon
- Media KIE BKK berupa pembuatan spanduk HUT RI 2024 kantor induk Bandung, Wilker Cirebon, Kertajati, Patimban, Palabuhanratu dan Indramayu serta pembuatan poster struktur organisasi BKK Bandung
- Biaya pencetakan spanduk HKN ke 60 di kantor induk dan wilayah kerja
- Rapat penyusunan profil di BKK Bandung tanggal 20 Desember 2024
- Pembuatan Laporan Kinerja Semesteran Tahun 2024, Laporan Tahunan, Profile BKK, dan RAK



Gambar 4.86 Kegiatan Rapat penyusunan profil di BKK Bandung

8) 4815.EBA.994.Layanan Perkantoran (13 Bulan)

a. Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK

Kegiatan ini dilakukan untuk membayar hak pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berupa pembayaran gaji setiap bulan terhadap 82 pegawai termasuk pembayaran gaji ke 13 dan THR. Selain itu pada komponen ini terdapat uang makan PNS dan PPPK untuk 83 orang selama setahun dan uang lembur selama 12 bulan serta tunjang kinerja pegawai selama 12 bulan.

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran setiap bulan selama tahun 2024. Antara lain :

- Belanja paket atribut PDH berupa pangkat tanda jabatan TA 2024.
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi: pemeliharaan ECG 3 channel, USG, Tabung O2, AC, pompa, kamera, peralatan poliklinik, genset induk dan wilker, tensimeter, elevator/lift, printer, komputer, notebook, laptop, inventaris kantor, CCTV dan jaringan, pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 dan pemeliharaan proyektor.
- Belanja Outsourcing Cleaning Service, Satpam dan Pengemudi bulan Januari - Desember 2024.
- Belanja Perawatan Gedung Kantor Induk dan Wilker
- Belanja Honor Penanggung Jawab dan Pengelola Keuangan bulan Januari - Desember 2024.
- Belanja Belanja Langganan Daya dan Jasa Listrik, Air dan Telepon
- Belanja Perlengkapan Perkantoran Sehari-Hari kantor induk dan wilker, belanja makan dan snack rapat tamu pimpinan, pembelian paket meja kursi kepala timker, loker pegawai dan lampu gantung.
- Belanja Pemeriksaan Kesehatan Karyawan berupa pembayaran belanja barang sekaligus Jasa Medical Check Up Pegawai BKK Kelas I Bandung TA 2024 tanggal 3 Desember 2024.
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berupa pengiriman dokumen ke pusat dan wilker, pengiriman dokumen wilker ke induk, pengiriman vaksin, pengiriman alat tulis kantor ke wilker dan lainnya.
- Belanja Perlengkapan Perkantoran Sehari-Hari berupa pembuatan Pas Bandara, Asrama dan Kendaraan selama Embarkasi dan Debarkasi Tahun 2024, pembuatan Pas Bandara Husein dan Kertajati, pembuatan Pas Pelabuhan Cirebon, pembuatan Pas Pegawai Kemenkes dan pengadaan ATK kantor.

- Belanja Honor Pramubakti PPNPN berupa belanja gaji, lembur dan uang makan lembur PPNPN BKK Kelas I Bandung selama satu tahun.

9) 4815.EBC.954.Layanan Manajemen SDM (4 Orang)

a. Layanan Mutasi Kepegawaian

Kegiatan Layanan Mutasi Kepegawaian berupa perubahan formasi pegawai seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain. Jenis Mutasi meliputi: Mutasi Cuti Luar Tanggungan Negara, Mutasi CPNS, Mutasi Diklat, Mutasi Hukuman, Mutasi Jabatan, Mutasi Keluarga, Mutasi Karpeg, Mutasi Pendidikan, Mutasi Penghargaan, Mutasi Pindah Wilayah Kerja, Mutasi Pemberhentian, Mutasi Pindah Instansi, Mutasi Peninjauan Masa Kerja, Mutasi Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji PNS, Mutasi Kenaikan Pangkat, Mutasi Pensiun, dan Mutasi Pegawai Baru. Kegiatan Layanan Mutasi Kepegawaian yang dilaksanakan di BKK Kelas I Bandung yaitu :

- Kegiatan konsultasi layanan mutasi kepegawaian ke pusat tanggal 31 Januari 2024
- Kegiatan Layanan Mutasi Kepegawaian di Pos Pelabuhan Patimban tanggal 22 April 2024
- Kegiatan sosialisasi petunjuk teknis seleksi administrasi (Tahap II) penerimaan PPPK Kemenkes Tahun 2024 di Oria Hotel Jakarta Pusat tanggal 8 November 2024
- Kegiatan pelayanan mutasi kepegawaian BKK Bandung di Wilker Indramayu tanggal 27 Desember 2024



Gambar 4.87 Kegiatan sosialisasi petunjuk teknis seleksi administrasi (Tahap II) penerimaan PPPK



Gambar 4.88 Kegiatan konsultasi layanan mutasi kepegawaian ke pusat

b. Peningkatan Kompetensi

Kegiatan Peningkatan Kompetensi sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja PNS agar lebih profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya. yang dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Kegiatan di BKK Kelas I Bandung meliputi :

- Kegiatan konsultasi penataan kebutuhan dan perencanaan pegawai ke pusat tanggal 12 Agustus 2024
- Kegiatan koordinasi pengelolaan organisasi dan SDM di Lingkungan Kemenkes di Bekasi tanggal 7 - 9 Oktober 2024
- Kegiatan diklat teknis pelayanan adum di Pusdiklat Kominfo tanggal 21-23 Oktober 2024
- Kegiatan konsultasi penataan dan penyusunan kebutuhan pegawai dengan pusat di Jakarta tanggal 25 November 2024



Gambar 4.89 Kegiatan konsultasi penataan dan penyusunan kebutuhan pegawai dengan pusat

10) 4815.EBC.996.Layanan Pendidikan dan Pelatihan (7 Orang)

a. Peningkatan Kompetensi Administrasi Manajemen

Peningkatan kompetensi administrasi manajemen melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi secara efektif. kegiatan peningkatan kompetensi administrasi manajemen sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan memastikan kinerja yang efisien. kegiatan yang dilaksanakan di BKK Kelas I Bandung meliputi :

- Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Bumi Perkemahan Mandala Kitri Scout Camp Kab. Cianjur tanggal 28 November 2024 - 1 Desember 2024 di BBPK Ciloto oleh 2 orang pegawai



Gambar 4.90 Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)

b. Diklat Kepemimpinan, Pelayanan dan Bimtek Administrasi Umum

Diklat Kepemimpinan, Pelayanan, dan Bimtek Administrasi Umum bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperbarui pengetahuan mengenai administrasi umum. yang bertujuan untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan memahami prinsip-prinsip administrasi yang baik. kegiatan yang dilaksanakan di BKK Kelas I Bandung meliputi :

- Kegiatan uji kompetensi arsiparis tingkat ahli yang diselenggarakan oleh OSDM Kemenkes RI di Poltekkes III Bekasi tanggal 5-7 Februari 2024 oleh 1 orang pegawai
- Kegiatan in house training pembekalan terhadap calon PPNS di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat tanggal 3 September 2024 oleh 1 orang pegawai
- Kegiatan diklat jabatan fungsional pranata komputer di Bapelkes Cikarang tanggal 10-15



Gambar 4.91 Kegiatan diklat jabatan fungsional pranata komputer di Bapelkes Cikarang

c. Peningkatan Kapasitas Administrasi Umum

Peningkatan kapasitas administrasi umum untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja administrasi di berbagai bidang, terutama dalam pemerintahan dan organisasi. Ini melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya manusia, serta pemutahiran sistem dan prosedur administrasi. Kegiatan yang dilaksanakan di BKK kelas I Bandung meliputi :

- Kegiatan pelatihan strategi meningkatkan kualitas SAKIP/LAKIP tanggal 16-24 Mei 2024 oleh 9 orang pegawai
- Kegiatan pelatihan mandiri perencana ahli pertama jalur pengangkatan pertama di Bandung tanggal 5-9 Agustus 2024 oleh 1 orang pegawai
- Kegiatan workshop penyusunan anggaran dan akuntabilitas kinerja Sub Bagian Adiminstrasi Umum BKK Kelas I Bandung oleh 14 orang pegawai



Gambar 4.92 Kegiatan workshop penyusunan anggaran dan akuntabilitas kinerja Sub Bagian Adiminstrasi Umum

11) 4815.EBD.952.Layanan Perencanaan dan Penganggaran (3 Dokumen)

a. Penyusunan E Renggar

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang dan merencanakan penggunaan dana agar bisa seefisien mungkin. Kegiatan E-renggar merupakan tahapan awal pengusulan RKA, dalam hal ini BKK Kelas I Bandung

sebagai UPT/Satuan Kerja di bawah Ditjen P2P Kementerian Kesehatan membuat rencana kerja dan anggaran tahun 2025. Kegiatan desk pembahasan dan penelaahan usulan kegiatan dan anggaran program P2P TA 2025 dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 19-24 Februari 2024.



Gambar 4.93 Kegiatan desk pembahasan dan penelaahan usulan kegiatan dan anggaran program P2P TA 202

b. Koordinasi RAK

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam periode waktu 2020-2024 disusun sebagai wujud operasionalisasi Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. tujuan dari kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 - 2024 dengan Kegiatan Pelaksanaan di Tahun 2024 apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah di buat. Kegiatan ini dilaksanakan meliputi :

- Kegiatan penyusunan profil dan rencana aksi kegiatan tahun 2024 ke Wilker Cirebon tanggal 23 Desember 2024
- Kegiatan pengumpulan data RAK dan profil tahun 2024 di Wilker Indramayu tanggal 27 Desember 2024



Gambar 4.94 Kegiatan pengumpulan data RAK dan profil tahun 2024 di Wilker Indramayu

c. Penyusunan RKAKL

Hasil dari kegiatan Desk, Penelitian Dan Reviu RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal P2P TA 2025 yaitu berupa CHD, CHR dan CHP dari APIP/ Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Anggaran dan Unit Utama Ditjen P2P, BKK Kelas I Bandung sendiri tidak ada catatan yang perlu ditindaklanjuti dari APIP/ Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Anggaran dan Unit Utama Ditjen P2P untuk RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran TA 2025.

- Perjalanan dinas a.n I. Sildani Kristi dan M. Dahlan Fazhry kegiatan desk pembahasan dan penelaahan usulan kegiatan dan anggaran program P2P TA 2025 di Kota Yogyakarta tgl 19-24 Februari 2024
- Perjalanan dinas a.n M. Dani S dan I. Sildani kegiatan koordinasi usulan dokumen perencanaan RKAKL di Wilker Patimban tgl 22 April 2024
- Biaya hotel a.n M. Dani S, I. Sildani dan M. Dahlan Fazhry keg. desk, penelitian dan reviu RKA-K/L pagu anggaran Ditjen P2P TA 2025 di Kota Bekasi tgl 24 - 27 Juli 2024 (Hotel Santika)
- Perjalanan dinas a.n dr. Sedya dan Wartoni keg. desk, penelitian dan reviu RKS-K/L pagu anggaran Ditjen P2P TA 2025 di Kota Bekasi tgl 26-27 Juli 2024
- Perjalanan dinas a.n dr. Sedya Dwisangka, M. Dani Suarman dan I. Sildani K koordinasi perencanaan terkait rekomendasi TA 2025 di Jakarta tgl 23 September 2024
- Biaya hotel an. M. Dani Suarman, Ignatius Sildani dan Widya Oktaviani kegiatan Penyusunan RKAKL di Hotel Horison Ultima Bekasi tanggal 7 sd 10 Oktober 2024 (Horison)
- Biaya transportasi an. Fitri Mayawati, SKM kegiatan Desk dan RKAKL di Hotel Horison Ultima Bekasi tanggal 8 sd 9 Oktober 2024 (Jackal Holiday)
- Perjalanan dinas a.n Wartoni keg. desk, penelitian dan reviu RKA-K/L pagu alokasi anggaran Ditjen P2P TA 2025 di Kota Bekasi tgl 7-10 Oktober 2024

- Perjalanan dinas a.n dr. Sedya Dwisangka keg. desk, penelitian dan reviu RKA-K/L pagu anggaran Ditjen P2P TA 2025 di Kota Bekasi tgl 7-10 Oktober 2024
- Perjalanan dinas a.n Widyanti O konsultasi terkait persiapan penyusunan e-renggar BKK Kelas I Bandung Tahun 2026 di Jakarta tanggal 25 November 2024
- Biaya hotel a.n M. Dani Suarman dan I. Sildani Kristi kegiatan penyusunan target dan pagu PNBP TA 2026 di Kota Bekasi tanggal 3-6 Desember 2024 (Avenzel Hotel)
- Perjalanan dinas a.n I. Sildani, M. Dani, Vhanie, Widyanti dan M. Dahlan F kegiatan pembahasan usulan dokumen perencanaan RKAKL di Jakarta Pusat tgl 22 November 2024
- Perjalanan dinas a.n M. Dani Suarman dan I. Sildani kegiatan penyusunan target dan pagu PNBP TA 2026 di Kota Bekasi tanggal 3-6 Desember 2024
- Perjalanan dinas a.n dr. Sedya, Wartoni, M. Dani S, I. Sildani dan M. Dahlan F kegiatan koordinasi penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN TA 2025 di Jakarta tgl 23 Desember 2024



Gambar 4.95 Kegiatan desk, penelitian dan reviu RKA-K/L pagu alokasi anggaran Ditjen P2P TA 2025



Gambar 4.96 Kegiatan penyusunan target dan pagu PNBP TA 2026

12) 4815.EBD.953.Layanan Pemantauan dan Evaluasi (4 Dokumen)

a. Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses analisis yang sistematis untuk menilai implementasi dan kinerja SAKIP dalam suatu instansi pemerintah. Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi. di BKK Kelas I Bandung tahun 2024 kegiatan evaluasi SAKIP meliputi :

- Kegiatan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 di Bigland Hotel Bogor tanggal 24-26 Januari 2024
- kegiatan Pertemuan Evaluasi SAKIP Pusat dan UPT di Bigland Hotel Bogor tanggal 5-7 Maret 2024
- kegiatan reuiu SAKIP desk APIP Tahun 2023 di Jakarta Pusat tanggal 16-19 April 2024
- Koordinasi akuntabilitas instansi dan harkordia Kemenkes di Ditjen Tenaga Kesehatan Kemenkes tanggal 5 Desember 2024
- Kegiatan Evaluasi SAKIP di Wilker Indramayu tanggal 18 Desember 2024
- Kegiatan pengumpulan data dukung SAKIP dan Laporan Tahunan 2024 di Pos Pelabuhan Patimban tanggal 23 Desember 2024
- Kegiatan koordinasi SAKIP Tahun 2024 di Pos BIJB Kertajati tanggal 23 Desember 2024



Gambar 4.97 kegiatan reuiu SAKIP desk APiP Tahun 2023 di Jakarta Pusat

b. Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang kinerja dan pencapaian suatu organisasi selama satu tahun keuangan. Laporan ini ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal BKK Kelas I Bandung untuk memberikan transparansi tentang kegiatan dan anggaran organisasi. Kegiatan Penyusunan laporan Tahunan di BKK Kelas I Bandung meliputi :

- Kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan laporan tahunan TA 2024 di Wilker Indramayu dan Kertajati tanggal 21 November 2024
- Kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan laporan tahunan TA 2024 di Wilker Palabuhanratu tanggal 28-29 November 2024
- Kegiatan koordinasi penyusunan laporan tahunan BKK Kelas I Bandung di Wilker Kertajati tanggal 19 Desember 2024
- Koordinasi dan sinkronisasi data Laptah TA. 2024 di Wilker Patimban tanggal 19 Desember 2024



Gambar 4.98 Kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan laporan tahunan TA 2024 di Wilker Palabuhanratu

c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Pencegahan Pengendalian Kesehatan

Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaporan dalam pencegahan dan pengendalian kesehatan bertujuan untuk memastikan efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pemantauan melibatkan pengumpulan dan analisis data secara terus-menerus, sedangkan evaluasi mengevaluasi hasil dan dampak program. Pelaporan kemudian menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaporan dalam pencegahan dan pengendalian di BKK Kelas I Bandung meliputi :

- Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaporan kegiatan bulanan di Kantor Induk Balai Karkes Kelas I Bandung tanggal 8 Maret 2024
- Kegiatan Rapat Bulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Pencegahan Kesehatan Triwulan I Tahun 2024 di Kantor Induk Balai Karkes Kelas I Bandung tanggal 8 Maret 2024
- Kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut (Kapal) di Wilker Patimban
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaporan pencegahan pengendalian kesehatan berupa kegiatan penghapusan arsip tahap 2 tanggal 16 Des 2024
- Kegiatan monev P2P terkait penghapusan arsip dan tindak lanjut persiapan penyusunan usul arsip musnah milik BKK Bandung di kantor induk BKK Bandung tanggal 16-18 Desember 2024
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaporan P2P terkait inventarisasi dan pemanfaatan BMN BKK Kelas I Bandung tanggal 20 Desember 2024.



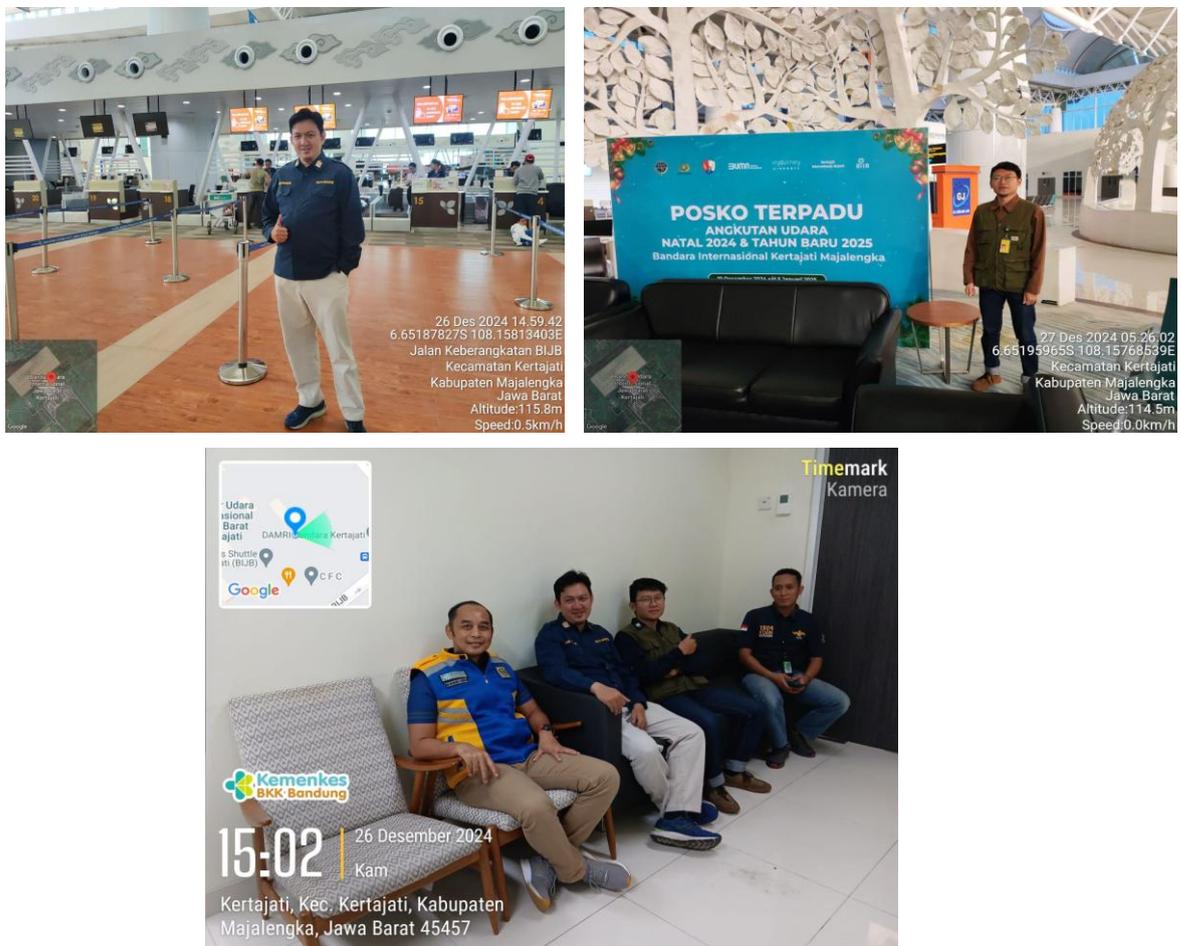
Gambar 4.99 Kegiatan Rapat Bulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Pencegahan Kesehatan Triwulan I Tahun 2024

d. Monitoring Evaluasi

Kegiatan monitoring dilakukan setelah penetapan perencanaan di awal tahun, sehingga dapat diketahui tujuan akhir yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut. Monitoring juga dilakukan dalam rangka mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang telah dijalankan. Diakhir kegiatan monitoring, dilakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan juga untuk mengetahui terjadi permasalahan atau tidaknya selama masa kegiatan pencapaian tujuan (target). Jika terjadi permasalahan, dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Dan dalam melakukan pengentasan permasalahan dapat pula diantisipasi terjadinya permasalahan yang sama dimasa setelah dilakukan monitoring. Kegiatan evaluasi dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil monitoring. Evaluasi dilaksanakannya untuk mengetahui pencapaian sasaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan yang telah ditetapkan diawal.

- Kegiatan bimtek terintegrasi pelaksanaan program P2P tentang pengadministrasi umum di Kantor Induk Balai Karkes Kelas I Bandung tanggal 3 April 2024
- Kegiatan bimtek terintegrasi pelaksanaan program P2P dan pengawasan lainnya di Wilker Indramayu tanggal 22 April 2024
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi P2P di Pos Pelabuhan Patimban tanggal 22 April 2024
- Kegiatan Rapat koordinasi lintas sektor terkait sosialisasi digitalisasi faktor risiko kesehatan pada alat angkut di Pos Pelabuhan Patimban tanggal 14 Agustus 2024
- Kegiatan pengawasan penetapan lelang BMN BKK Kelas I Bandung oleh Tim SKI dan SPIP di Wilker Cirebon tanggal 2 September 2024
- Kegiatan monev terintegrasi pelaksanaan program P2P berupa pemeliharaan gedung ke Wilker Kertajati dan Indramayu tanggal 14 November 2024
- Kegiatan pelaksanaan program monev P2P dalam rangka Nataru di Kab. Majalengka tanggal 26-27 Desember 2024
- Kegiatan pelaksanaan program monev P2P dalam rangka Nataru di Kab. Majalengka tanggal 24-25 Desember 2024
- Kegiatan bimtek pelaksanaan program P2P dan Nataru di Wilker Patimban tanggal 30-31 Desember 2024
- Kegiatan pelaksanaan program monev P2P dalam rangka Nataru di Kab. Majalengka tanggal 30-31 Desember 2024
- Kegiatan Bimtek program P2P dan Nataru di Wilker Indramayu dan Kertajati tanggal 24-25 Desember 2024

- Kegiatan bimtek pelaksanaan program P2P dan Nataru di Wilker Cirebon tanggal 26-27 Desember 2024
- Kegiatan monitoring pelaksanaan program P2P dan Nataru di Pos BIJB Kertajati tanggal 28-29 Desember 2024
- Kegiatan pelaksanaan program monev P2P dalam rangka nataru di Kab. Majalengka tanggal 26-27 Desember 2024
- Kegiatan Bimtek Program P2P dan Nataru di Wilker Patimban dan Cirebon tanggal 28-29 Desember 2024



Gambar 4.100 Kegiatan pelaksanaan program monev P2P dalam rangka nataru di Kab. Majalengka

13) 4815.EBD.955.Layanan Manajemen Keuangan (2 Dokumen)

a. **Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P**

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P di BKK Kelas I Bandung yaitu, Rekonsiliasi dan Reviu LK UAPPA E1 Laporan Keuangan Satker Tahunan 2025 dan Semester I serta Triwulan III Komprehensif Tahun 2024, Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPN, Sosialisasi Peraturan dan

- Koordinasi Pengelolaan PNBP Pada Pihak Intern dan Eksternal UPT dan Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNBP Ke Pusat. Kegiatan tersebut terdiri dari :
- Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan (Tahunan) TA 2023 Tingkat Satuan Kerja Kantor Pusat dan UPT Vertikal di Harris Hotel Bekasi tgl 23 - 26 Januari 2024
 - Kegiatan pertemuan sosialisasi perbendaharaan TA 2024 di Grand Savero Hotel Bogor tgl 24-26 Januari 2024
 - Kegiatan konsolidasi laporan PNBP TK Satker Pusat & UPT di Hotel Harris Bekasi tgl 23 Januari 2024
 - Kegiatan Konsultasi Pengelolaan PNBP ke Pusat tanggal 31 Januari 2023
 - Kegiatan rekonsiliasi pelaporan PNBP di Wilker Palabuhanratu tgl 12-13 Februari 2024
 - Konsultasi laporan keuangan audited terkait prosedur analitis BPK dan Triwulan I Tahun 2024 ke pusat tgl 21 Maret 2024
 - Kegiatan konsolidasi perbendaharaan ke pusat tgl 21 Maret 2024
 - Konsultasi laporan keuangan dan BMN audited terkait prosedur analitis BPK dan permasalahan periode triwulan I tahun 2024 di Sesditjen P2P Kemenkes tgl 21 Maret 2024
 - Kegiatan Rekonsiliasi PNBP di Pos Pelabuhan Patimban tanggal 22 April 2024
 - Kegiatan konsolidasi laporan keuangan audited TA 2023 di Hotel Atria Gading Serpong Tangerang tgl 29 April-1 Mei 2024
 - Kegiatan rekon dan stok opname BMN ke Wilker Kertajati tgl 4 Juli 2024
 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan semester I TA 2024 di Hotel Horison Bekasi tgl 16-19 Juli 2024
 - Kegiatan Konsultasi Laporan Keuangan terkait PNBP ke pusat tgl 12 Agustus 2024
 - Kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan revisi target dan pagu PNBP TA 2025 di Ditjen P2P Kemenkes tgl 23 September 2024
 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan UAPPA E-1 Triwulan III Tahun 2024 di Harris Hotel Bekasi tgl 16 Oktober 2024
 - Kegiatan sosialisasi peraturan PNBP dengan pihak eksternal (agen kapal) di Wilker Cirebon tgl 14 Oktober 2024
 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan BMN UAPPA/B E-1 Ditjen P2P Triwulan III TA 2024 di Hotel Harris Kota Bekasi tgl 15-18 Oktober 2024
 - Kegiatan konsolidasi penyusunan serta desk PIPK Ditjen P2P TA 2024 tingkat satker kantor pusat dan UPT di Bekasi tgl 20-21 November 2024
 - Kegiatan rekonsiliasi pelaporan PNBP ke Wilker Indramayu dan Kertajati tanggal 21 November 2024
 - Konsultasi terkait pelaksanaan ukom perpindahan jabatan lain ke JFAA tahun 2024 di Jakarta tanggal 25 November 2024

- Kegiatan penyusunan target dan pagu PNBP TA 2026 di Avenzel Hotel Bekasi tanggal 3-6 Desember 2024
- Kegiatan rekonsiliasi PNBP di Wilker Palabuhanratu tanggal 28-29 November 2024
- Kegiatan sosialisasi peraturan PNBP ke pihak eksternal di Pos BIJB Kertajati Majalengka tanggal 3 Desember 2024
- Kegiatan sosialisasi peraturan PNBP ke pihak eksternal di Wilker Indramayu tanggal 4 Desember 2024
- Kegiatan penyusunan target dan pagu PNBP TA 2026 di Bekasi tanggal 3-6 Desember 2024
- Kegiatan sosialisasi peraturan PNBP ke pihak eksternal (agen kapal) di Pelabuhan Cirebon tgl 13 Desember 2024
- Kegiatan rekonsiliasi pelaporan PNBP di Wilker Patimban tanggal 17 Desember 2024
- Koordinasi dan sosialisasi terkait pengelolaan PNBP dengan agen kapal dalam negeri dan luar negeri di Kantor Agen Pamanukan Kab. Subang tanggal 9 Des 2024
- Konsultasi dan penyerahan pelaporan PNBP Tahun 2024 di Jakarta tanggal 19 Desember 2024
- Konfirmasi data untuk penyusunan target dan pagu PNBP di Wilker Cirebon tgl 18 Desember 2024
- Konsultasi target dan penggunaan pagu TA. 2025 di Jakarta tanggal 27 Desember 2024



Gambar 4.101 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P

b. Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P

Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P yaitu Kegiatan Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Coaching SKI serta SPIPT, Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Penyusunan Realisasi Anggaran. Kegiatan tersebut terdiri dari :

- Konsultasi PNPB terkait perubahan nomenklatur dan pengambilan hasil koreksi setoran ke KPPN Bandung 1 tanggal 8 Januari 2024
- Konsultasi terkait koreksi penerimaan negara ke KPPN Bandung 1 tanggal 3 Januari 2024
- Konsultasi terkait saldo minus pada Neraca TA 2023 dan perubahan user operator dan approver Sakti ke KPPN Bandung 1 tgl 4 Januari 2024
- Konsultasi pengajuan UP dan perubahan nama satker ke KPPN Bandung 1 tanggal 17 Januari 2024
- Kegiatan konsultasi pengaktifan PIN PPSPM TA 2024 ke KPPN Bandung 1 tgl 10 Januari 2023
- Konsultasi penyusunan LK unaudited TA 2023 dan koreksi akun persediaan ke KPPN Bandung 1 tgl 18 Januari 2024
- Konsultasi terkait permasalahan gaji PPNPN untuk pengajuan bulan Januari 2024 ke KPPN Bandung 1 tgl 29 Januari 2024
- Kegiatan koordinasi terkait SPIP dan menghadiri talkshow "Jadi Auditor Itu Asyik Loh" di Inspektorat Jenderal Kemenkes RI tgl 2 Februari 2024
- Kegiatan entry meeting audit BPK RI atas LK TA 2023 di RSUP dr Hasan Sadikin Bandung tgl 15 Februari 2024
- Kegiatan bimtek pengelolaan keuangan dan perbendaharaan di Wilker Palabuhanratu tgl 12-13 Februari 2024
- Konsultasi permasalahan pendistribusian tunjangan span Bank Syariah ke KPPN Bandung 1 tgl 22 Februari 2024
- Konsultasi SPP kekurangan gaji dan validasi KPA pada LPJ ke KPPN Bandung 1 tgl 5 Maret 2024
- Konsultasi permasalahan pengajuan kekurangan gaji pegawai ke KPPN Bandung 1 tgl 6 Maret 2024
- Kegiatan konsultasi penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan serta RPK/RPD Tahun 2024 ke pusat tgl 21 Maret 2024
- Konsultasi terkait perubahan data NPWP nama satker KKP Kelas II Bandung menjadi Balai Karkes Kelas I Bandung ke KPP Pratama Bandung Cibeunying tgl 2 April 2024
- Konsultasi perbedaan realisasi belanja bulan Maret 2024 versi SAKTI dan OMSPAN ke KPPN Bandung 1 tgl 2 April 2024

- Konsultasi terkait prosedur pengarsipan dokumen keuangan dan penyampaian perubahan NPWP ke KPPN Bandung 1 tgl 5 April 2024
- Konsultasi BAST kontraktual outsource dan LPJ Bulan Maret 2024 ke KPPN Bandung 1 tgl 5 April 2024
- Konsultasi mengenai tutup buku periode 14, penginputan caput serta LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran ke KPPN Bandung 1 tgl 8 Mei 2024
- Kegiatan Sosialisasi Per-5/PB/2024 dan RPD Harian serta Launcing Implementasi ISO SMAP 37001:2016 dan Sosialisasi Anti Korupsi ke KPPN Bandung 1 tgl 28 Mei 2024
- Kegiatan bimtek aplikasi MonSAKTI dan penyusunan laporan keuangan satker ke KPPN Bandung 1 tgl 27 Mei 2024
- Kegiatan konsultasi selisih TDK COA penerimaan pada rekonsiliasi monsakti bulan April 2024 ke KPPN Bandung 1 tgl 4 Juni 2024
- Kegiatan konsultasi PNBP terkait selisih pembukuan PNBP dengan E-Rekon Mei 2024 ke KPPN Bandung 1 tgl 4 Juni 2024
- Kegiatan konsultasi PNBP terkait selisih laporan pertanggungjawaban bendahara PNBP di aplikasi sakti dan simponi ke KPPN Bandung 1 tgl 10 Juni 2024
- Transport dalam kota a.n Nuning Y dan Tri Wisnu keg. penyelesaian data pegawai yang terindikasi tidak valid pada aplikasi gaji ke KPPN Bandung 1 tgl 12 Juni 2024
- Konsultasi permasalahan tunjangan kinerja susulan P3K 13 dan data NPWP P3K pada aplikasi SAKTI ke KPPN Bandung 1 tgl 31 Juli 2024
- Kegiatan koordinasi, sosialisasi dan workshop manajemen risiko dan SPIPT di Itjen Kemenkes Jakarta tgl 15 Agustus 2024
- Transport dalam kota a.n Detianti dan Hilda keg. konsultasi permasalahan SHR Juli Monsakti dan konfirmasi pajak di SIPORTAL ke KPPN Bandung 1 tgl 19 Agustus 2024
- Konsultasi koreksi akun PNBP ke KPPN Bandung I tgl 27 Agustus 2024
- Konsultasi permasalahan capaian output Bulan Agustus dan penginputan pembayaran utang listrik Bulan Juli pada Aplikasi SAKTI ke KPPN Bandung I tgl 6 September 2024
- Konsultasi koreksi dan pembuatan ADK koreksi PNBP serta pelatihan refreshment bendahara di KPPN Bandung I tgl 12 September 2024
- Konsultasi terkait usulan revisi RPK RPD ke Kanwil DJPB Prov. Jabar tgl 11 September 2024
- Konsultasi tindak lanjut koreksi akun PNBP dan konfirmasi setoran pajak pada SIPORTAL ke KPPN Bandung I tgl 10 September 2024
- Konsultasi terkait penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP TA 2024 ke Kanwil DJPB Prov. Jabar tgl 25 September 2024
- Kegiatan sosialisasi pembayaran dan pendampingan pra pembayaran common expenses melalui PPP ke KPPN Bandung I tgl 24-25 September 2024

- Menghadiri undangan pendampingan proses pembayaran common expenses melalui PPP di KPPN Bandung I tgl 8 Oktober 2024
- Kegiatan asistensi penyusunan laporan keuangan di KPPN Bandung I tgl 11 Oktober 2024
- Konsultasi tunjangan kinerja bulan September 2024 ke KPPN Bandung I tgl 14 Oktober 2024
- Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan revisi penggunaan kelebihan realisasi PNBP TA 2024 dan revisi hal III DIPA TW IV ke Kanwil DJPB Jabar tgl 14 Oktober 2024
- Kegiatan pertemuan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun 2024 di KPPN Bandung I tgl 15 Oktober 2024
- Kegiatan sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 di Wilker Palabuhanratu tanggal 28-29 November 2024
- Konsultasi tunjangan kinerja pegawai BKK Kelas I Bandung Tahun 2024 ke KPPN Bandung I tanggal 5 Desember 2024
- Kegiatan sosialisasi terkait peraturan revisi anggaran dan strategi pengisian capaian output tanggal 18 Desember 2024
- Koordinasi dan konsultasi LHP dan menghadiri undangan acara Hakordia di Kemenkes Jakarta tanggal 18 Desember 2024
- Konsultasi RPK RPD Akhir TA 2024 di Sesditjen P2P Kemenkes Bagian Keuangan dan BMN tanggal 20 Desember 2024
- Sosialisasi LLAT pengelolaan keuangan dan tindak lanjut PIPK di Wilker Cirebon dan Indramayu tanggal 23-24 Desember 2024
- Kegiatan konsultasi RPK RPD TA. 2025 ke Ditjen P2P tgl 27 Desember 2024
- Perpanjangan sertifikat BNT Bendahara Pengeluaran dan LLAT mengenai SPM RPATA di KPPN Bandung I tgl 19 Desember 2024





Gambar 4.102 Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Ditjen P2P

14) 4815.EBD.974.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (1 Dokumen)

a. Penyelenggaraan Kearsipan

Kegiatan penyelenggaraan Kearsipan di BKK Kelas I Bandung yaitu berupa Belanja bahan kotak pengelompokan arsip aktif sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI nomor 19 tahun 2019, Belanja perjalanan dinas biasa tentang Penataan Persuratan dan Kearsipan, Pengawasan Arsip Ditjen P2P dan Bimbingan Teknis Persuratan dan Kearsipan ke wilayah kerja dengan melakukan perjalanan dinas ke wilayah kerja serta Melakukan Pengawasan Arsip ke wilker dan Bimtek Persuratan dan Kearsipan ke Wilker. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- Kegiatan inventarisir arsip dan sampling penilaian SKI di Kertajati dan Indramayu tgl 13 Februari 2024
- Kegiatan inventarisir arsip dan sampling penilaian SKI di Kertajati dan Indramayu tgl 13 Februari 2024
- Kegiatan desk pengawasan kearsipan di Swissbell Yogyakarta tgl 29 April - 2 Mei 2024
- Sosialisasi pengelolaan persuratan dengan menggunakan aplikasi PANTER dan inventarisir arsip di Wilker Kertajati tgl 4 Juli 2024
- Belanja kotak pengelompokan arsip aktif dan inaktif
- Kegiatan inventarisir oengelolaan kearsipan di Wilker Cirebon tgl 25 September 2024
- Kegiatan inventarisir pengelolaan kearsipan di Wilker Cirebon tgl 28-29 Oktober 2024
- Kegiatan Inventarisir Kearsipan di Wilker Indramayu tanggal 18 Desember 2024



Gambar 4.103 Kegiatan desk pengawasan kearsipan di Swissbell Yogyakarta dan Kegiatan inventarisir pengelolaan kearsipan di Wilker Cirebon

4.2 PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 12 Pencapaian Kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN	0,96	0,96	100%
		Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	98%	100%	102%
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan /Bandara/PLBN	0,97	1	103,09%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	82	95,58	116,56%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	98,65	106,07%
		Kinerja implementasi WBK satker	82	88,79	108,28%
		Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya	80%	100%	125%
		Persentase realisasi anggaran	96%	98,34	102,44%
Rata - Rata Capaian				107,94	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2024 adalah 107,94%. Capaian paling tinggi pada indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya, sedangkan capaian paling rendah adalah ada indikator Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBN.

4.3 REALISASI ANGGARAN

Sumber dana Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berasal dari APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun 2024. pada awal tahun BKK Kelas I Bandung memperoleh dana sebesar Rp. 23.854.152.000.- (DIPA No. SP DIPA- 024.05.2.415712/2024). Pada tahun 2024 adanya penambahan pada anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP sebesar Rp. 4.318.221.000.- sehingga Pagu s.d Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 28.172.373.000.-

4.4 UPAYA UNTUK MERAH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang turut berperan serta dalam perwujudan pemerintahan yang bersih, transparansi, dan akuntabel.

Strategi yang telah dilaksanakan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung tahun 2024 dalam mendukung upaya WTP dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. BKK Kelas I Bandung telah membentuk SK Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada BKK Kelas I Bandung Tahun 2024.
2. Penyetoran PNBP dilakukan langsung oleh wajib bayar ke bank persepsi atau PT POS
3. Pengelolaan kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni dan PNBP dilaksanakan secara transparan.
4. Bagi pejabat struktural dan pengelola keuangan beserta pejabat pengadaan melakukan pengisian LHKPN.
5. Telah dilakukan penilaian *self-assesment* oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk penilaian calon satker berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tingkat Nasional pada BKK Kelas I Bandung pada tahun 2024 sebesar 88,79 (syarat minimal 75).

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Jumlah Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BKK Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 71 orang PNS, 12 PPPK, dan 14 orang PPNPN sehingga total menjadi 97 orang yang tersebar baik di induk maupun wilayah kerja.
2. BKK Kelas I Bandung memiliki sarana prasarana barang tidak bergerak berupa tanah seluas 5.973 m² dan bangunan seluas 3.594 m² serta sarana prasarana berupa barang bergerak sebanyak 49 unit yang terdiri dari 26 unit roda 4 dan 20 unit roda 2.
3. Realisasi anggaran untuk Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebesar 98,34% (realisasi sebesar Rp. 27.706.092.708,- dari pagu anggaran Rp. 28.172.373.000,-)
4. Dari 28 rincian output yang terdapat dalam DIPA di BKK Kelas I Bandung, semuanya telah mencapai target.
5. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan yakni terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024 serta Sasaran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2020 - 2024 yaitu:
 - a. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.
 - b. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

5.2 SARAN

1. Pelaksanaan kegiatan diharapkan mengikuti Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah dibuat pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran dapat lebih dimaksimalkan dan tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran agar dapat dimonitoring secara intensif mulai dari awal pelaksanaan, pertengahan pelaksanaan kegiatan serta akhir tahun sehingga dapat segera diperoleh tindakan korektif apabila dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan mengalami hambatan baik dari teknis pelaksanaan kegiatan, maupun penyerapan anggaran.

3. Lebih sering melaksanakan koordinasi melalui rapat internal baik antar seksi/sub bagian maupun dengan wilayah kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan *time schedule*
4. Lebih meningkatkan dalam pengarsipan, baik pengarsipan surat, keuangan maupun pelaporan kegiatan sehingga jika diperlukan lebih mudah memperoleh informasinya.
5. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) BKK Kelas I Bandung diarahkan pada tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat kompetensi memadai, dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi bagi organisasi.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut di atas, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kinerja dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih akuntabel dan bermanfaat.